



2024

LAPORAN KINERJA



**BALAI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**



**BPSPL
DENPASAR**
#BijakMengelolaLaut



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Denpasar Tahun 2024 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi BPSPL Denpasar selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan BPSPL Denpasar selama Tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Denpasar dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Denpasar.

Gianyar, 31 Desember 2024

Kepala BPSPL Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BPSPL Denpasar tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Pada pelaporan LKj tahun 2024, data capaian dan target BPSPL Denpasar telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Indikator Kinerja (IK) yang dapat diukur pada tahun 2024 adalah IKU 1 Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp.000) dengan target 950.000.000 tercapai Rp3.035.051.977,-; IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang) dengan target 160 tercapai 160 orang; IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 3 tercapai 3 Dokumen; IKU 4 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan

Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah) dengan target 2 tercapai 2 Daerah; IKU 5 Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan) dengan target 1 tercapai 1 kesepakatan; IKU 6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok) dengan target 3 tercapai 3 kelompok; IKU 7 Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencanharian Baru (Orang) dengan target 25 tercapai 25 orang; IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) dengan target 6 tercapai 6 jenis; IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) tercapai 5 Jenis; IKU 10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 1 tercapai 1 Dokumen; IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan) dengan target 2 tercapai 2 kawasan; IK 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 93,76 tercapai 99,44; IK 13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 71 tercapai 96,42; IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 75 tercapai 87,57; IK 15 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) dengan target 88 tercapai 91,36; IK 16 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 81 tercapai 85,55; IK 17 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) dengan target 4 dokumen dan capaian 4 dokumen; IK 18 Presentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) dengan target 94 dan capaian 133,33; IK 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 80 dan capaian 100; IK 20 Presentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 100 tercapai 100. IK 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%) dengan target 80 tercapai 97,5; IK 22 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup BPSPL

Denpasar (Nilai) dengan target 70 tercapai 98,80.

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp16.435.987.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp14.510.987.000,- dan PNPB Rp1.925.000.000,-. BPSPL Denpasar mendapatkan tambahan pagu dari sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada Triwulan III sebesar Rp1.660.000.000,-Jumlah pagu BPSPL Denpasar tahun 2024 sebesar Rp18.095.987.000. Pada triwulan IV, dengan adanya kebijakan pemerintah melalui S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga, dilakukan revisi DIPA untuk blokir dana dengan kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) sebesar Rp.265.391.000,-. Total realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 (Per 31 Desember 2024) sesuai data omspan sebesar Rp17.783.830.375,- (98,27%).

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum pada perjanjian kerja. Hasil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM BPSPL Denpasar Tahun 2024 adalah 104,76% yang berkategori baik dengan ditandai warna hijau pada aplikasi kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).

Langkah-langkah strategis yang akan diambil sebagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja BPSPL Denpasar kedepan antara lain; Melaksanakan peningkatan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES; Melaksanakan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar; Melaksanakan peningkatan dalam penataan ruang laut, Melaksanakan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Denpasar dengan tatakelola pemerintahan yang baik, dan melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.4 Organisasi.....	4
1.5 Kepegawaian.....	6
1.6 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ..	9
1.7 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	18
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	31
IKU 1. Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp .000)	34
IKU 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang).....	36
IKU 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	43
IKU 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah).....	52
IKU 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan).....	63
IKU 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok).....	66
IKU 7. Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian baru (Orang).....	71

IKU 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	76
IKU 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutak di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	88
IKU 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen).....	99
IKU 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	103
IK 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar	107
IK 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	110
IK 14. Nilai Unit Kinerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai).....	112
IK 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	114
IK 16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	118
IK 17. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	122
IK 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%).....	123
IK 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	124
IK 20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	126
IK 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)	127
IK 22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (Nilai).....	129
3.2 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	131
3.3 Realisasi Anggaran	134
BAB IV PENUTUP	138
4.1 Kesimpulan.....	138
4.2 Rekomendasi.....	139
LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja.....	6
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia	10
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.....	10
Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	11
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	12
Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Denpasar 2020-2024.....	22
Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024	27
Tabel 8. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2024.....	32
Tabel 9. Capaian IKU 1 BPSPL Denpasar.....	34
Tabel 10. <i>Capaian IKU 2 BPSPL Denpasar</i>	37
Tabel 11. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Gerakan nasional Bulan Cinta Laut.....	38
Tabel 12. Kegiatan Pendukung IKU 2	39
Tabel 13. Capaian IKU 3 BPSPL Denpasar	43
Tabel 14. Pelaksanaan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024.....	45
Tabel 15. Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024.....	47
Tabel 16. Kegiatan Pendukung IKU 3.....	50
Tabel 17. Capaian IKU 4 BPSPL Denpasar	52
Tabel 18. Kegiatan Pendukung IKU 2.....	60
Tabel 19. Capaian IKU 5 BPSPL Denpasar	63
Tabel 20. Kegiatan Pendukung IKU 5.....	65
Tabel 21. Capaian IKU 6 BPSPL Denpasar	67
Tabel 22. Kegiatan Pendukung IKU 6.....	69
Tabel 23. Capaian IKU 7 BPSPL Denpasar	71
Tabel 24. Kegiatan Pendukung IKU 7.....	74
Tabel 25. Capaian IKU 8 BPSPL Denpasar	76
Tabel 26. Komposisi Hiu dan Pari yang Didaratkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar T.A. 2024.....	79
Tabel 27. <i>Penanganan Biota Dilindungi/ Terancam Punah BPSPL Denpasar T.A. 2024</i>	83
Tabel 28. Penanganan Benih Bening Lobster (BBL) BPSPL Denpasar TA. 2024	84
Tabel 29. Kegiatan Pendukung IKU 8.....	85
Tabel 30. Capaian IKU 9 BPSPL Denpasar	89
Tabel 31. Data Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi Lapang SIPJI	95
Tabel 32. Kegiatan Pendukung IKU 9.....	97
Tabel 33. Capaian IKU 10 BPSPL Denpasar	99
Tabel 34. Kegiatan Pendukung IKU 10	102
Tabel 35. Capaian IKU 11 BPSPL Denpasar	103
Tabel 36. Kegiatan Pendukung IKU 11	106

Tabel 37. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	108
Tabel 38. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar	108
Tabel 39. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar	110
Tabel 40. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar	112
Tabel 41. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar	115
Tabel 42. Kategori nilai PM SAKIP	119
Tabel 43. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar	120
Tabel 44. Capaian IK 17 BPSPL Denpasar	122
Tabel 45. Capaian IK 18 BPSPL Denpasar	123
Tabel 46. Capaian IK 19 BPSPL Denpasar	125
Tabel 47. Capaian IK 20 BPSPL Denpasar	126
Tabel 48. Capaian IK 21 BPSPL Denpasar	128
Tabel 49. Capaian IK 22 BPSPL Denpasar	130
Tabel 50. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2024	131
Tabel 51. <i>Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2024</i>	135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2024	6
Grafik 2. Perincian Tenaga Kontrak BPSPL Denpasar TA 2024.....	7
Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 20247	
Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2024	8
Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2024	8
Grafik 6. Progres Penilaian Teknis BPSPL Denpasar T.A. 2024.....	48
Grafik 7. Jumlah Dokumen SAJI DN Arwana Terbit T.A. 2024	91
Grafik 8. Jumlah Dokumen SAJI DN T.A. 2024.....	92
Grafik 9. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari T.A. 2024	93
Grafik 10. Jumlah Rekomendasi SAA T.A. 2024	93
Grafik 11. Jumlah Rekomendasi Teripang T.A. 2024.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar.....	5
<i>Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar.....</i>	<i>31</i>
Gambar 3. Persebaran Permohonan Penilai Teknis T.A. 2024.....	49
Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian KKPRL BPSPL Denpasar T.A. 2024	49
Gambar 5. Peta Lokasi Titik Survei (Melati/BPSPL Denpasar, 2024)	55
Gambar 6. Alokasi Ruang KKD Bali Selatan berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Bali.....	56
Gambar 7. Batas Alokasi Ruang KKD Bali Selatan wilayah Kota Denpasar berdasarkan RTRW Provinsi Bali	57
Gambar 8. Peta Lokasi Pengambilan Data Terumbu Karang.....	58
Gambar 9. Peta Survei Lamun.....	59
Gambar 10. Lokasi Monitoring Pendaratan Hiu dan Pari Apendiks CITES di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar TA. 2024	78
Gambar 11. Lokasi Monitoring Pendaratan Hiu dan Pari Apendiks CITES di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar TA. 2024	81
Gambar 12. Lokasi Monitoring Hiu Paus di Situbondo	81
Gambar 13. Peta Sebaran Pelau Usaha ALSE	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2024.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2024.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut tanggal 6 September 2021. Secara khusus UPT mengawal UU No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan beserta turunannya dan UU No. 27 tahun 2007 Jo UU No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta turunannya. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;

- 5) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

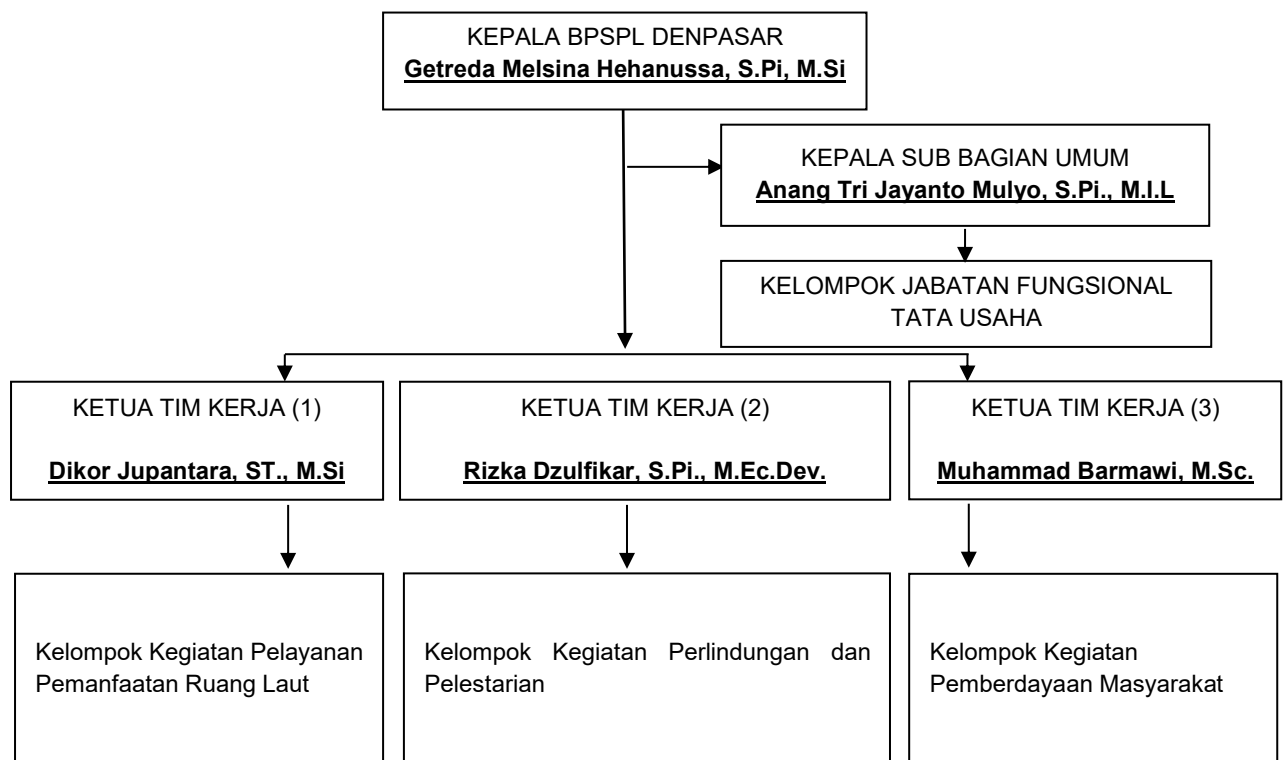
Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Denpasar secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- 2) Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- 3) Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional.
- 4) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi DJPKRL di daerah, termasuk kerja sama regional seperti *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF);

- 5) Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PKRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- 6) Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- 7) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.4 Organisasi

Struktur Organisasi BPSPL Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN/KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN/KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar

Dalam struktur organisasi BPSPL Denpasar, terdapat 4 bagian utama, yaitu:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BPSPL.
- 2) Ketua Tim Kerja (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut.
- 3) Ketua Tim Kerja (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Jenis Ikan, Kawasan Konservasi, Kemitraan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- 4) Ketua Tim Kerja (3) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, KOMPAK dan Gerakan Bersih Pantai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPSPL Denpasar dibantu 3 Satuan Kerja (Satker) yang mana pembentukanya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Satker Surabaya, Satker Mataram dan Satker Kupang.

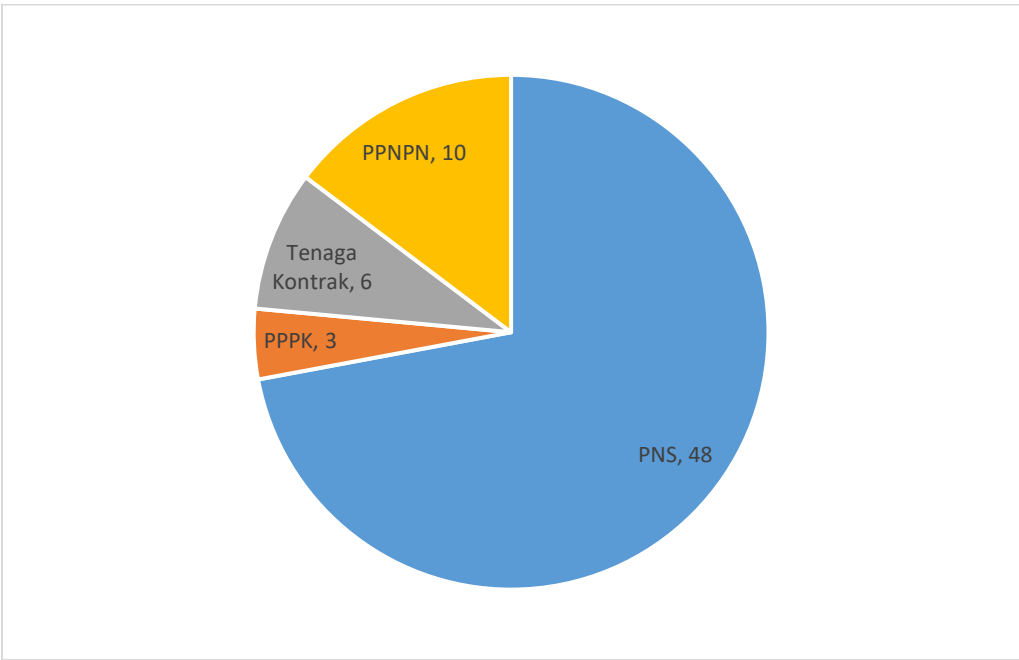
Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja

No	Nama Satker	Koordinator	Wilayah Kerja
1.	Satker Surabaya	Suwardi, S.T., M.Si	Provinsi Jatim
2.	Satker Mataram	Muhammad Barmawi, M.Sc	Provinsi NTB
3.	Satker Kupang	Sri Pratiwi Saraswati Dewi, S.Pi	Provinsi NTT
4.	Pos Pelayanan Banyuwangi	Dewi Retnoningrum, S.Pi	Provinsi Jatim

1.5 Kepegawaian

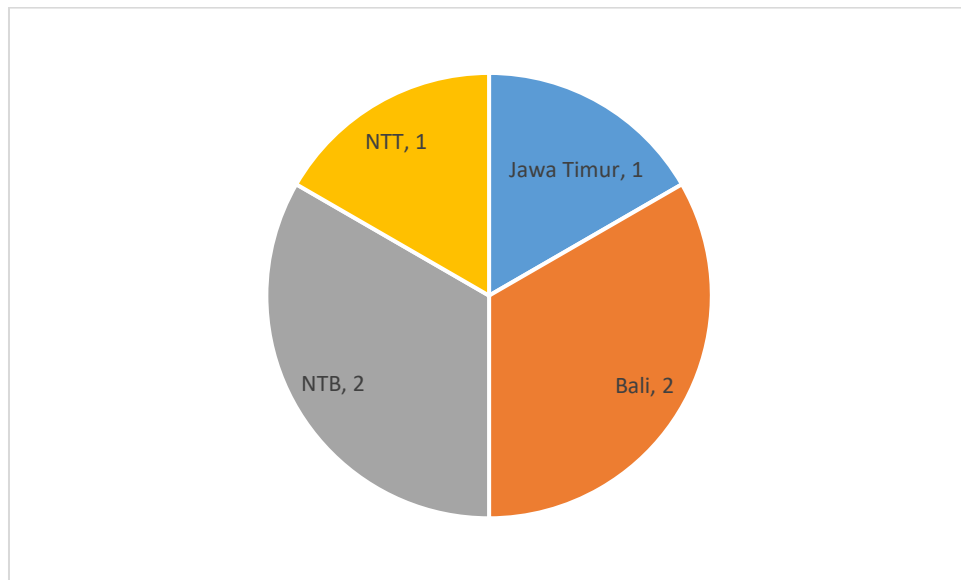
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Kontrak pada tahun 2024 sebanyak 67 orang terdiri dari 48 PNS, 3 PPPK, 6 Tenaga Kontrak, dan 10 PPNPN. Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2024



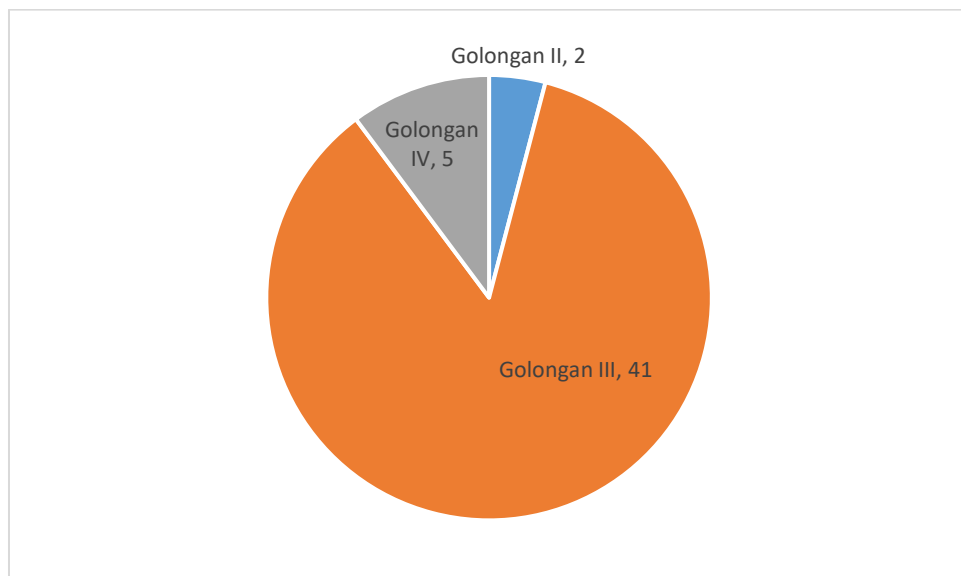
Adapun perincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 3 orang yang kesemuanya berada di Wilker Bali. Sedangkan perincian tenaga kontrak kesemuanya berjumlah 6 orang yang tersebar di Wilker Jawa Timur 1 orang, Wilker NTB 2 orang, Wilker NTT 1 orang dan Wilker Bali 2 orang. Secara rinci ditampilkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2. Perincian Tenaga Kontrak BPSPL Denpasar TA 2024



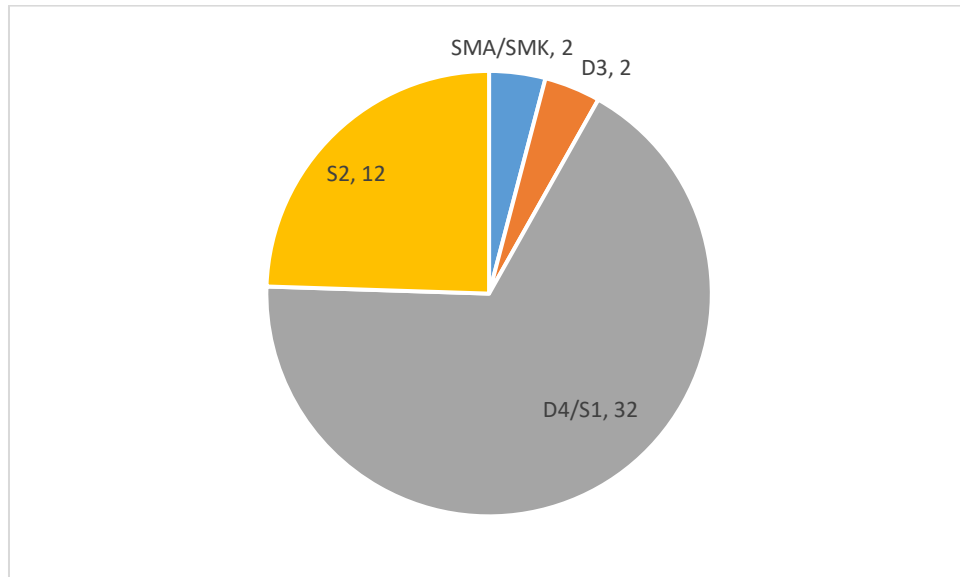
Sedangkan komposisi PNS berdasarkan golongan dan ruang ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 2024



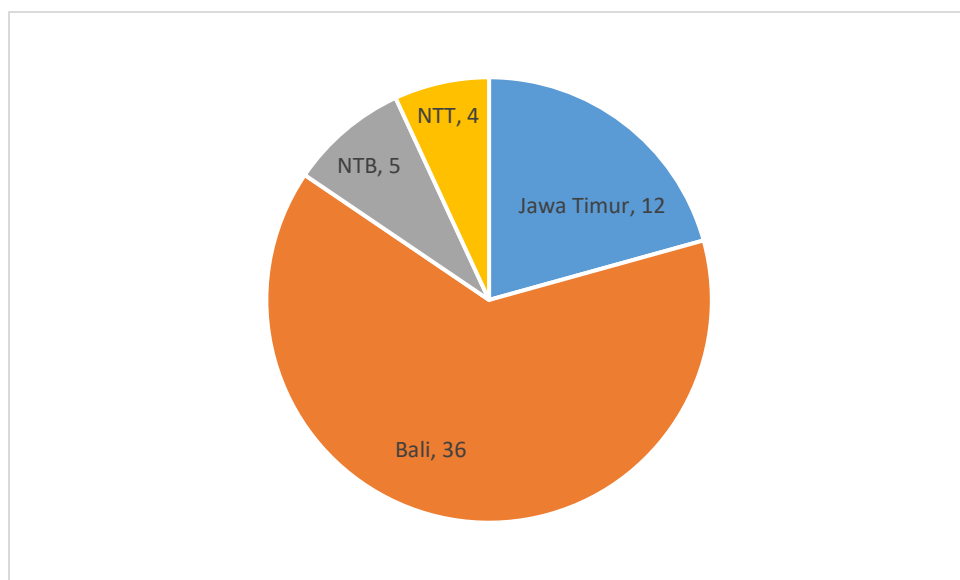
Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Denpasar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Denpasar. Untuk komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik 4 sebagai berikut.

Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2024



Selain tingkat pendidikan, penempatan SDM merupakan faktor yang penting dalam mencapai sasaran strategis BPSPL Denpasar yang telah ditetapkan, mengingat BPSPL Denpasar memiliki 3 kantor satker di Surabaya, Mataram dan Kupang. Berikut distribusi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak BPSPL Denpasar.

Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2024



1.6 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

A. Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “*services*” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI

2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507 Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove kritis dan non kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha)
1	Sulawesi	862.627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		2,517,858

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	PROVINSI	Kritis	Non Kritis
		LUAS (HA)	LUAS HA
1	JAWA TIMUR	6166.809	1340.974
2	BALI	126.193	32.16374
3	NTB	3526.509	3322.79
4	NTT	1859.784	4440.741

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Wilayah Perairan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara selain memiliki potensi sumber daya ikan baik perikanan budidaya maupun tangkap, juga memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

No.	Provinsi	Potensi Perikanan	
		Budidaya (Ha)	Tangkap (ton/tahun)
1	Bali	12.679.041	95.014
2	Jawa Timur	856.487.585	481.499
3	NTB	392.344.829	220.732
4	NTT	92.773.720	123.652

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar juga terdapat beranekaragam biota laut dilindungi yang dapat dilakukan pendataan dan monitoring. Biota tersebut dapat ditemukan di beberapa lokasi antara lain:

- Jawa Timur: Hiu Paus (Probolinggo), Hiu dan Pari Appendiks (Muncar-Banyuwangi, Brondong-Lamongan, Prigi-Trenggalek), Penyu (Banyuwangi, Trenggalek), Terumbu Karang (Banyuwangi, Kangean)
- Bali: Penyu (Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng), Hiu Appendiks (Benoa, Karangasem), Lumba-lumba (Lovina, TNBB), Terumbu Karang (Buleleng, Denpasar, Badung, Nusa Penida), Pari Manta (Nusa Penida-Klungkung)
- NTB: Penyu (Mataram, Kab. Sumbawa), Hiu Pari Appendiks (Tj. Luar, Sumbawa), Terumbu Karang (Lombok Utara, Sumbawa), Hiu Paus (Teluk Saleh-Sumbawa)
- NTT: Dugong (Alor), Lumba-lumba (Alor), Penyu (Lembata, Pulau Solor - Flores Timur), Terumbu Karang (Alor, Sikka, Ende), Teripang (Rote, Riung), Paus (Lembata), Pari Manta (Labuan Bajo), Hiu Pari Appendiks (Namosain-Kupang, Papela-Rote)

BPSPL Denpasar juga melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan KOMPAK berupa alat selam. Selain itu, BPSPL Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di wilayah kerja.

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Benoa	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020
17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki 12 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian:

- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
- Provinsi Bali: Pulau Nusa Penida
- Provinsi Jawa Timur: Pulau Nusabarong (Pulau Barong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

B. Permasalahan

BPSPL Denpasar memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kendala ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dokumen pendukung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap KKPD yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan KKPD. Selain itu adanya permasalahan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan yang melebihi daya dukung, dan pencemaran. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Zonasi
2. Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Diperlukan juga perizinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
3. Pemanfaatan jenis ikan khususnya Hiu dan Pari masih tinggi dan merupakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wilayah kerja BPSPL Denpasar merupakan pintu ekspor Hiu dan Pari dengan jumlah dokumen sebanyak 2.412 dokumen sejak tahun 2017 – 2019 baik domestik maupun ekspor. Dalam hal ini BPSPL Denpasar terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi terkait pemanfaatan jenis ikan. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur PNBP.
4. Belum adanya keseragaman data series keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar. Perlu adanya metode dan standard yang dibuat untuk pendataan.
5. Permasalahan terkait terumbu karang yaitu dijumpainya kelompok kapal penangkapan ikan yang melabuhkan jangkarnya di sekitar terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan terjadinya kasus penyakit pada terumbu karang. Perlu dilakukan monitoring dan sosialisasi secara berkala untuk menanggulangi dan mencegah semakin banyaknya kerusakan karang.
6. Aktivitas nelayan yang menambatkan kapal di sekitar padang lamun menyebabkan lamun dapat tergerus lunas kapal, selain itu ancaman tumpahan minyak hasil buangan kapal serta banyaknya suplai sedimen atau lumpur yang berasal dari daratan atau sungai yang

bermuara ke laut yang dapat menyebabkan penempelan pada lamun yang dikhawatirkan mempengaruhi proses fotosintesis dimana dampaknya pada tingkat produktivitas primer yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme.

7. Aktivitas *destructive fishing* yang masih terjadi di beberapa perairan di Wilayah kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.
8. Sebaran potensi, dan kelompok masyarakat pengelola jasa kelautan belum teridentifikasi sepenuhnya. Selain itu, pendampingan terhadap keberlanjutan bantuan pemanfaatan jasa kelautan masih belum optimal.
9. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
10. Terdapat beban kerja yang sangat tinggi dan permasalahan yang kompleks terkait pengelolaan ruang laut di Jawa Timur. Perlunya penataan organisasi dengan pembentukan UPT di Jawa Timur.

1.7 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan menginformasikan **Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2024**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) pada Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif,

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2024.

2. Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Adapun Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025, dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) menuangkan visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam visi misi Ditjen PKRL. Kemudian BPSPL Denpasar di bawah Ditjen PKRL menyusun pula visi misi yang sinergis untuk mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan dapat

direviu sesuai aturan yang berlaku. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Sebagai tindak lanjut dari visi dan arahan Presiden, maka disusun Renstra KKP 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020. Adapun visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden meliputi (1) “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”; (2) “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”; (3) “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan (4) “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Untuk mendukung Renstra KKP 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyusun Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka visi Ditjen PKRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang

Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya visi KKP". Adapun misi DJPRL meliputi (1) Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) Peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkungan DPKRL dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi DJPKRL. Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PKRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen PKRL 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - a. Sasaran "Kesejahteraan petambak garam meningkat"
 - b. Sasaran "Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil"
 - c. Sasaran "Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil"
 - d. Sasaran "Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat"
 - e. Sasaran "Terkelolanya Kawasan wisata bahari"
 - f. Sasaran "Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisioal, dan masyarakat local di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dIKatkan kelembagaannya"
 - g. Sasaran program "Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat"
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sasaran "Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan"
 - b. Sasaran "Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan"
 - c. Sasaran "Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali"
 - d. Sasaran "Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat".
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Sasaran "Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL".

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPKRL, BPSPL Denpasar memiliki tugas untuk mendukung sasaran strategis DJPKRL. Visi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah “Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar menuju terwujudnya Visi Ditjen PKRL“, sedangkan penjabaran misi dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah: (1) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (2) Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (3) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; (4) Perencanaan Ruang Laut di Wilayah BPSPL Denpasar; (5) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan di lingkup BPSPL Denpasar.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan pengelolaan ruang laut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- 4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya hayati, non hayati dan buatan;
- 5) Melestarikan kawasan konservasi dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman haya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, maka BPSPL Denpasar telah menyusun Program beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja BPSPL Denpasar 2020 – 2024 dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Denpasar 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Ha)	6.379,27	20.767,11	20.767,11	20.767,11	20.767,11
2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	5	5	5	5
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	6	6	6	6
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	1	4	4	4	4
		5	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1	1	1	1	1
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	10	10	10	10	10
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-	10	10	10	10	10

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		8	0	0	0	1	1
6	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja Denpasar	9	1	0	1	1	1
7	Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar	10	0	0	0	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN							
8	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	11	0	0	1	1	1
9	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Denpasar	12	4	0	1	1	1
10	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	13	0	0	1	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (dokumen)					
11	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Denpasar	14	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1
12	Meningkatnya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	15	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja BPSPL Denpasar (lokasi)	0	0	0	1	1
13	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar	16	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (pulau)	0	0	0	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
14	Tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Denpasar	17	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	0	72,5	72,5	72,5	72,5
		18	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (indeks)	72	73	74	75	76
		19	Nilai WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	72	76	76	78	78
		20	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Denpasar (%)	90	91	91	92	92
		21	Persentase unit kerja BPSPL Denpasar yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		22	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai)	88	89	89	90	90

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		24 Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	85	86	87	88	89
		25 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Denpasar (%)	100	100	100	100	100

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan BPSPL Denpasar 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemik global covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan dinamika kebijakan lainnya yang dapat muncul atau berubah pada kurun waktu 2020-2024.

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL), BPSPL Denpasar menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Denpasar berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, perjanjian kinerja BPSPL Denpasar mengalami penyesuaian sebanyak satu kali. Perjanjian Kinerja awal disahkan pada tanggal 25 Januari 2024, kemudian perubahannya disahkan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang dilakukan karena pergantian rincian indikator kinerja yaitu IKU 7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok) dengan target 1 kelompok menjadi Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi

Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang) dengan target 25 orang. Perubahan tersebut dikarenakan perpindahan kode klasifikasi rincian output dari kode REA (Konservasi kawasan – Rehabilitasi ekosistem) menjadi SCC (pelatihan bidang pertanian perikanan). IK 13 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 86 menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) dengan target 71. Perubahan dikarenakan perubahan rumus perhitungan Nilai Kinerja Anggaran menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Saat ini pada tahun 2024 terdapat sebelas (11) sasaran kegiatan dan dua puluh dua (22) indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Denpasar.

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp16.435.987.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp14.510.987.000,- dan PNPB Rp1.925.000.000,- dari pagu tersebut pada Triwulan I terdapat dana blokir dengan kode 2 (alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sejumlah Rp200.000.000,- yang berasal dari jenis belanja 52 (belanja barang) dan Rp.90.170.000 yang berasal dari belanja 53 (belanja modal). Pada Triwulan II telah dilakukan revisi DIPA buka blokir sehingga total dana yang dapat digunakan sebesar Rp16.435.987.000,-.

BPSPL Denpasar mendapatkan tambahan pagu dari sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada Triwulan III sebesar Rp.1.660.000.000,-. Jumlah pagu BPSPL Denpasar tahun 2024 sebesar Rp.18.095.987.000. Pada triwulan IV, dengan adanya kebijakan pemerintah melalui S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga, dilakukan revisi DIPA untuk blokir dana dengan kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) sebesar Rp.265.391.000,-. Total realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 (Per 31 Desember 2024) sesuai data omspan sebesar Rp17.783.830.375,- (98,27%).

Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNB BPSPL Denpasar	1.	Nilai PNB BPSPL Denpasar (Rp.000)	950.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Orang)	160
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Kerja BPSPL Denpasar		Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	
		7.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencapaian Baru (Orang)	25
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10.	Pemanfaatan air laut selain energi yang Diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka	11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	penanggulangan pencemaran		kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	71
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah	80

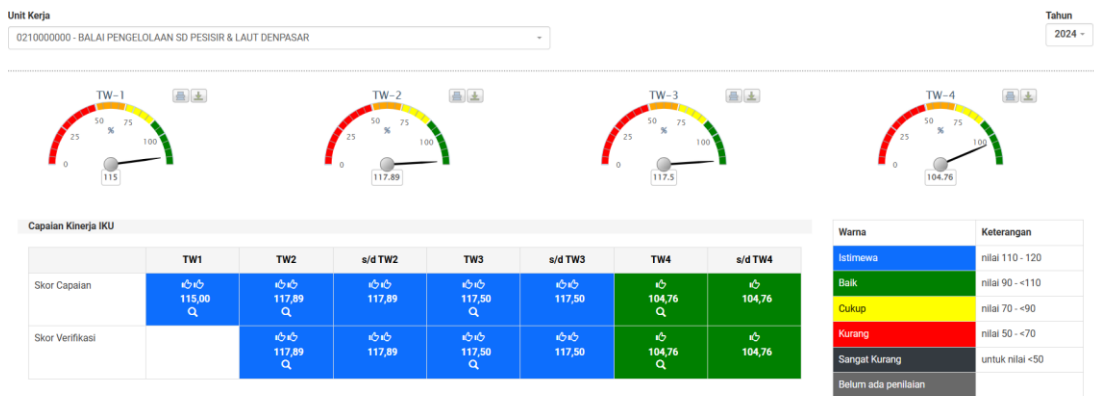
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
			dilengkapi dan disampaikan (%)	
		20.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	80
		22.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BPSPL Denpasar terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2024 Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM diperoleh nilai 104,76 (baik).



Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar

Tabel 8. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET	Tahun 2024		
				TARGET	REALISASI	%KINERJAKU
IKU 1	Meningkatnya Nilai PNPB BPSPL Denpasar (Rp. 000)	Tahunan	950.000	950.000	3.035.051.977	120
IKU 2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	Tahunan	160	160	160	100
IKU 3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahunan	3	3	3	100
IKU 4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	Tahunan	2	2	2	100
IKU 5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	Tahunan	1	1	1	100
IKU 6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	Tahunan	3	3	3	100
IKU 7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	Tahunan	25	25	25	100
IKU 8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan Penyadartahuan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penganganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahunan	6	6	6	100
IKU 9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahunan	5	5	6	120
IKU 10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL	Tahunan	1	1	1	100

NO	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET	Tahun 2024		
				TARGET	REALISASI	%KINERJAKU
	Denpasar (Dokumen)					
IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	Tahunan	2	2	2	100
IK 12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	93,76	93,76	99,47	106
IK 13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	71	71	96,42	120
IK 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	75	75	87,57	117
IK 15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	88	88	91,36	104
IK 16	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahunan	81	81	85,55	106
IK 17	Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	Triwulan	4	4	4	100
IK 18	Presentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	Tahunan	94	94	133,33	120
IK 19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Tahunan	80	80	100	120
IK 20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahunan	100	100	100	100
IK 21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahunan	80	80	97,50	120
IK 22	Nilai Pengawasan Internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	Tahunan	70	70	98,80	120

IKU 1. Meningkatnya Nilai PNBП BPSPL Denpasar (Rp .000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Denpasar adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pengelolaan ruang laut meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, pengelolaan BMN, dan PNBП lainnya.

Teknik menghitung PNBП BPSPL Denpasar dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{PNBP}_{\text{BPSPL Denpasar}} = \text{SAJI DN} + \text{Rekomendasi DN} + \text{Rekomendasi LN} + \text{Denda} + \text{Pengelolaan BMN} + \text{PNBP lainnya}$$

Dimana:

Saji DN = Pungutan atas dokumen Saji DN 1) + pungutan perdagangan + pungutan pengambilan 2)

Surat Rekomendasi = pungutan atas dokumen rekomendasi + pungutan perdagangan

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut

keterangan :

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi penghitungan pungutan :

Pungutan pengambilan = jumlah individu x Tarif PNBП x harga patokan jenis ikan

Pungutan perdagangan = volume x Tarif PNBП x harga patokan jenis ikan

Denda = Tarif PNBП x jumlah produk yang tidak sesuai dengan permohonan

Pengelolaan BMN = PNBП dari penggunaan rumah dinas dan/atau hasil penjualan/lelang BMN

PNBP lainnya = PNBП dari TGR dan TAYL

Tabel 9. Capaian IKU 1 BPSPL Denpasar

SK 1	Meningkatnya Nilai PNBП BPSPL Denpasar							
IKU 1	Nilai PNBП BPSPL Denpasar (Rp .000)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
3.037.033,914	950.000	3.035.051.977	319 atau 120 (kinerjaku)	-	950.000	319	950.000	319

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, target IKU tercapai dan melebihi target dari Rp950.000.000,- tercapai Rp3.035.051.977,- (319% dari target atau 120% pada aplikasi Kinerjaku). Capaian tersebut berasal dari beberapa akun antara lain: pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan; pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya; penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu; penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Perolehan PNBP terbesar yaitu dari pelayanan perizinan peredaran jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks serta *look alike species* berupa penerbitan dokumen angkut: Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) dan Rekomendasi Jenis Ikan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Adapun rincian total perolehan PNBP BPSPL Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut; pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp6.390.720,-; pendapatan perizinan lainnya Rp1.222.695.000,-; pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya Rp1.798.911.256,-; penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Rp6.099.758,-; penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu Rp955.243,-. Dalam waktu setahun perolehan PNBP BPSPL Denpasar fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan jumlah permohonan setiap bulan dan setiap wilayah kerja berbeda beda sesuai kebutuhan pengiriman dokumen jenis angkut yang dimohonkan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama sama melebihi target. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023, perolehan PNBP tahun 2024 lebih sedikit dengan selisih Rp1.981.937,-. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan pengguna layanan dari permohonan pelayanan yang masuk mengalami penurunan. Selain itu adanya penambahan listing jenis ikan Apendiks juga memperngaruhi jumlah permohonan yang masuk dikarenakan pengusaha harus mengurus dokumen dasar yaitu Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2021 Rp732.268.882,- dan tahun 2022 Rp2.593.347.144,- capaian tahun 2024 merupakan capaian tertinggi kedua setelah tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan, target IKU tercapai melebihi target dari Rp950.000.000,- tercapai Rp3.035.051.977,- (319%).

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara terus menerus telah dilakukan penarikan PNBP dan penginputan nilai PNBP yang diperoleh sehingga dapat mencapai atau melebihi target pada akhir tahun.

b. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dan anggaran yang dilakukan adalah dengan menugaskan pegawai di wilayah kerja untuk melakukan input PNBP.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah melakukan penginputan PNBP melalui aplikasi E-SAJI. Sejak tanggal 18 September 2021 BPSPL Denpasar telah melakukan penarikan PNBP terhadap produk pemanfaatan jenis ikan. Adapun total penarikan PNBP yang telah dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar di seluruh wilker selama tahun 2024 adalah Rp3.035.051.977,- dari target Rp950.000.000,- (319%)

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 1 adalah Melanjutkan kegiatan penarikan PNBP terhadap produk pemanfaatan jenis ikan pada bulan berikutnya.

IKU 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)

Gerakan Cinta Laut merupakan suatu gerakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat secara umum untuk bersama sama menjaga laut dan diharapkan dapat memulihkan ekonomi nelayan yang tidak melaut sehingga tidak terjadi ketimpangan atau beralih profesi nelayan ke profesi lainnya.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.

Teknik Menghitung:

$$TK_{BPSPL \text{ Denpasar}} = TK_{Lokasi \ 1} + TK_{Lokasi \ 2}$$

Keterangan:

$$TK_{BPSPL \text{ Denpasar}} = \text{Jumlah tenaga kerja BPSPL Denpasar}$$

$$TK_{Lokasi \ 1, \ 2} = \text{Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi yang menjadi target di tahun 2024}$$

Tabel 10. *Capaian IKU 2 BPSPL Denpasar*

SK 2	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	160	160	100	100	160	100	160	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja pada tahun 2024 telah tercapai dengan jumlah 160 orang dari target 160 orang (100%). Capaian ini tercapai pada akhir tahun dan dilaksanakan selama tahun berjalan. Tenaga kerja yang terlibat terdiri dari 80 orang tenaga kerja di wilayah Kab. Situbondo dan 80 orang tenaga kerja di wilayah Kota Denpasar. Tenaga kerja yang terlibat diberikan sosialisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan penutupan sebagai rangkaian kegiatan dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat target pada tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan matrik kinerja pendanaan telah tercapai 100% (target 160 orang tercapai 160 orang).

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah dilakukan survey awal, penetapan lokasi, pengadaan perlengkapan bersih laut untuk nelayan, sosialisasi, bimbingan teknis, evaluasi, penutup, dan puncak acara pelaksanaan Gerakan Bulan Cinta Laut.

b. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan koordinasi antar penanggungjawab kegiatan dan stekholder terkait.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga Triwulan IV tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Rapat koordinasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Tahun 2024 di Bandung tanggal 23-24 Januari 2024
2. Survei awal calon lokasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Pasuruan, Situbondo, Denpasar, dan Kab. Lombok Timur
3. Penetapan lokasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar yaitu di Denpasar dan Situbondo
4. Pengadaan perlengkapan bersih laut yang ditujukan untuk nelayan sejumlah 160 yang terlibat dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut berupa baju kaos, pengait sampah, keranjang sampah, karung atau kampil, dan gerobak untuk membantu mobilitas pengangkutan sampah.
5. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Pelaksanaan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 11. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Gerakan nasional Bulan Cinta Laut

Kegiatan	Lokasi	Tanggal
Sosialisasi	Denpasar	29 April 2024
Sosialisasi	Situbondo	2 Mei 2024
Bimbingan Teknis I	Denpasar	14 Mei 2024
Bimbingan Teknis I	Situbondo	13 Mei 2024

Kegiatan	Lokasi	Tanggal
Bimbingan Teknis II	Denpasar	11 Juni 2024
Bimbingan Teknis II	Situbondo	30 Mei 2024
Bimbingan Teknis III	Denpasar	19 Juni 2024
Bimbingan Teknis III	Situbondo	11 Juni 2024
Evaluasi dan Penutupan	Denpasar	12 Juli 2024
Evaluasi dan Penutupan	Situbondo	10 Juli 2024

6. BPSPL Denpasar menghadiri puncak apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Tahun 2024 bertempat di Anjungan Pantai Lokasari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Awarding Bulan Cinta Laut dengan 6 kategori yaitu Kategori Nelayan Terinspirasi, Kategori Gubernur/Walikota Penggerak Pengelolaan Sampah Laut, Kategori Bank Sampah/Offtaker Penggerak Pengelolaan Sampah Laut, Kategori Penyuluh Penggerak Pengelolaan Sampah Laut, Kategori Inovator Bulan Cinta Laut dan Tokoh Peduli masyarakat pesisir. BPSPL Denpasar berhasil menerima Awarding Bulan Cinta Laut pada kategori Nelayan Terinspirasi yaitu Bapak Supiyanto KUB Bintang Laut Bahari Kabupaten Situbondo dan Bapak I Wayan Kona Antara KUB Segara Guna Batu Lumbang Kota Denpasar. Penyerahan Awarding BCL kepada masing masing penerima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 12. Kegiatan Pendukung IKU 2

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
2	Survei awal calon lokasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	 Mar 5, 2024 09:39:24 7.61075°S 112.82765°E Raci Kecamatan Bangil Pasuruan Jawa Timur  Kecamatan Panarukan, Jawa Timur, Indonesia 8W9Q+CG4, Klemasan, Kec. Panarukan, Kabupaten Shubondo, Jawa Timur 68351, Indonesia Lat -7.696462° Long 113.93961° 13/03/24 12:29 PM GMT +07:00   28 Mar 2024 12:25:20 8.7780607°S 116.5127328°E Tanggulangur Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
3.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	 8.7071411°S 115.7831726°E 58° NE 6.Br. Abianbase Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali Monday, April 29, 2024 10:07:34

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		    

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		 
4.	Evaluasi dan Penutupan	 

No.	Kegiatan	Dokumentasi
5.	Puncak Acara	

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tidak ada tindak lanjut pada triwulan berikutnya karena kegiatan pada tahun berjalan telah selesai.

IKU 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Terdapat tiga kegiatan pendukung untuk pemenuhan IKU 3 BPSPL Denpasar yaitu kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut, dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen sosialisasi, verifikasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 13. Capaian IKU 3 BPSPL Denpasar

SK 3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
3	3	3	100	-	3	100	3	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target IKU telah tercapai sesuai target yaitu tiga dokumen (100% dari target) yang terdiri dari dokumen kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut, dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut. Ketiga dokumen tersebut tercapai pada akhir tahun berjalan dan berlangsung sepanjang tahun 2024. Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut telah terlaksana di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk segera memohonkan izin pada aplikasi Online Single Submission (OSS). Verifikasi kesesuaian ruang laut dilaksanakan sebagai tindakan preventif dan pengendalian terhadap segala aktivitas pemanfaatan ruang laut yang sedang dimohonkan status izinnya.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terdapat target pada IKU 3 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan. Tahun 2022 target 1 dokumen tercapai 1 dokumen. Tahun 2023 terget 3 dokumen tercapai 3 dokumen. Tahun 2024 target 3 dokumen tercapai 3 dokumen sehingga selama 3tahun berturut turut target telah tercapai dengan baik.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan telah tercapai 100% dari target.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu dilaksanakan *coaching clinic*, bimbingan teknis kesesuaian kegiatan ruang laut, sosialisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sosialisasi pengendalian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfaatan ruang laut, dan verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut.

b. Solusi

Tidak perlu diberikan solusi karena kegiatan berjalan sesuai rencana dan tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan dinas terkait, NGO, tenaga ahli, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Sosialisasi pemanfaatan ruang laut

- Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut telah terlaksana di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk segera memohonkan izin pada aplikasi Online Single Submission (OSS). Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kesesuaian Zonasi Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Materi Teknis Integerasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi, Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut, Asistensi Tata Cara Permohonan Pada Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Asistensi Tata Cara Penyusunan Dokumen Proposal. Berikut adalah tabel Pelaksanaan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 14. Pelaksanaan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024

No.	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1.	20 Februari 2024	Kelurahan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo
2.	2-3 Mei 2024	Kelurahan Serangan, Kota Denpasar

No.	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
3.	7 Mei 2024	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara
4.	17 Juli 2024	Hotel Simfony Alor, Kabupaten Alor
5.	1 Agustus 2024	Hotel Jayakarta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat
6.	16 Oktober 2024	Kantor PPN Pengembangan di Pelabuhan Tanjung Benoa, Kota Denpasar
7.	23 Oktober 2024	Kabupaten Situbondo
8.	3 dan 18 Desember 2024	Desa Jungut Batu, Kabupaten Klungkung

- Sosialisasi Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Sosialisasi Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dilakukan untuk mendorong pelaku usaha melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan cara memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tercantum pada lembar empat izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi pengendalian terdiri dari Pedoman Teknis dan Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Kewajiban dan Sanksi Kepada Pemegang Izin KKPRL Berdasarkan Implementasi Permen KP 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Asistensi Pengisian Pelaporan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut melalui Aplikasi E-Sea. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kesesuaianab Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 15. Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun Anggaran 2024

No.	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1.	14 Mei 2024	Four Points by Sheraton, Surabaya
2.	5 Juli 2024	Hotel Kuta Paradiso, Bali
3.	22 Oktober 2024	PT PLN Nusantara Power UP Gresik dan PT Smelting
4.	23 Oktober 2024	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama
5.	24 Oktober 2024	PT Bumi Lamongan Sejati

- Sosialisasi tertulis perihal penerapan aplikasi e-Sea untuk pelaporan tahunan Pemegang Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada tanggal 5 September 2024 disampaikan kepada 354 pelaku usaha pemegang Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.

- Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar beserta instansi terkait dalam aspek Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja. Kegiatan dilakukan pada hari Selasa-Rabu, 5-6 Maret 2024 di Mertasari Meeting Room, Hotel Grand Palace, Sanur, Kota Denpasar. Kegiatan diikuti oleh 25 Instansi dengan jumlah peserta yang hadir sejumlah 42 orang peserta yang terdiri dari 19 orang peserta perempuan dan 23 orang peserta laki-laki.

- *Coaching clinic* Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

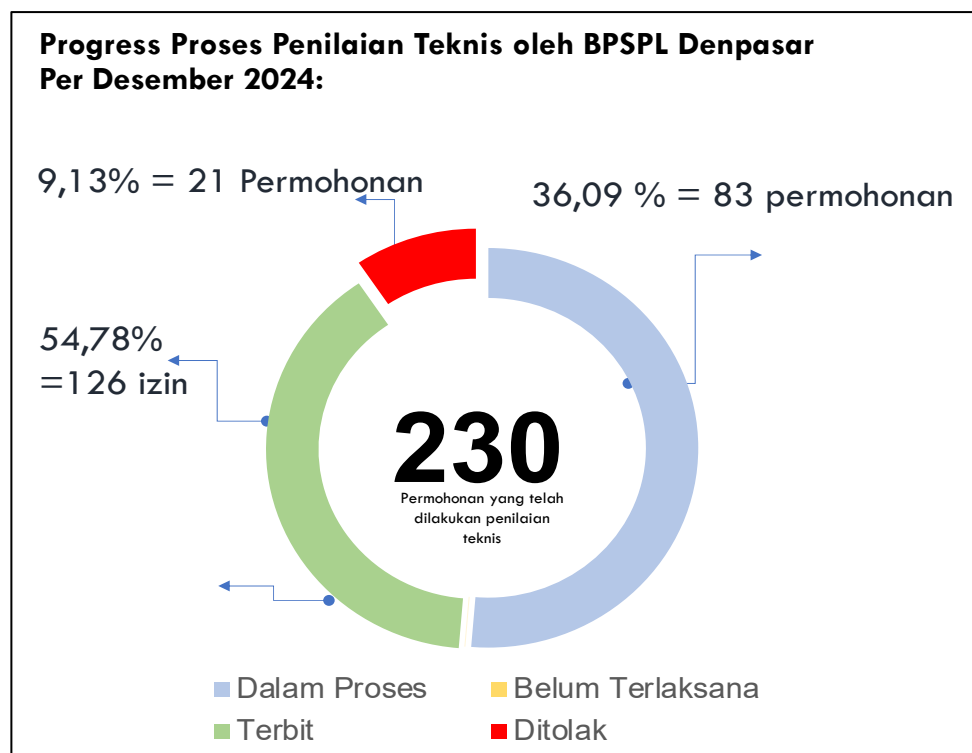
Coaching Clinic Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut merupakan Kegiatan yang diinisiasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar dalam mendorong pelaku usaha untuk memohonkan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan membantu pelaku usaha jika terjadi permasalahan dalam proses permohonan maupun proses penyusunan dokumen proposal. Kegiatan Coaching Clinic ini dilakukan setiap hari kerja di Kantor Balai Pengelolaan

Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar yang berada di 5 (lima) lokasi yaitu Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Mataram dan Kota Kupang. Selama Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan kegiatan Coaching Clinic sebanyak 52 (lima puluh dua) kali kepada pelaku usaha yang datang ke Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, pelaku usaha yang datang rata-rata menanyakan tata cara melakukan permohonan ke sistem Online Single Submission (OSS), tata cara penambahan KBLI, kesesuaian zonasi, penyusunan dokumen proposal dan permasalahan permohonan setelah didaftarkan pada sistem Online Single Submission (OSS).

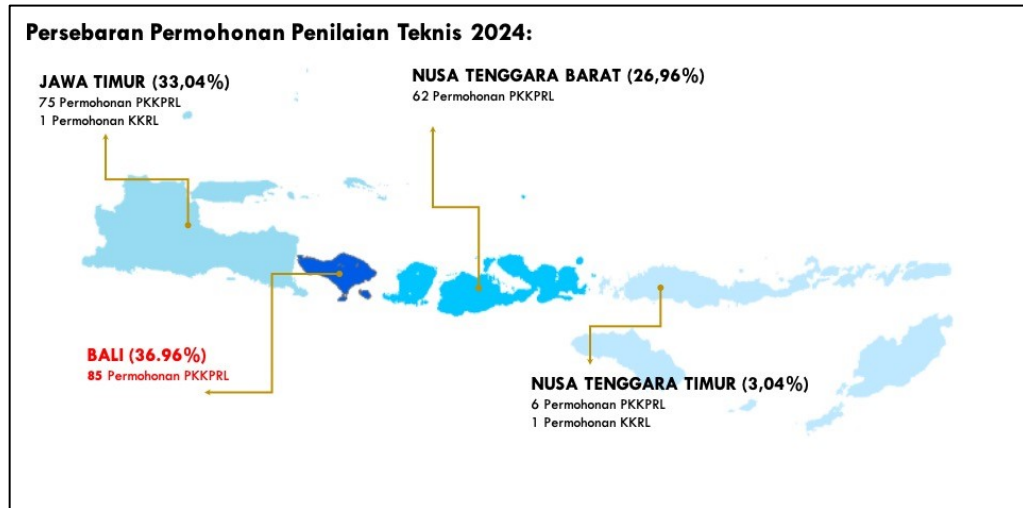
2. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Verifikasi kesesuaian ruang laut dilaksanakan sebagai tindakan preventif dan pengendalian terhadap segala aktivitas pemanfaatan ruang laut yang sedang dimohonkan status izinnya. Adapun selama tahun 2024 telah berhasil dilakukan penilaian sebanyak 230 permohonan pemanfaatan ruang laut. Progres proses penilaian teknis oleh BPSPL Denpasar adalah sebagai berikut.

Grafik 6. Progres Penilaian Teknis BPSPL Denpasar T.A. 2024



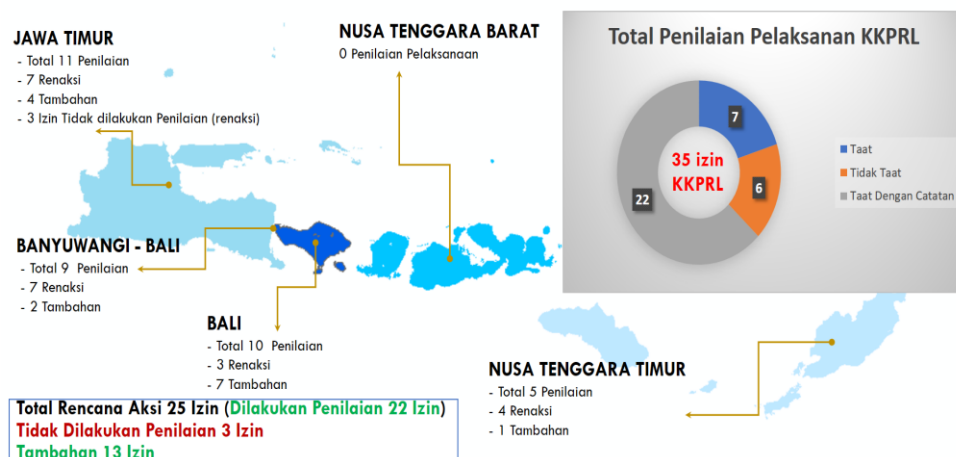
Telah terbit 126 izin dengan presentase 54,78% dari total permohonan yang masuk, 83 permohonan masih dalam proses, dan 21 permohonan ditolak. Namun semua telah terlaksana. Persebaran permohonan penilaian teknis 2024 berada di empat wilayah kerja BPSPL Denpasar yaitu Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Adapun persebaran permohonan penilaian teknis tersaji pada Gambar 3.



Gambar 3. Persebaran Permohonan Penilaian Teknis T.A. 2024

- Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kegiatan pelaksanaan penilaian KKPRL tercapai 35 izin. Sehingga dapat disampaikan bahwa kegiatan terselesaikan dengan baik. Rincian hasil kegiatan penilaian pelaksanaan KKPRL dapat dilihat pada Gambar 4.

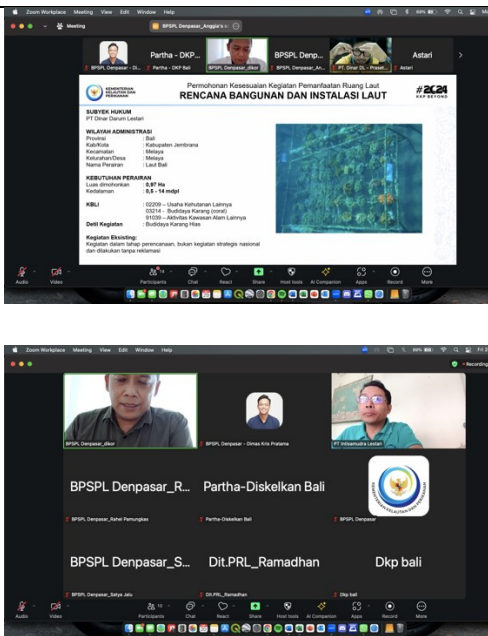
Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KKPRL BPSPL Denpasar Tahun 2024



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian KKPRL BPSPL Denpasar T.A. 2024

Tabel 16. Kegiatan Pendukung IKU 3

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut	 17 Jul 2024 16:38:50 -8°13'1.36848"S 124°31'31.01448"E Jalan Diponegoro Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur  17 Jul 2024 08:57:54 -8°13'1.18412"S 124°31'31.12248"E No.30 Jalan Diponegoro Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur  

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		
2.	Verifikasi pemanfaatan ruang laut	
3.	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	 

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 3 di tahun 2024 adalah :

- Melaksanakan Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan target kepada pelaku usaha di sektor rumput laut dan rumpon;
- Perlu adanya PIC kelengkapan dokumen penilaian KKPR.

IKU 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah provinsi yang didampingi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain yang sesuai dengan kondisi kawasan konservasi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi-nya.

Tabel 17. Capaian IKU 4 BPSPL Denpasar

SK 4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar							
IKU 4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	1	2	2	100	100	2	100	2

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target IKU telah tercapai 2 daerah dari target 2 daerah pada tahun 2024 (100%). Pendampingan fasilitasi pengusulan kawasan konservasi daerah yang diselesaikan pada tahun 2024 tercapai 2 daerah yaitu Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Bali Selatan dan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Belu. Pada dua daerah tersebut telah dilakukan persiapan pendampingan penetapan Kawasan Konservasi Daerah, survei lapangan KKD, *forum group discussion* KKD di wilayah kerja, dan pelaporan kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan 100% dari tahun 2023 dan tahun 2022. Pada tahun 2024 lebih tinggi karena target yang harus dilampaui juga lebih banyak (2 daerah) dari tahun 2023 (1 daerah) dan tahun 2022 (1 daerah). Pada tahun 2020 dan 2021 target tertuang dalam satuan luasan (246.074 Ha pada 2020 dan 20.767,11 Ha pada tahun 2021) sehingga capaian tidak dapat dibandingkan. Sedangkan dalam tiga tahun terakhir capaian kinerja tahun 2024 merupakan capaian terbanyak.

C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan telah tercapai 100%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu dilakukan persiapan pendampingan penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD), survei lapangan KKD, *forum group discussion* KKD di wilayah kerja, dan pelaporan kegiatan.

b. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ditemukan permasalahan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

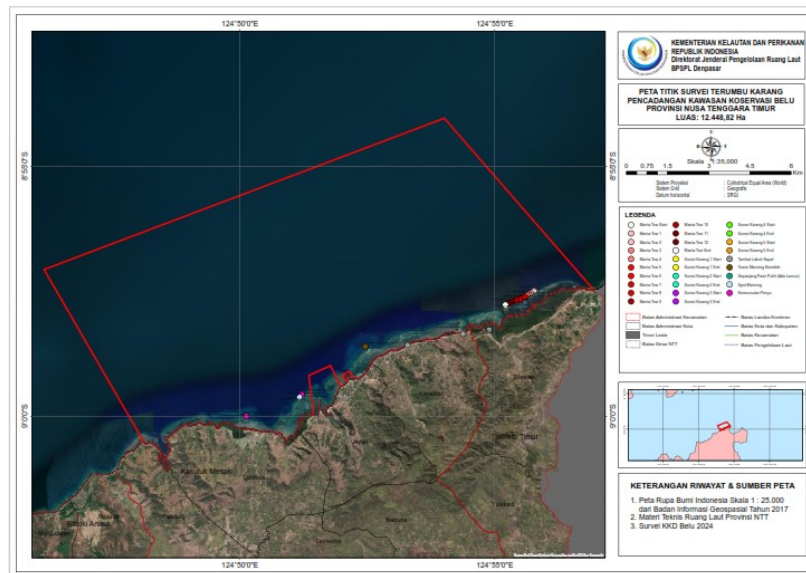
Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan dinas terkait, NGO, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

G. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga akhir tahun 2024, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Identifikasi awal secara sekunder dan koordinasi penetapan kawasan konservasi di wilayah KKD Bali Selatan
2. Identifikasi awal secara sekunder dan koordinasi usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah KKD Maubesi
3. Koordinasi awal survei ekosistem terumbu karang, rapat koordinasi teknis survei biofisik KKD Bali Selatan dengan *Coral Triangle Center* (CTC)

4. Survei Biofisik Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Konservasi Daerah Bali Selatan tanggal 3-4 Mei 2024
5. Survei awal persiapan survei biofisik ekosistem lamun tanggal 12 Juni 2024 di KKD Bali Selatan, survei biofisik ekosistem lamun KKD Bali Selatan pada 19-21 Juni 2024
6. Koordinasi dan survei awal kegiatan fasilitasi usulan penetapan Kawasan konservasi perairan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Hasil koordinasi disepakati bahwa fasilitasi usulan penetapan Kawasan konservasi perairan di Provinsi NTT yang semula pada KKD Maubesi menjadi KKD Batu Gede
7. Rapat dengan DKP NTT, Yayasan Konservasi Indonesia dan tenaga ahli terkait fasilitasi penetapan KKD Batu Gede secara online pada Bulan Juli 2024 dan offline pada tanggal 20 September 2024 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
8. Koordinasi dan persiapan Survei Pengambilan Data Kawasan Konservasi Daerah Batu Gede dengan Yayasan Konservasi Indonesia pada tanggal 31 Juli 2024 di Kantor Konservasi Indonesia Kantor
9. Survei Sosial Ekonomi KKD Bali Selatan tanggal 3 – 4 September 2024 di Sanur dan Serangan
10. Survei Biofisik, pemetaan partisipatif dan pemanfaatan ruang laut KKD Belu tanggal 26 September 2024 – 2 Oktober 2024
11. Survei sosial ekonomi KKD Belu Selatan tanggal 11-13 Oktober 2024
12. Penyampaian hasil survei KKD Belu kepada Tim Pokja KKD Belu dan Konservasi Indonesia tanggal 9 Desember 2024 di Kupang secara Online dan Offline.
 - Survei Terumbu Karang
 - . Pendataan dilaksanakan di 6 lokasi survei dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah kawasan konservasi Belu. Pendataan biofisik dilakukan di 5 lokasi dengan menggunakan metode photo transek, ketahanan karang dan kondisi perikanan. Satu lokasi survei di daerah Desa Silawan hanya dilakukan dengan menggunakan metode Manta tow karena mempertimbangkan keselamatan tim survei karena kondisi perairan yang terdapat buaya. Peta Lokasi titik survei tersaji pada Gambar 5.



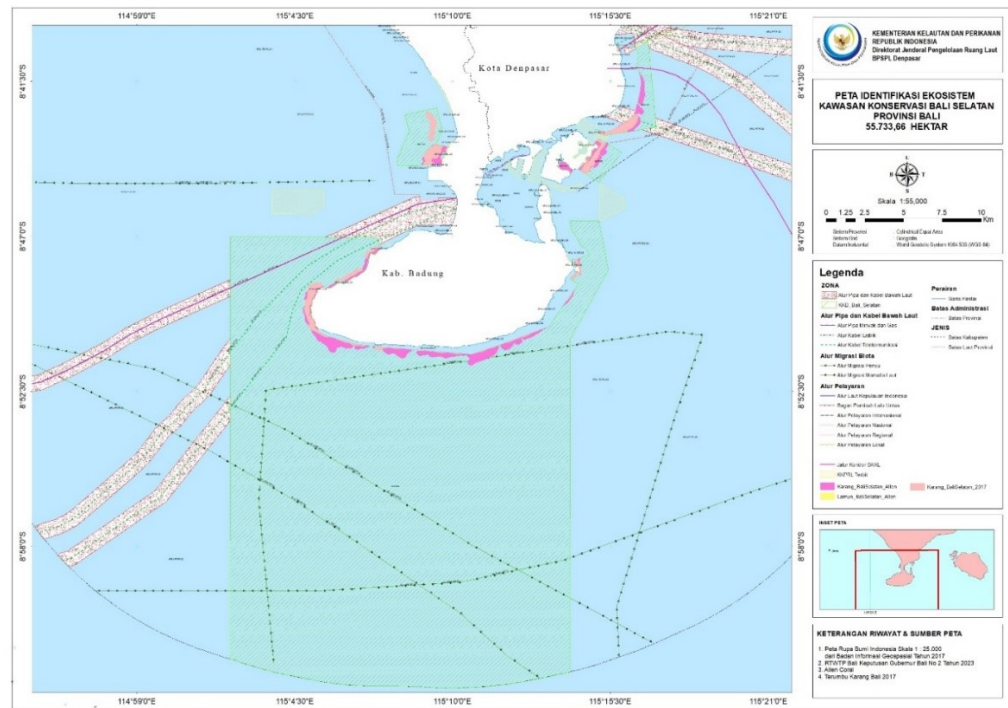
Gambar 5. Peta Lokasi Titik Survei (Melati/ BPSPL Denpasar, 2024)

- Survei Sosial Ekonomi

Dilakukan kegiatan survey sosial ekonomi yang dilaksanakan di 5 desa yaitu Desa Silawan di Kecamatan Tasifeto Timur; Desa Kenebibi, Desa Jenilu, Desa Dualaus dan Desa Fatukety di Kecamatan Kakuluk Mesak. Survey sosek dilakukan serentak di 5 desa tersebut dengan target responden di masing-masing desa sejumlah 30 orang.

13. Survei *Analytic Hirarchy Process* (AHP) KKD Bali Selatan pada tanggal 6 dan 17 Desember 2024 di Denpasar
14. Penyampaian hasil survei KKD Bali Selatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tanggal 20 Desember 2024 di Denpasar. Alokasi ruang Kawasan Konservasi masuk kedalam pengelolaan tata ruang laut sebuah provinsi yang beracuan kepada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Provinsi Bali telah memiliki dokumen RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2023 – 2043. Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Bali Selatan telah dicadangkan berdasarkan aturan tersebut dengan luasan area 55.733,66 Hektar. KKD Bali Selatan mencakup 2 kewilayahan yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

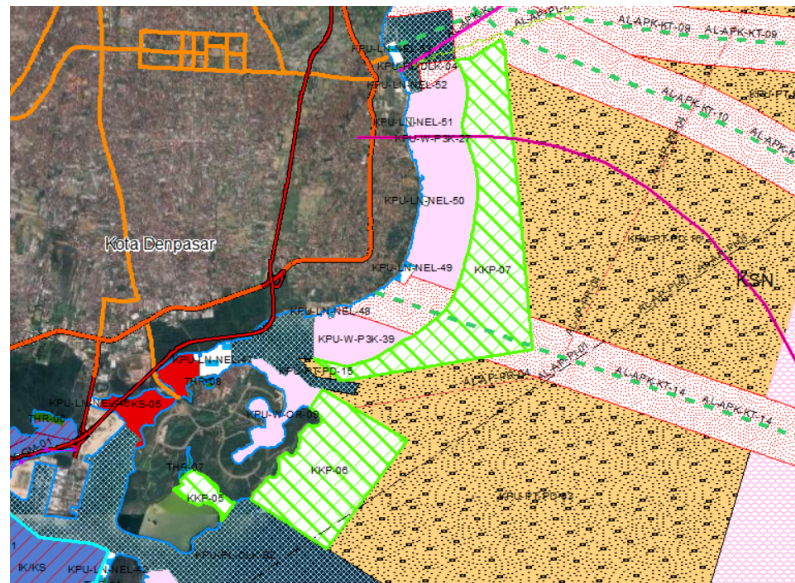
Area KKD Bali Selatan yang di Kabupaten Badung berada di sekitar area tanjung benoa, pantai selatan hingga area Uluwatu dan Pesisir dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai (Gambar 15). Sedangkan area kota Denpasar berada di pesisir pantai serangan dan sanur (± 1 kilometer dari garis pantai). Alokasi ruang KKD Bali Selatan tersaji pada Gambar berikut,



Gambar 6. Alokasi Ruang KKD Bali Selatan berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Bali

Alokasi ruang Kawasan Konservasi Daerah Bali Selatan wilayah Kota Denpasar ini berbatasan dengan beberapa alokasi ruang lainnya. Pada KKD Bali Selatan area sanur Batasansan dengan zona pariwisata, berhimpitan dengan Zona DLKR DLKP Pelabuhan Sanur dan dilalui area kabel bawah laut. Sedangkan pada area Serangan wilayah daratnya berbatasan dengan area Kura-Kura Bali (BTID) yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), berbatasan dengan zona pariwisata, taman hutan raya, zona Pelabuhan dan zona perikanan tangkap serta dilalui oleh alur pelayaran internasional (Gambar 7).

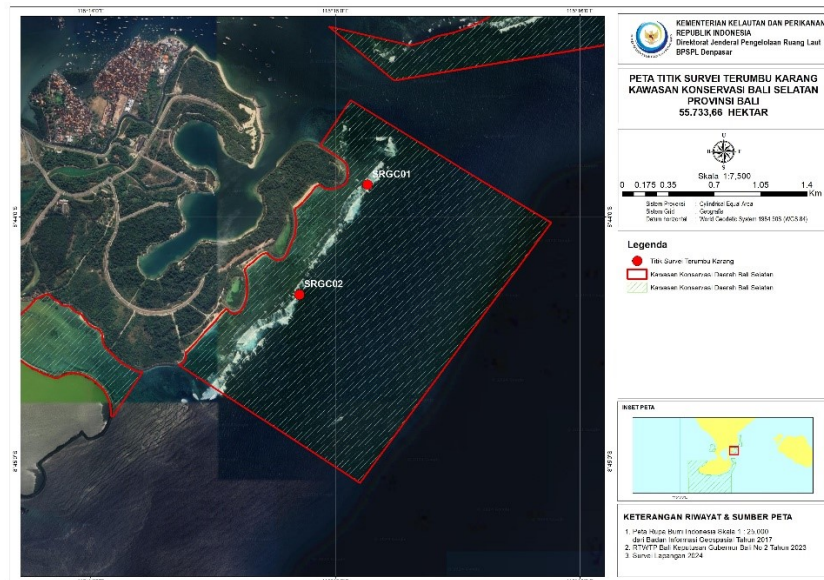
Jika dilihat dari alokasi ruang, KKD Bali Selatan area Denpasar sangat beririsan dengan alokasi ruang yang menjadi pergerakan sector ekonomi dan pariwisata, sehingga dalam pemanfaatan ruangnya harus memperhatikan kondisi eksisting yang ada. Batas Alokasi ruang KKD Bali Selatan wilayah Kota Denpasar tersaji pada Gambar 7.



Gambar 7. Batas Alokasi Ruang KKD Bali Selatan wilayah Kota Denpasar berdasarkan RTRW Provinsi Bali

- Survei Ekosistem Karang

Hasil pengamatan pada survei biofisik ekosistem terumbu karang di alokasi ruang kawasan konservasi Bali Selatan yaitu di wilayah perairan laut Sanur dan pantai Pulau Serangan, dialokasikan pengambilan data dilakukan di 2 lokasi pengamatan dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah kajian. Hasil survei di lokasi alokasi ruang kawasan konservasi perairan Sanur berdasarkan rencana tata ruang provinsi Bali menunjukkan hasil sebagaimana tersaji pada Gambar 8.



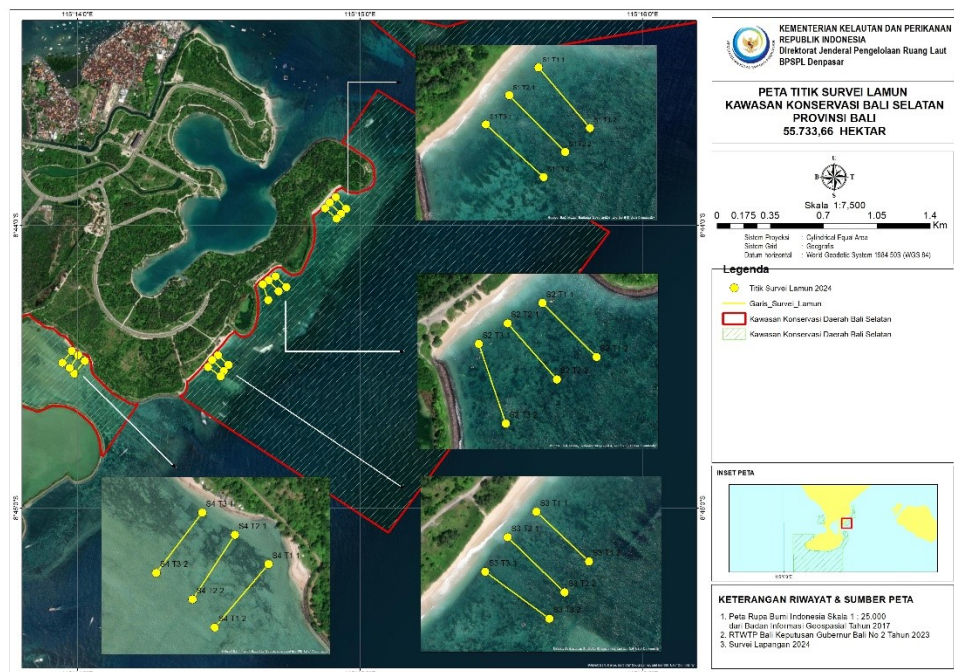
Gambar 8. Peta Lokasi Pengambilan Data Terumbu Karang

- a. Alokasi ruang kawasan konservasi perairan Sanur terdapat pada perairan yang cukup dalam yaitu lebih dari 30 meter pada wilayah sekitar lokasi Pantai Semawang, Pantai Karang sampai dengan lokasi Jeladi wilis dengan kondisi dasar perairan pasir berbatu.
 - b. Area terumbu karang di kedalaman 3-15 meter di sekitar perairan Sanur, tidak termasuk dalam alokasi ruang kawasan konservasi sehingga tim survei memutuskan tidak melakukan pendataan karena terdapat di luar alokasi ruang kawasan konservasi.
 - c. Survei yang dilakukan pada lokasi di Pantai Semawang sampai dengan Mertasari sesuai dengan alokasi ruang kawasan konservasi RTRW Provinsi Bali, memiliki kecerahan perairan yang sangat minim (visibility kurang dari 3 meter) dan gelombang laut yang sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan dilakukan penyelaman dan pendataan
- Survei Ekosistem Lamun
- Stasiun pengambilan data dilakukan pada pantai hasil pemekaran Pulau Serangan. Pasir berjenis pasir putih dari pecahan karang. Karakteristik stasiun, yaitu:
- Stasiun 1 adalah pantai pasir putih pecahan karang. Aktivitas manusia ditemui berupa kegiatan budidaya karang. Tidak terdapat bangunan pantai. Panjang pantai sekitar 260 meter. Pada sisi utara dan selatan terdapat penahan pantai (revetment).

Stasiun 2 adalah pantai pasir putih pecahan karang. Aktivitas manusia ditemui berupa kegiatan budidaya karang. Tidak terdapat bangunan pantai. Panjang pantai sekitar 208 meter. Pada sisi utara dan selatan terdapat penahan pantai (revetment).

Stasiun 3 adalah pantai pasir putih pecahan karang. Tidak ada aktivitas manusia ditemui. Tidak terdapat bangunan pantai. Panjang pantai sekitar 440 meter. Pada sisi utara dan selatan terdapat penahan pantai (revetment).

Stasiun 4 adalah pantai pasir berlumpur. Berada didalam laguna. Air surut terendah dapat mencapai ketinggian nol meter. Aktivitas manusia ditemui berupa kegiatan budidaya rumput laut. Tidak terdapat bangunan pantai. Terdapat penahan pantai (revetment) pada mulut laguna.



Gambar 9. Peta Survei Lamun

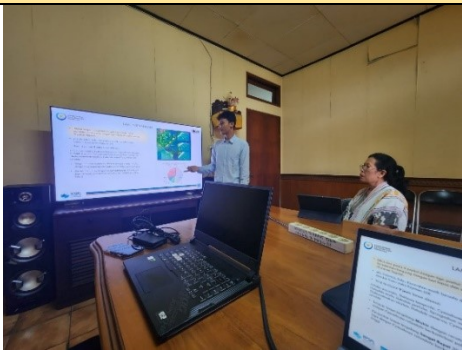
- Survei Sosial Ekonomi dan Pemetaan Partisipatif

Total masyarakat yang menjadi responden dalam survei sosial ekonomi dan budaya, yaitu sebanyak 61 orang. Responden berasal dari dua wilayah yaitu Wilayah Sanur sebanyak 37 orang dan 24 orang dan Wilayah Serangan. Seluruh responden adalah laki-laki yang beralamat di sekitar wilayah Sanur dan Serangan. Rentang umur responden terbanyak pada usia 51-60 tahun sebanyak 29 orang. Pendidikan terakhir responden terbanyak pada tingkat SMA sebanyak 27 orang. Sebanyak 57 responden telah tinggal di wilayah tersebut lebih dari 5 tahun, sedangkan empat orang responden baru tinggal 1 – 5 tahun.

Tabel 18. Kegiatan Pendukung IKU 2

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Rapat dengan instansi terkait terkait pelaksanaan survei	
2	Koordinasi dan persiapan survei	
3	Survei Sosial Ekonomi KKD Bali Selatan	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		
4	Survei Biofisik, pemetaan partisipatif dan pemanfaatan ruang laut KKD Belu	 
5	Survei Sosial Ekonomi KKD Batu Gede	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
6	Penyampaian Hasil Survei KKD Bali Selatan kepada DKP Provinsi Bali	 
7	Penyampaian Hasil Survei KKD Belu	 

H. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 4 adalah sebagai berikut:

- Tim KKP3K BPSPL Denpasar menyerahkan laporan survei KKD Bali Selatan ke DKP Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti penyusunan dokumen awal

- Penyusunan usulan zonasi penetapan KKD Belu kedepannya diharapkan menggunakan data materi teknis integrasi, dengan catatan adalah hasil integrasi RTRW Provinsi NTT harus sudah di sahkan oleh Gubernur NTT sehingga dapat menjadi dasar hukum yang legal dalam pengusulan penetapan KKD Belu ke Menteri Kelautan dan Perikanan

IKU 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)

Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja unit kerja. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki maksud tujuan terwujudnya kesepakatan atau komitmen bersama antar stekholder untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan draft kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja Eselon I.

Tabel 19. Capaian IKU 5 BPSPL Denpasar

SK 5	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar							
IKU 5	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	1	1	100	100	1	100	1	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target IKU telah tercapai yaitu satu kesepakatan bersama antara BPSPL Denpasar dan *Banyuwangi Sea Turtle Fondation* (BSTF). Dalam pelaksanaannya dalam mencapai target tersebut adalah dilakukan identifikasi mitra, penyusunan draft perjanjian kerja sama, penandatanganan perjanjian kerja sama, evaluasi dan pelaporan perjanjian

kerja sama. Adapun penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 dan telah dilaporkan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian telah tercapai sesuai target di tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2024 (100%). Sedangkan pada tahun 2020 dan 2023 tidak terdapat target pada IKU 5. Capaian sama sama memenuhi target.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan capaian jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan target telah tercapai 100%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu dilakukan identifikasi mitra, penyusunan draft perjanjian kerja sama, penandatanganan perjanjian kerja sama, evaluasi dan pelaporan perjanjian kerja sama.

b. Solusi

Solusi tidak perlu diberikan karena tidak terdapat permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan dinas terkait, dan masyarakat untuk mendukung dan menyepakati bersama.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga akhir tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Telah dilakukan Identifikasi mitra kerja sama, Pembahasan rencana kerja penyusunan perjanjian kerja sama BPSPL Denpasar, dan penandatanganan perjanjian kerja sama BPSPL Denpasar dengan Yayasan Penyu Banyuwangi / Banyuwangi Sea Turtle Fondation (BSTF) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024;
- Monitoring dan Evaluasi implementasi perjanjian kerjasama antara BPSPL Denpasar dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU pada tanggal 9 Agustus 2024 di Kantor BPSPL Denpasar wilayah kerja Nusa Tenggara Barat

- Penyampaian laporan capaian implementasi perjanjian kerja sama triwulan III tahun 2024 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut Tim Kerja Sama dan Data pada tanggal 27 September 2024.

Tabel 20. Kegiatan Pendukung IKU 5

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Penandatanganan perjanjian kerja sama BPSPL Denpasar dengan BSTF	  

2	Monitoring dan Evaluasi implementasi perjanjian kerjasama antara BPSPL Denpasar dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan PT Indonesia Power PLTU Jeranjang OMU	 9 Agu 2024 09:25:51 8.5998326S 116.8862156E 206 Jalan Rajaji Tilar Negara Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
---	---	---

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 5 adalah melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana aksi yang telah disusun pada Perjanjian Kerja Sama yang masih berlaku secara berkala agar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat terlaksana secara implementatif.

IKU 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)

Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan pada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Tata cara pemberian bantuan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 21. Capaian IKU 6 BPSPL Denpasar

SK 6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
2	3	3	100	33,33	3	3	4	275

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Telah tercapai tiga penerimaan bantuan pemetintah (100% dari target). Adapun kegiatan serah terima bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) tercapai pada Trwiulan II dan Triwulan III. Direncanakan bahwa serah terima bantuan KOMPAK yang diserahkan pada Triwulan II sebanyak dua bantuan namun realisasinya pada Triwulan II telah diserahkan dua bantuan yaitu kepada Lembaga Sumbawa Grow Up dan Pokmaswas Bua Lawah. Sehingga pada Triwulan III dapat diserahkan kepada satu penerima bantuan yaitu kepada Pokmaswas Desa Lewotobi. Telah tercapai tiga bantuan yang telah diserahkan (100% dari target).

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023, capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan 33,33%. Hal tersebut dikarenakan target pada tahun 2024 dan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini lebih banyak pada tahun 2024 sehingga dapat tercapai lebih maksimal. Namun pada tahun 2020-2023 dan tahun 2024 sama sama mencapai target 100%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target kelompok yang diberikan bantuan tahun 2024 pada renstra 2020-2024 adalah 4 kelompok. Pada tahun 2020 tercapai serah terima bantuan kepada 1 kelompok, tahun 2021 tercapai serah terima bantuan kepada 2 kelompok, tahun 2022 tercapai serah terima bantuan kepada 3 kelompok, dan pada tahun 2023 tercapai serah terima bantuan kepada 2 kelompok. Pada tahun 2024 telah tercapai serah terima bantuan kepada 3 kelompok sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan renstra 2020-2024 tercapai 275%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah dilakukan inventarisir usulan kelompok di wilayah kerja BPSPL Denpasar, mengidentifikasi atas usulan (proposal) kelompok, verifikasi kelompok Masyarakat, penetapan penerima bantuan, pengadaan barang/jasa, penyerahan bantuan, monitoring dan evaluasi KOMPAK.

b. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait dan masyarakat untuk menjalin kerjasama, jejaring, dan kemitraan di lokasi yang telah ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga akhir tahun 2024 ini antara lain sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengusulan 3 kelompok calon penerima bantuan KOMPAK yang dipilih dari 29 kelompok ke Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
2. Telah ditetapkan kelompok penerima bantuan KOMPAK TA 2024 tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPSPL Denpasar nomor 351/KEP-BPSPL.4/2024 tentang Penerima Bantuan Konservasi di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Tahun Anggaran 2024
3. Telah dilakukan Pekerjaan Pengadaan Barang Bantuan Masyarakat Penggerak Konservasi pada Satker BPSPL Denpasar TA 2024 pada POKMASWAS Bualawah berupa: Laptop, Camera Underwater, Peralatan Selam dan telah dilakukan Pekerjaan Pengadaan Barang Bantuan Masyarakat Penggerak Konservasi pada Satker BPSPL Denpasar TA 2024 pada Lembaga Sumbawa Grow Up berupa: Laptop, Peralatan Selam, Dive Computer, Kompresor.
4. Dilakukan serah terima bantuan KOMPAK pada POKMASWAS Bualawah. Adapun total bantuan yang diberikan adalah: Rp. 97.780.000,- dengan Nomor BAST 3131/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024

5. Dilakukan rangkaian serah terima bantuan KOMPAK kepada Lembaga Sumbawa Grow Up. Adapun total bantuan yang diberikan adalah: Rp. 101.920.000,- dengan Nomor BAST 3161/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024
6. Dilakukan rangkaian serah terima bantuan KOMPAK kepada Pokmaswas Desa Lewotobi. Adapun total bantuan yang diberikan adalah Rp99.321.590,- dengan Nomor BAST 4456/BPSPL.4/PRL.440/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024

Tabel 22. Kegiatan Pendukung IKU 6

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Serah terima bantuan KOMPAK pada POKMASWAS Bualawah	  

No.	Kegiatan	Dokumentasi
2	Serah terima bantuan KOMPAK pada Lembaga Sumbawa Grow Up	  
3	Serah terima bantuan KOMPAK pada Pokmaswas Desa Lewotobi	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		 27 Agu 2024 11.29.40 8°34'42,21437"S 122°50'9,97138"E Birawan Kecamatan Lebura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tidak ada rencana aksi dan tindak lanjut dikarenakan kegiatan serah terima bantuan KOMPAK telah selesai pada akhir tahun berjalan.

IKU 7. Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian baru (Orang)

Masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 23. Capaian IKU 7 BPSPL Denpasar

SK 6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian baru (Orang)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
-	25	25	100	100	25	100	25	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target IKU telah tercapai pada triwulan IV tahun 2024 yaitu dengan terlaksananya Pelatihan Kapasitas Masyarakat Penggerak Konservasi dengan target 25 orang dan tercapai 25 orang (100%). Sebelumnya terjadi perubahan indikator dan target pada IKU 7 dari indikator Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian baru (Kelompok) dengan target 1 kelompok menjadi Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian baru (Orang) dengan target 25 orang. Hal tersebut diakibatkan perubahan Rincian *Output* kegiatan dari REA (Konservasi Kawasan – Rehabilitasi Ekosistem) menjadi SCC (Pelatihan Bidang Pertanian Perikanan). Kegiatan berlangsung di Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur dan perairan di sekitarnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan 25 orang peserta sesuai target dan tercapai 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 - 2023 tidak terdapat target IKU Masyarakat yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru sehingga tahun 2024 mengalami kenaikan 100% dengan tercapainya 25 orang sesuai target.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Pada tahun 2020-2023 tidak terdapat target IKU Masyarakat yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru sehingga capaian sampai dengan tahun 2024 dengan target 25 orang tercapai 100%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pada IKU 7 adalah dilakukan upaya sebagai berikut: koordinasi pemangku kepentingan, identifikasi kelompok/masyarakat, survei Lokasi dan kelompok/masyarakat, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan.

b. Solusi

Solusi tidak diperlukan karena tidak terdapat permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait

untuk kelangsungan kegiatan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IKU 7 antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat persiapan kegiatan secara daring terkait tindak lanjut pembukaan blokir Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) kode 2362.SCC.002 dengan target Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya, sebanyak 25 orang, dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) bersama Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit KEBP) pada 19 Juli 2024.
- Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan konservasi perairan Gili Ketapang pada tanggal 20-22 Agustus 2024
- Survei awal kegiatan peningkatan kapasitas Masyarakat penggerak konservasi tanggal 23-24 Agustus 2024 di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Melaksanakan rapat internal persiapan pelaksanaan pelatihan skuba di Kawasan konservasi pada tanggal 29 Agustus 2024, 2 September 2024, dan 23 September 2024
- Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kapasitas Masyarakat Penggerak Konservasi yaitu Pelatihan Selam SCUBA Tingkat Rescue pada tanggal 8-10 Oktober 2024 di Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur dan perairan di sekitarnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melibatkan 25 orang peserta (24 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan). Pada hari pertama dilakukan pelatihan materi dalam kelas. Hari kedua peserta melakukan praktek lapangan dengan materi sebagai berikut: Penyelamatan Kelelahan dan Panik, Respon dari Pantai, Kapal atau Dek, Penyelam Kesulitan Dalam Air, Penyelam Hilang, Membawa ke Permukaan Penyelam yang Tidak Respon, Menangani Penyelam yang Tidak Respon di Permukaan, Pertolongan Pertama untuk Cedera terkait Tekanan dan Pemberian Oksigen, Respon dari Pantai/Kapal terhadap Penyelam yang Tidak Bernapas, dan Skenario Penyelamatan. Pada hari ketiga, peserta melakukan praktik kependamuan wisata selam sekaligus penerapan keterampilan sebagai Penyelam Rescue di perairan Gili Petagan dan Gili Bidara yang berjarak 5 mil laut arah tenggara dari kawasan TWP

Gili Sulat Lawang. Setelah kembali ke darat sesi dilanjutkan dengan ujian kelulusan.

Tabel 24. Kegiatan Pendukung IKU 7

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	Rapat Internal	
2	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan konservasi perairan Gili Ketapang	 
3	Survei awal kegiatan peningkatan kapasitas Masyarakat penggerak konservasi	
4	Pelatihan Selam Scuba Tingkat Rescue	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		   

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tidak ada tindak lanjut pada triwulan berikutnya karena kegiatan telah selesai dilaksanakan pada tahun berjalan.

IKU 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota laut dilindungi adalah jenis ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan atau pemulihan dilindungi guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan serta respon cepat penanganan biota laut dilindungi. Jumlah target jenis tersebut adalah hiu Apendiks CITES, pari Apendiks CITES, penyu, hiu paus, mamalia laut, dan karang. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

- Monitoring hiu dan pari Apendiks CITES, penyu, hiu paus
- Rehabilitasi karang.
- Respon cepat penanganan biota laut dilindungi/terancam punah
- Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pendataan, penyadartahuan perbaikan habitat/ pemulihan populasi atau penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 25. Capaian IKU 8 BPSPL Denpasar

SK 7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi Di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
9	6	6	100	-50	6	100	6	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target IKU telah tercapai 100% yaitu dengan dilaksanakan kegiatan monitoring hiu Appendiks, pari Appendiks, monitoring penyu, monitoring kemunculan hiu paus, rehabilitasi karang, dan respon cepat mamalia. Seluruh target tercapai pada akhir tahun 2024. Adapun keenam jenis

tersebut adalah Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Penyu, Hiu Paus, Terumbu Karang, dan Mamalia Laut. Capaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian tahun 2023 adalah 9 jenis sedangkan capaian tahun 2024 adalah 6 jenis. Jika dibandingkan maka capaian pada tahun 2023 lebih besar 50%. Hal tersebut karena jenis yang dilakukan pendataan tidak sebanyak tahun sebelumnya dan lebih difokuskan pada jenis yang lebih prioritas. Tetapi keduanya sama-sama telah mencapai target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2020 target 2 jenis realisasi 2 jenis, tahun 2021 target 6 jenis realisasi 6 jenis, tahun 2022 target 6 jenis realisasi 6 jenis. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian tahun 2020-2023 sama dengan capaian tahun 2024 (100% dari target).

C. Capaian Realisasi dengan Target jangka Menengah

Capaian realisasi dengan matriks kinerja pendanaan pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yaitu 6 jenis (100%). Jika dijumlahkan capaian dari tahun 2020-2024 maka tidak dapat dijumlahkan karena ada jenis yang sama.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

- Enumerasi pendaratan hiu dan pari di lima lokasi antara lain Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Pelabuhan Perikanan Muncar, Pelabuhan Perikanan Benoa, PPI Tanjung Luar, dan Namosain-Kupang
- Pendataan sebaran penyu
- Monitoring populasi hiu paus
- Rehabilitasi karang
- Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi / terancam punah di wilayah kerja BPSPL Denpasar
- Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Denpasar

a. Solusi

Tidak dapat diberikan solusi karena tidak terdapat permasalahan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, enumerator, NGO, nelayan dan masyarakat untuk mendukung kegiatan di lokasi yang telah ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga akhir tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Monitoring pendaratan Hiu dan Pari Appendix CITES yaitu Enumerasi pendaratan hiu dan pari (Brondong, Muncar, Benoa, Tanjung Luar, dan Kupang) oleh enumerator. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Lokasi Monitoring Pendaratan Hiu dan Pari Apendiks CITES di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar TA. 2024

Selama monitoring pendaratan hiu dan pari di Brondong, Muncar, Benoa, Tanjung Luar, dan Kupang, telah tercatat 79.686 individu hiu dan pari. Jumlah tersebut terdiri dari jenis yang masuk ke dalam Apendiks CITES maupun Non Apendiks CITES sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 26.

Tabel 26. Komposisi Hiu dan Pari yang Didaratkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar T.A. 2024

Jenis	Jumlah (Individu)					TOTAL	%
	BRD	MCR	BEN	TJL	KPG		
Apendiks II CITES	20562	2168	22044	14553	2699	62026	77.84
Hiu	11069	1407	21586	14145	2687	50894	63.87
Pari	9493	761	458	408	12	11132	13.97
Non Apendiks CITES	3659	4225	2483	7216	77	17660	22.16
Hiu	2963	885	2107	3756	77	9788	12.28
Pari	696	3340	376	3460	0	7872	9.88
TOTAL	24221	6393	24527	21769	2776	79686	100

Keterangan: BRD=Brondong, MCR=Muncar, BEN=Benoa, TJL=Tj. Luar, KPG=Kupang

Berdasarkan Tabel 3.2, total jenis hiu dan pari Apendiks CITES yang terdata sebanyak 62.026 individu atau 77,84% dari total individu yang terdata dengan komposisi hiu Apendiks CITES sebanyak 50.894 individu atau 63,87% dan pari Apendiks CITES sebanyak 11.132 individu atau 13,97%. Hiu dan pari Apendiks CITES paling banyak didaratkan di Benoa dengan jumlah 22.044 individu, sedangkan hiu dan pari Apendiks CITES paling sedikit didaratkan di Muncar dengan jumlah 2.168 individu. Namun secara keseluruhan jenis hiu dan pari paling banyak di daratkan di Benoa, dan paling sedikit didaratkan di Kupang.

2. Pendataan Sebaran Penyu; Kegiatan Pendataan Sebaran Penyu akan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar. Adapun daftar Kelompok Masyarakat yang dijadikan mitra dalam kegiatan pendataan ini, masih sama dengan mitra pendataan sebelumnya pada tahun 2024 yaitu:
 - a. KUB Pantai Rejo – Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
 - b. Pokmaswas Mutiara Laut Sumbreng– Kab. Trenggalek, Jatim
 - c. Kelompok Benteng Samudra – Kota Surabaya, Jawa Timur
 - d. Turtle Conservation Education Center – Kota Denpasar, Bali
 - e. Kelompok Yowana Bhakti Segara – Kab. Karangasem, Bali
 - f. KUB Sari Segara – Kota Denpasar, Bali
 - g. Pokmaswas Penimbang Lestari – Kab. Buleleng, Bali
 - h. Saba Asri Turtle Conservation – Kab. Gianyar, Bali
 - i. Kelompok Shindu Dwarawati – Kota Denpasar, Bali
 - j. Kelompok Watu Klotok – Kab. Karangasem, Bali
 - k. Kurma Asih – Kabupaten. Jembrana, Bali
 - l. Pokmaswas Pandanan – Kab. Lombok Utara, NTB

- m. Pokmaswas Pencinta Penyu Mapak – Kota Mataram, NTB
- n. Kelompok BBC Senggigi – Kab. Lombok Barat, NTB
- o. Kelompok Sekongkang – Kab. Sumbawa, NTB
- p. Pokmaswas Jalur Gaza – Kab. Flores Timur, NTT
- q. Kelompok Sahabat Penyu Loang – Kab. Lembata, NTT

Mitra-mitra tersebut dapat berkurang maupun bertambah seiring dengan kondisi dan keaktifan kelompok masyarakat dalam pengumpulan data. Kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- koordinasi dan pengambilan data penyu di Pantai Watu Klotok Kab Klungkung, Pantai Biaung dan Serangan Kota Denpasar, koordinasi dan pengambilan data penyu di Pantai Yeh Gangga Kab Tabanan dan Pantai Perancak Kab Jembrana, koordinasi dan pengambilan data penyu di Pantai Umeanyar Kab Buleleng, Pantai Desa Ped Kecamatan Nusa Penida, Pantai Mapak Kota Mataram, dan Pantai Kuranji Kab Lombok Barat. BPSPL Denpasar juga mengumpulkan data sekunder dari 20 kelompok pemerhati penyu 3 kelompok dari Jawa Timur (Pokmaswas Taman Kili-Kili, Kelompok Konservasi Penyu Segoro Lestari, Kelompok Banyuwangi Sea Turtle Fondation); 8 kelompok di Bali (Kelompok Conservation and Education Center, KUB Sari Segara Biaung, Pokmaswas Penimbang Lestari, Kelompoak Saba Asri Turtle Conservation, Kelompok Pelestari Penyu Watu Klotok, Kelompok Kurma Asih Sea Turtle Conservation Centre, Pokmaswas Umeanyar, Kelompok The Green Lion Turtle Conservation); 5 kelompok di Nusa Tenggara Barat (Kelompok Pelestari/ Pecinta Penyu Mapak, Kelompok Kerabat Penyu Lombok, Kelompok Beach Boys for Change's, Kelompok Turtle Conservation Komunitas, Kelompok Talonang Indah); dan 4 kelompok di Nusa Tenggara Timur (Pokmaswas Sulengwaseng, Pokmaswas Sahabat Penyu Loang, Pokmaswas Pedan Wutun, dan Pokmaswas Huha Telo).
- monitoring peneluran penyu di pantai peneluran yaitu di Pantai Sulengwaseng Kab Flores Timur, Pantai Rejo Kab Banyuwangi, Pantai Kili-Kili Kab Trenggalek, Pantai Nipah Kab Lombok Utara, monitoring peneluran penyu di Pantai Umeanyar Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Pantai Biaung Kota Denpasar, Pantai Mawil Telonang

Baru Sumbawa Barat, Pantai Lawar Sumbawa Barat, Pantai Serang Blitar, dan Pantai Raitaebang Flores Timur.

3. Monitoring Hiu Paus : kegiatan monitoring populasi hiu paus dilaksanakan pada periode Bulan Februari sampai dengan Oktober tahun 2024. Lokasi kegiatan monitoring hiu paus pada tahun 2024 dilakukan di sepanjang pantai perariran Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo dikarenakan kedua Lokasi tersebut diduga menjadi tempat kemunculan hiu paus. Lokasi sebagaimana tersaji pada Gambar 11 dan Gambar 12.



Gambar 11. Lokasi Monitoring Pendaratan Hiu dan Pari Apendiks CITES di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar TA. 2024



Gambar 12. Lokasi Monitoring Hiu Paus di Situbondo

- Monitoring Hiu Paus di Probolinggo

Berdasarkan hasil pengamatan dan pendataan populasi Hiu Paus pada bulan Pebruari – Mei tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo sebanyak 81 kali kemunculan. Kemunculan paling banyak pada bulan Pebruari 47 ekor, Bulan maret 23 ekor, Bulan April 11 ekor dan bulan Mei 0 ekor. Kemunculan terjadi pada saat pagi hari kondisi cuaca cerah, tidak bergelombang dan tidak berangin kencang. Kemunculan Hiu Paus mengalami penurunan dan bahkan tidak muncul pada bulan Mei hal ini disebabkan karena beberapa factor. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan sekitar disebabkan oleh faktor tangkapan ikan teri yang menurun dan cuaca, bahwa tangkapan ikan teri dan udang udang kecil di Probolinggo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang dimana ikan teri ini sebagai pakan hiu paus itu sendiri. Cuaca wilayah Probolinggo masuk musim penghujan yang dimana intensitas curah hujan tinggi, ini menyebabkan aliran sungai menjadi banjir tercampur dengan sendimen yang menyebabkan hiu paus tidak muncul ke permukaan.

- Monitoring Hiu Paus di Situbondo

Berdasarkan hasil pengamatan dan pendataan populasi Hiu Paus pada bulan Pebruari – Mei tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sebanyak 20 kali kemunculan. Kemunculan paling banyak pada bulan Pebruari 17 ekor, Bulan maret 2 ekor , Bulan April 1 ekor dan bulan Mei 0 ekor. Hiu paus cenderung muncul pada pagi hari yaitu pada jam 06.00-08-59 dengan persentase kemunculan sebesar 70%, di jam selanjutnya yaitu pada jam 09.00- 11.59 persentase kemunculannya sebesar 12% dan dapat ditemukan kembali di sore hari pada jam 15.00-17.00 sebesar 18%. Kemunculan terjadi pada saat kondisi cuaca cerah, tidak bergelombang. Kemunculan hiu paus perharinya cenderung mengalami penurunan, terjadi penurunan jumlah yang signifikan. Hal tersebut terjadi pada saat kondisi cuaca di lapangan bergelombang dan berangin kencang.

4. Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah hingga triwulan III terdapat perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan

- Koordinasi dengan para pihak terkait
- Survei awal di Sekotong, TWP Gita Nada, Kabupaten Lombok Barat
- Pembuatan / penyediaan media transplantasi karang terdiri dari 100 jaring laba-laba (spider), 50 balok MARS, dan 3 patung ikonik jenis ikan (Nemo, Kuda laut, dan Capungan Banggai).
- Monitoring dan transplantasi karang
- Penempatan/penurunan media transplantasi dan penanaman karang pada tanggal 4-5 Juni 2024
- Penempatan media transplantasi yang masih tersisa dan penanaman karang serta perawatan dilakukan pada tanggal 11-12 September 2024
- Perawatan dan monitoring dilakukan pada tanggal 16-17 November 2024 dan 17 Desember 2024
- Sosialisasi dan peluncuran Edu-Ekowisata Bahari Underwater Elak-Elak pada tanggal 18 Desember 2024
- Pembuat papan informasi dan brosur

5. Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah

Kejadian respon cepat penanganan mamalia dan biota laut dilindungi yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar di masing-masing wilayah kerja hingga akhir tahun 2024 yaitu:

Tabel 27. Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah BPSPL Denpasar T.A. 2024

Jenis Ikan	PROVINSI				TOTAL
	Bali	Jatim	NTB	NTT	
Paus	2	1	1	2	6
Lumba-lumba	3	1	2	0	6
Dugong	0	0	0	0	0
Hiu Paus	0	3	0	0	3
Penyu	4	3	0	1	8
Pari Manta	0	1	0	0	1
Karang Hias	0	0	0	0	0
Buaya	0	6	2	0	8
JUMLAH	9	15	5	3	32

Selain penanganan biota dilindungi/terancam punah, BPSPL Denpasar juga menangani pelepasliaran Benih Bening Lobster (BBL) hasil tindak pidana pemanfaatan BBL secara ilegal yang diungkap oleh aparat penegak hukum.

Jumlah penanganan BBL yang dilepasliarkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 28. Penanganan Benih Bening Lobster (BBL) BPSPL Denpasar TA. 2024

Jenis Ikan	PROVINSI				TOTAL
	Bali	Jatim	NTB	NTT	
Benih Bening Lobster	1	4	2	0	7
JUMLAH	1	4	2	0	7

Telah dilaksanakan juga kegiatan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan respon cepat penanganan biota antara lain sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah yang Terdampar
 - Bimbingan Teknis TOT Penanganan Mamalia Laut Terdampar bekerja sama dengan WWF pada tanggal 22-23 Juni 2024 di Kota Denpasar
 - Bimbingan Teknis Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah yang Terdampar pada tanggal 16 Agustus 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat
6. Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah
- Kegiatan pendukung sosialisasi biota dilindungi/terancam punah hingga akhir tahun 2024 antara lain:
- Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah di Kab Karangasem tanggal 2 April 2024
 - Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah di Kab Banyuwangi tanggal 3 Mei 2024
 - Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan dan perlindungan jenis ikan di Kab Tabanan tanggal 8 Mei 2024
 - Sosialisasi konservasi sumber daya ikan di Sumbawa tanggal 28 Juni 2024
 - Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah di Kab Sumbawa dan Sumbawa Barat tanggal 29 Juni 2024
 - Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah di Alor tanggal 17 Juli 2024
 - Sosialisasi Konservasi Sumber Daya Ikan dan Biota Dilindungi/Terancam Punah di Bima tanggal 25 Juli 2024
 - Sosialisasi Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah di Trenggalek pada tanggal 14 Agustus 2024
 - Sosialisasi Edukasi dan Pelepasliaran Tukik di Malang tanggal 20 Oktober 2024
 - Sosialisasi Biota Dilindungi dalam Rangka Mendukung kegiatan penilaian kawasan konservasi di Kab Alor tanggal 30 Oktober 2024

- Sosialisasi Jenis Ikan dyang Dilindungi dan Gemarikan pada acara hari Ikan nasional (Harkannas) di Sidoarjo tanggal 21 November 2024

Tabel 29. Kegiatan Pendukung IKU 8

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Monitoring pendaratan Hiu dan Pari Appendix CITES	
2.	Pendataan sebaran penyu	 
4.	Rehabilitasi karang	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		  
5.	Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	 

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		 8 Okt 2024 08:30:36 Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Bali 
6.	Sosialisasi Biota Dilindungi/ Terancam Punah	 8/14/24 09:34 Altitude: 132.2m Speed: 0.0km/h Index number: 1604  17 Jul 2024 09:11:39 -8°13'1,47036"S 124°31'30,91692"E Jalan Diponegoro Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 8 adalah :

- i. Pendataan hiu-pari oleh enumerator : Pendataan hiu dan pari di lokasi monitoring perlu dilanjutkan setiap tahunnya untuk mendapatkan data time series
- ii. Pendataan sebaran penyu : perlunya peningkatan kapasitas SDM kelompok pemerhati penyu, perlu penyesuaian format pendataan agar lebih sederhana dengan prioritas data dan disesuaikan dengan kemampuan kelompok, menjalin hubungan yang baik dengan kelompok agar data yang dikumpulkan bisa kontinyu dan mendapatkan data series
- iii. Monitoring populasi hiu paus : Monitoring populasi Hiu Paus perlu dilakukan sepanjang tahun agar diperoleh data base yang komprehensif.
- iv. Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah: perlu kelanjutan program rehabilitasi habitat kritis jenis ikan di masa depan karena karang-karang yang hidup masih membutuhkan perawatan hingga mampu bertahan hidup sesuai dengan lingkungannya.
- v. Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi / terancam punah : Koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat pesisir terdekat dengan lokasi kejadian untuk melakukan penanganan biota laut dilindungi/terancam punah yang terdampar, Penambahan SDM dan pengadaan kendaraan fungsional untuk respon cepat penanganan biota dilindungi/terancam punah, Bimbingan teknis penanganan buaya dan pengadaan peralatan penanganan buaya.
- vi. Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah: Koordinasi di tingkat pelaksana peraturan dalam pelaksanaan amanah peraturan dan terus dilakukannya harmonisasi peraturan perlindungan biota antar instansi serta terus dilaksanakan sosialisasi ke pemangku kepentingan.

IKU 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Upaya pemanfaatan jenis ikan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan atau jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya melalui:

- a. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan yaitu hiu, pari, BCF, dan teripang
- b. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan atau look alike species seperti hiu, pari, softcoral, BCF, dan teripang,

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendix cites, dan/atau look alike spesies dan pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 30. Capaian IKU 9 BPSPL Denpasar

SK 8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
7	5	6	120	(-16,66)	5	120	5	120

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target IKU 9 telah tercapai 6 jenis dari target 5 jenis (tercapai 120%). Capaian jenis meliputi hiu, pari, teripang, soft coral, BCF, dan arwana. Capaian tersebut adalah jenis ikan yang dilakukan pelayanan peredaran jenis ikan dilindungi dan atau Apendiks serta *look alike species* yang dilayani di seluruh wilayah kerja BPSPL Denpasar. BPSPL Denpasar telah berhasil melayani penerbitan dokumen angkut keenam jenis tersebut dengan baik sepanjang tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target IKU 9 pada tahun 2022 - 2023 tercapai 7 jenis dan tahun 2024 tercapai 6 jenis. Tahun 2022 dan 2023 lebih unggul 16,66% dikarenakan jenis ikan yang dimanfaatkan sama tetapi dalam permohonannya di tahun berjalan juga berbeda oleh karena itu capaiannya juga berbeda. Sedangkan tahun 2021 tercapai 6 jenis dari target 6 jenis (100%). Capaian tahun 2020 memiliki target 2 jenis dan tercapai 3 jenis. Namun capaian sama sama melebihi target yang direncanakan.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi dengan matriks kinerja pendanaan pada tahun 2024 telah melebihi sesuai yaitu 6 jenis (120%). Jika dijumlahkan capaian dari tahun 2020-2024 maka tidak dapat dijumlahkan karena ada jenis yang sama.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pencapaian indikator ini adalah telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu kegiatan Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan/atau Look Alike Species dan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES berupa verifikasi Jenis Ikan Dilindungi/ tidak Dilindungi dan Appendiks CITES yang Diatur Peredarannya, Penerbitan Dokumen SAJI dan Rekomendasi, Verifikasi Lapangan SIPJI, dan pemeriksaan stok bulanan.

b. Solusi

Solusi yang tidak dapat diberikan karena tidak terdapat permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, Enumerator, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga akhir tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Pengumpulan data potensi antara lain: koordinasi dan sinkronisasi data, survei lapangan di Jawa Timur, NTT, dan NTB; evaluasi RAN konservasi penyu dan rakernis DJPKRL; Bimbingan Teknis Pendataan dan Restocking Ikan Napoleon dan Kuda Laut di Belitung tanggal 28-31 Mei 2024; survei pengumpulan data jenis ikan teripang dan hiu pari di Situbondo; Survei pengumpulan data jenis ikan teripang di Sikka; Survei pengumpulan data jenis ikan teripang di Giligenting, Kab Sumenep; Survei pengumpulan data jenis ikan teripang di Raas, Kab Sumenep; Survei pengumpuln data jenis ikan hiu pari dan sidat di Sumbawa Barat; konsultasi publik perubahan status perlindungan ikan belida (*Notopterus notopterus*) di Kabupaten

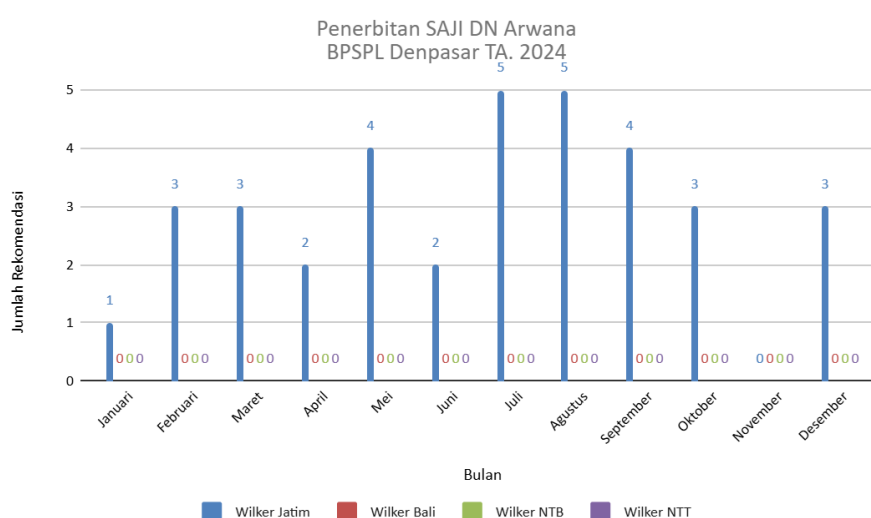
madiun tanggal 28-29 Agustus 2024, koordinasi penyediaan data potensi jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES pada tanggal 6 September 2024 ke PT Dinar Darum Lestari, Badung, Bali; pembukaan gerai pelayanan pada acara Kontes Arwana ACS Cup di Kota Madiun tanggal 26-29 Agustus 2024; Focus Group Discussion (FGD) tentang rancangan revisi Kepmen KP Nomor 40 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/Atau dibatasi Pemanfaatannya; Survei pengumpulan data hiu dan pari di Lumajang dan Jember, Jawa Timur; tabulasi data survei dan pembuatan database. Database data potensi dapat diakses melalui tautan berikut: [spreadsheetdatapotensipemanfaatanjenisikan](#) dan [databasepotensipemanfaatanjenisikandenpasar](#).

2. Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Apendiks CITES:

- Arwana

BPSPL Denpasar melakukan penerbitan SAJI DN untuk jenis-jenis ikan yang masuk kedalam Apendiks CITES termasuk ikan Arwana. Selama Triwulan IV total terdapat 6 Dokumen SAJI DN Arwana yang telah diterbitkan dengan rincian sebagai berikut.

Grafik 7. Jumlah Dokumen SAJI DN Arwana Terbit T.A. 2024



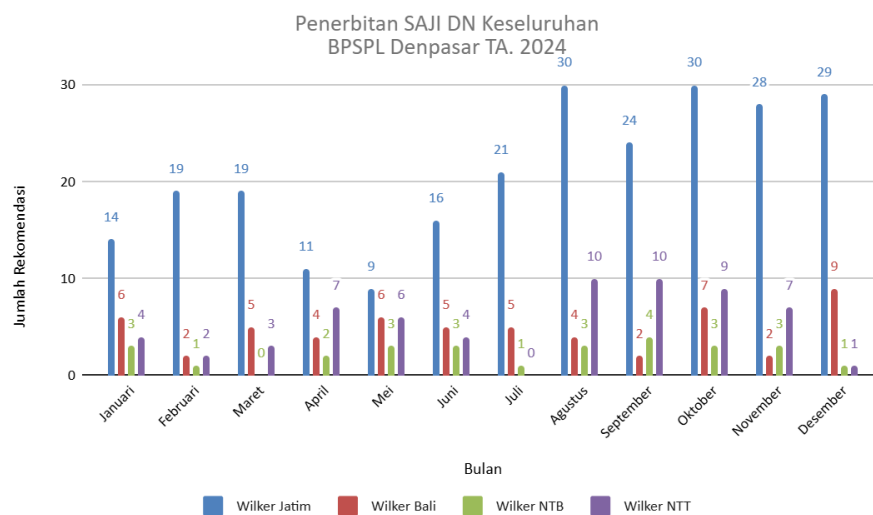
Dari keseluruhan wilayah kerja, Jawa Timur menjadi wilayah kerja yang paling banyak menerbitkan Dokumen SAJI DN Arwana dengan total 6 Dokumen SAJI DN selama Triwulan IV. Selama tahun 2024, SAJI DN Arwana hanya terbit dari wilayah

kerja Jawa Timur dengan total dokumen sebanyak 35 dokumen.

- Hiu dan Pari

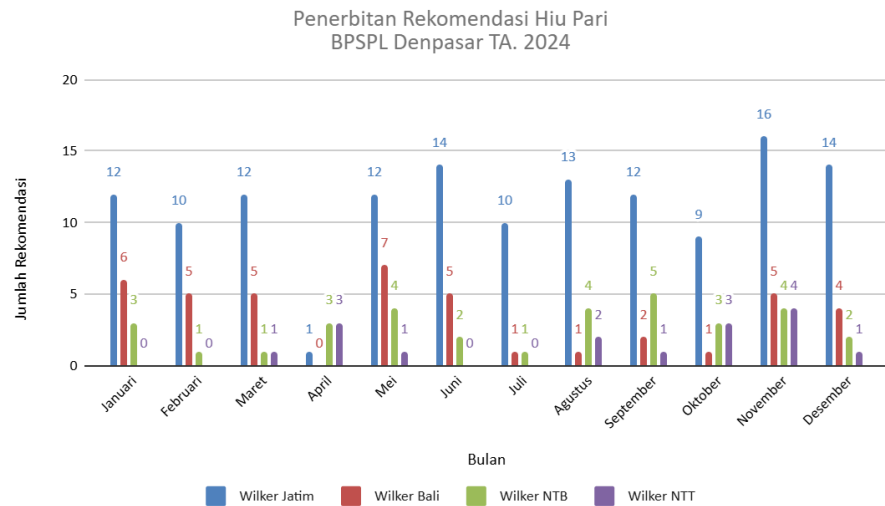
Kegiatan pelayanan penerbitan surat SAJI-DN untuk seluruh jenis ikan yang masuk dalam Appendiks CITES, termasuk spesies-spesies baru yang masuk ke dalam listing keputusan COP19 CITES, yaitu jenis ikan pada family Carcharhinidae, Sphyrnidae dan Rhinobatidae masuk dalam daftar Appendiks II CITES dan mulai diberlakukan ketentuan konvensi (*entry into force*) sejak tanggal 25 April 2024. Jumlah dokumen SAJI DN yang terbit sebagaimana berikut.

Grafik 8. Jumlah Dokumen SAJI DN T.A. 2024



Dalam kegiatan penerbitan Rekomendasi Look Alike Species Hiu dan Pari, Wilayah Kerja Jawa Timur masih mendominasi dengan total telah menerbitkan Rekomendasi sejumlah 66 dokumen selama Triwulan IV. Hal ini masih terlihat bahwa pasar Wilayah Jawa Timur masih mendominasi, juga tingginya jumlah pelaku usaha yang memperdagangkan hiu dan pari di wilayah Jawa Timur. Adapun grafik secara jelas sebagai berikut.

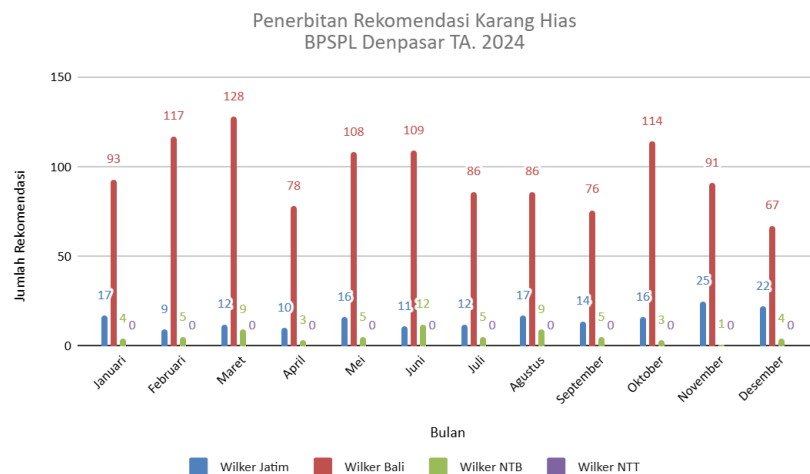
Grafik 9. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari T.A. 2024



- Karang Hias

Selain Hiu dan Pari BPSPL Denpasar juga mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Karang Hias terutama jenis-jenis Soft Coral, Anemone, dan Artificial Live Rock (SAA) Selama Triwulan IV total dokumen Rekomendasi Karang Hias yang telah terbit sebanyak 343 dokumen . Sedangkan selama tahun 2024 BPSPL Denpasar telah menerbitkan dokumen Rekomendasi Jenis Soft Coral, Anemone, dan Artificial Live Rock (SAA) sebanyak 1399 dokumen dengan rincian masing-masing per bulan adalah sebagai berikut.

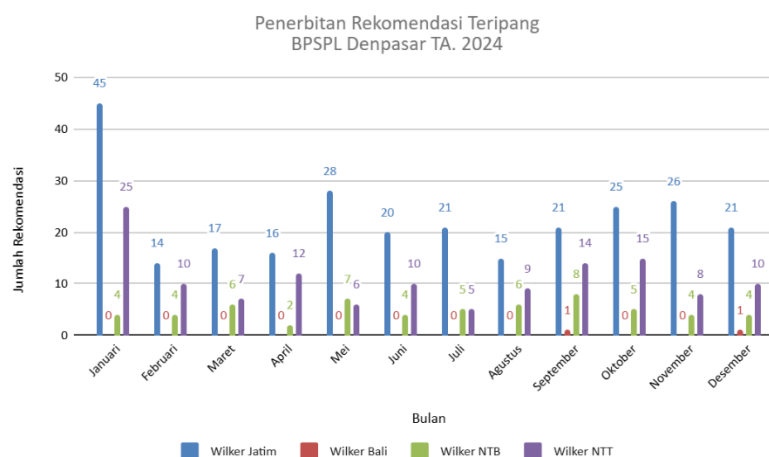
Grafik 10. Jumlah Rekomendasi SAA T.A. 2024



- Teripang

Penerbitan dokumen Rekomendasi untuk jenis teripang *look alike species* adalah sebagai berikut.

Grafik 11. Jumlah Rekomendasi Teripang T.A. 2024



Dari kegiatan penerbitan Rekomendasi Teripang jenis look alike species, hanya Wilayah Kerja Bali yang tidak melakukan penerbitan Rekomendasi Teripang jenis look alike species. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pasar teripang ataupun kondisi populasi teripang di Bali masih kurang di Triwulan IV. Jumlah rekomendasi teripang terbit selama Triwulan IV sebanyak 119 dokumen, penerbitan dokumen tertinggi pada provinsi Jawa Timur, disusul provinsi NTT.

- *Banggai Cardinal Fish* (BCF)

Lalu lintas jenis ikan Banggai Cardinal (BCF) di wilayah kerja BPSPL Denpasar banyak dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan Bali. Secara keseluruhan dokumen lalu lintas BCF paling tinggi ada di Provinsi Bali yaitu 45 dokumen. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur hanya ada satu pelaku usaha yang membudidayakan BCF, hal ini menjadi faktor utama rendahnya lalu lintas perdagangan di BCF di Provinsi Jawa Timur.

- Verifikasi Lapang SIPJI

Kegiatan Verifikasi Lapang SIPJI dilakukan untuk menerbitkan Berita Acara sebagai dokumen syarat pengajuan SIPJI. Hingga Triwulan III telah dilakukan verifikasi antara lain sebagai berikut.

Tabel 31. Data Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi Lapang SIPJI

Nama Perusahaan	Provinsi	Jenis SIPJI
PT Sentral Benoa Utama	Bali	SIPJI DN
PT Taman Safari Indonesia	Bali	SIPJI Aquaria
PT Bali Double C	Bali	SIPJI DN
PT Bali Double C	Bali	SIPJI LN
PT Bali Mina Segara	Bali	SIPJI LN
PT Dinar Darum Lestari	Bali	SIPJI Pengembangbiakan
Arif Pitoyo	Jawa Timur	SIPJI DN
Iwan	Jawa Timur	SIPJI DN
CV Affandi Jaya	Jawa Timur	SIPJI DN
PT Akuarium Laut Bali	Bali	SIPJI DN
PT Akuarium Laut Bali	Bali	SIPJI LN
PT Sari Laut	Jawa Timur	SIPJI LN
UD Bali Mina Segara	Bali	SIPJI LN
Dede Agus Suarnata	Bali	SIPJI DN
PT Gitana Agency Digital	Bali	SIPJI DN
PT Dinar Darum Lestari	Bali	SIPJI DN
PT Oceanik Nusa Global	Bali	SIPJI DN
PT Golden Tuna	Bali	SIPJI DN
PT Kasdi Sinar Jaya	Jawa Timur	SIPJI LN
PT Kasdi Sinar Jaya	Jawa Timur	SIPJI DN
PT Veora Indo Perkasa	Jawa Timur	SIPJI LN

Nama Perusahaan	Provinsi	Jenis SIPJI
PT Veora Indo Perkasa	Jawa Timur	SIPJI DN
PT Malasina Jaya Walet	Jawa Timur	SIPJI DN
PT Malasina Jaya Walet	Jawa Timur	SIPJI LN
CV Angin Timur Seafood	Jawa Timur	SIPJI DN
Ricky Hardy	Bali	SIPJI DN
PT Banyu Mili	Bali	SIPJI DN
UD Marine Dewata Sejahtera	Bali	SIPJI DN
UD Marine Dewata Sejahtera	Bali	SIPJI DN
UD Marine Dewata Sejahtera	Bali	SIPJI LN
UD Marine Dewata Sejahtera	Bali	SIPJI LN
PT Maritim Sentosa Makmur	Bali	SIPJI DN
Waras	Jawa Timur	SIPJI DN
Ahmad Ghoitsan Hasani	Jawa Timur	SIPJI DN
Nur Hasan	Jawa Timur	SIPJI DN
Firdausi	Jawa Timur	SIPJI DN
Siswo Haryoko	Jawa Timur	SIPJI DN
Topik Khoiruli	Jawa Timur	SIPJI DN
Muhammad Zuhal Fikri	Jawa Timur	SIPJI DN

- Pelatihan *Service Excellence* dan Bimbingan Teknis Penanganan Biota Laut Dilindungi tanggal 14 -17 Mei 2024
- Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam Rangka Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 37001:2016 tanggal 6-7 Juni 2024
- Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam Rangka Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 37001:2016 tanggal 19 Juni 2024

- Survei Stok Opname Hasil Panen kepada pelaku usaha pemegang SIPJI
- Reviu Pelayanan Publik tanggal 22 Maret 2024, 1 April 2024, 3 Mei 2024, 28 Juni 2024, 17 Juli 2024, 14 Agustus 2024
- Kontes Arwana ACS Cup di Kota Madiun tanggal 26-29 September 2024
- Pelatihan Bimtek Aplikasi SAJI tanggal 3 September 2024 di Badung
- Pelayanan BPSPL Denpasar memperoleh nilai pelayanan publik 4,81 dengan makna A (pelayanan prima)
- Pelayanan BPSPL Denpasar memperoleh nilai survei kepuasan masyarakat 95,40/100

Tabel 32. Kegiatan Pendukung IKU 9

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Penyediaan Data Potensi	
2.	Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		   

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 9 adalah :

- Dashboard database data potensi dapat dikembangkan untuk memetakan jalur distribusi pemanfaatan jenis ikan serta membandingkannya dengan pemanfaatan jenis ikan yang sedang berjalan yang telah dilayani melalui aplikasi eSAJI.
- Melanjutkan kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES pada triwulan berikutnya.

IKU 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan mencari data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 33. Capaian IKU 10 BPSPL Denpasar

SK 8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							
IKU 9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matrik Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	1	1	100	100	1	100	1	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian IKU telah tercapai 1 dokumen dari 1 target (100%) yaitu dokumen sosialisasi dan survei pemanfaatan air laut selain energi. Dalam mencapai target berikut hal-hal yang dilakukan antara lain: perencanaan

kegiatan meliputi koordinasi, penentuan lokasi, jadwal sosialisasi; pelaksanaan sosialisasi di Provinsi Bali dan Jawa Timur; dan pelaporan. Telah tercapai pada akhir tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 - 2023 tidak ada IKU Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar sehingga capaian tahun 2024 mengalami kenaikan 100% dari tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Pada Matrik Kinerja Pendanaan target tahun 2024 adalah 1 dokumen sehingga telah tercapai 100%. Adapun di tahun 2020 – 2023 tidak terdapat target matriks pendanaan sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu melaksanakan sosialisasi pemanfaatan air laut selain energi (perencanaan kegiatan meliputi koordinasi, penentuan lokasi, jadwal sosialisasi; pelaksanaan sosialisasi di Provinsi Bali dan Jawa Timur; dan pelaporan) dan survei dan verifikasi pemanfaatan air laut selain energi (persiapan, pelaksanaan survei melalui citra satelit di Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat; dan pelaporan).

b. Solusi

Solusi tidak diperlukan karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, Enumerator, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

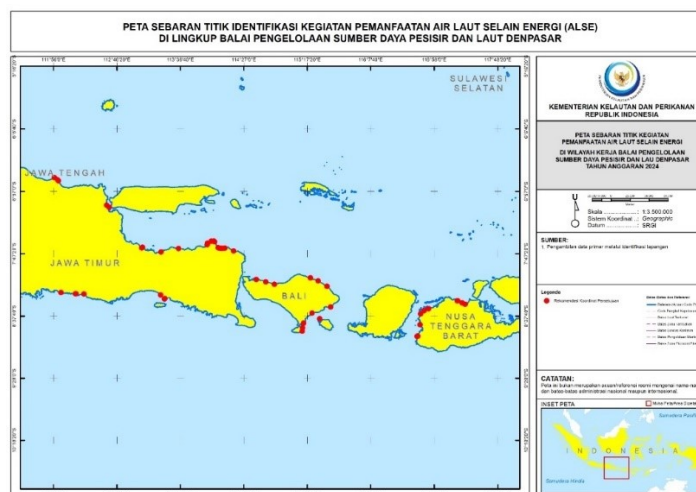
F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga akhir tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Mengikuti sosialisasi izin pemanfaatan air laut selain energi
2. Pembuatan bahan sosialisasi berdasarkan materi sosialisasi dari Direktorat Jasa Kelautan
3. Pembuatan form konsultasi publik
4. Koordinasi dengan LPSPL Sorong dan BPSPL Makassar terkait

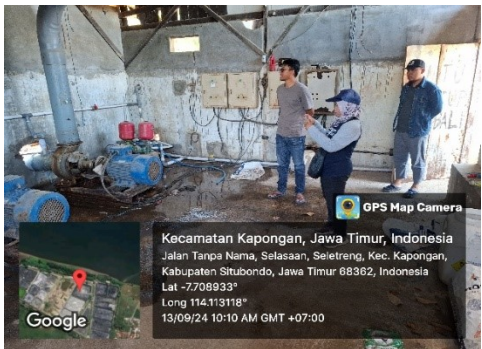
teknis pelaksanaan sosialisasi dan output survei ALSE

5. Sosialisasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Denpasar pada 13 Juni 2024. Kegiatan Sosialisasi dan Survei Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) pada tahun anggaran 2024 telah melakukan sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan dan kebijakan terkait pelaksanaan pemanfaatan ALSE. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan survei ini pelaku usaha/masyarakat dan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemanfaatan ALSE dapat tertib administrasi perizinan sesuai dengan aturan
6. Identifikasi dan sosialisasi pemanfaatan ALSE di Karangasem
7. Identifikasi dan sosialisasi pemanfaatan ALSE di Situbondo
8. Verifikasi Lapang Identifikasi Kegiatan Pemanfaatan ALSE di Karangasem dan Buleleng
9. Sosialisasi dan Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Sumbawa Barat dan Sumbawa
10. Survei dan verifikasi ALSE telah dilaksanakan di Jawa Timur Juli-Desember 2024, Bali Juli – November 2024, dan NTB September 2024. Melalui survei, BPSPL Denpasar telah mengidentifikasi pelaku usaha yang telah memiliki izin dasar KKPRL dan memiliki maupun berpotensi memiliki KBLI 36001 dan 36002 yaitu 14 pelaku usaha di Bali, 32 pelaku usaha di Jawa Timur dan 11 pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat. Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait kewenangan perizinan berusaha pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Peta sebaran pelaku usaha ALSE tersaji pada Gambar 13.



Gambar 13. Peta Sebaran Pelau Usaha ALSE

Tabel 34. Kegiatan Pendukung IKU 10

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Sosialisasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	  
2.	Survei dan Verifikasi ALSE	 

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 10 adalah petunjuk teknis dan SOP pengelolaan perizinan pemanfaatan ALSE harus segera disusun agar mempercepat dan mempermudah proses bisnis penerbitan izin usaha ALSE dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang belum dilakukan pada tahun 2024.

IKU 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (kawasan)

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar adalah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL) yang terdiri dari Sosialisasi BCL dan Gerakan bersih Pantai dan laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kabupaten/kota yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 35. Capaian IKU 11 BPSPL Denpasar

SK 10	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran							
IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
-	2	2	100	100	2	100	2	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian IKU telah tercapai dari target 2 kawasan tercapai 2 kawasan (100%) yaitu pada Kab. Situbondo dan Kota Denpasar. Tercapaiannya dua kawasan tersebut merupakan daerah Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar. Dimana di kawasan tersebut telah berhasil dikumpulkan sampah laut di kab. Situbondo sejumlah 150.181.659 Kg dan di Kota Denpasar sejumlah 21.634,8 Kg.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 - 2023 tidak terdapat IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar dan pada tahun 2024 tercapai dua target. Sehingga kenaikan dari tahun sebelumnya adalah 100%.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Capaian realisasi tercapai 100% dari target. Sedangkan di tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023 tidak terdapat realisasi kegiatan IKU 11.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan melakukan respon cepat penanggulangan bencana pencemaran pesisir.

b. Solusi

Solusi tidak dapat diberikan karena tidak ada permasalahan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan Dinas terkait, NGO, Enumerator, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.

F. Kegiatan Pendukung

Dalam pencapaian indikator kinerja hingga akhir tahun 2024 ini, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Survei dan identifikasi awal Gerakan nasional Bulan Cinta Laut di dua Kawasan (Kab. Situbondo dan Kota Denpasar)
2. Pelaksanaan rangkaian Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yaitu pembukaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di dua Kawasan

(Kab. Situbondo dan Kota Denpasar)

3. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan di Kab. Situbondo tertuang pada BA Hasil Pengumpulan Sampah Laut di kab. Situbondo sejumlah 150.181.659 Kg
4. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan di Kota Denpasar tertuang pada BA Hasil Pengumpulan Sampah Laut di Kota Denpasar sejumlah 21.634,8 Kg
5. Respon Cepat Penanggulangan Bencana di Lombok Barat berdasarkan surat dari Polairud Polda NTB Pos Pantai Damai Sejahtera (PDS), Sekotong, Lombok Barat pada 8 Maret 2024.
6. Koordinasi dan identifikasi pencemaran pesisir dan laut di Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, dan Kota Denpasar tanggal 4 April 2024.
7. Gerakan Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Buleleng tanggal 28 Juli 2024
8. Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Pasuruan tanggal 12-13 September 2024
9. Aksi Bersih Pantai dan Tanam Mangrove di Kabupaten Sumbawa tanggal 14 September 2024
10. Pengumpulan Bahan dan keterangan sementara kandasnya kapal kargo KM ASIA GLORY 6 di Teluk Bima
11. Respon Cepat tumpahan minyak dari kapal tenggelam di perairan Bolok, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur
12. Aksi bersih pantai dan laut (APBL), kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut yang berhasil didata oleh BPSPL Denpasar pada tahun 2024 yang tersebar di empat provinsi dan 13 kabupaten/kota, dengan rincian lima kegiatan APBL di Bali, enam kegiatan di Jawa Timur dan masing-masing dua kegiatan ABPL di NTB dan NTT. Jumlah total sampah yang terkumpul dari kegiatan tersebut adalah sejumlah 556.268,439 kg dan 6 karung. Tiga kegiatan diselenggarakan oleh BPSPL Denpasar, tiga kegiatan oleh KKP selain BPSPL Denpasar, dan Sembilan kegiatan dilaksanakan oleh instansi Non-KKP. Sebagian besar ABPL ini diselenggarakan dalam memperingati hari penting. Adapun perihal dari pelaksanaan ABPL yang berhasil dicatat yaitu Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, HUT Kota Denpasar ke-236, Hari Bumi, Hari Laut Sedunia, Petik Laut Desa Banjarsari, Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali & HUT RI ke-79, Hari

Jadi Kab. Pasuruan ke-1095, Sail to Indonesia di Sumbawa, dan Hari Nusantara.

Tabel 36. Kegiatan Pendukung IKU 11

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Gerakan Nasional Bulan Bulan Cinta Laut	
2	Respon Cepat Penanggulangan Bencana	
3	Gerakan Bersih Pantai dan Laut	 

No.	Kegiatan	Dokumentasi
		
4	Pengumpulan bahan dan keterangan kandasnya kapal kargo KM ASIA GLORY 6	 

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pendukung IKU 11 adalah memperkuat jejaring antar stakeholder terkait untuk mempermudah aksi respon cepat dan pengumpulan data dan informasi.

IK 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Denpasar adalah Nilai Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 37. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Devisiasi RPD (Halaman III DIPA)	10
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi Penyampaian SPM	5
8	Capaian Output	25

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Teknik Menghitung:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$

Tabel 38. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	89,95	93,76	99,47	106	11	93,76	120	93,76

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target telah tercapai pada akhir tahun 2024 dengan nilai capaian 99,47 (106% dari target). Capaian tersebut diperoleh dengan memantau nilai IKPA setiap bulannya supaya tidak turun. Sehingga realisasi dapat tercapai

secara maksimal. Adapun nilai akhir per komponen capaian sesuai dengan aplikasi omspan adalah sebagai berikut: Kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA 10.00; deviasi halaman III DIPA 15.00), kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran 19.68; belanja kontraktual 10.00; penyelesaian tagihan 10.00; pengelolaan UP dan TUP 9.79), dan capaian output 25.00.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian pada tahun 2024 mengalami kenaikan 11% dari tahun 2023. Adapun peningkatan tersebut dikarenakan telah dilakukan evaluasi, perbaikan Langkah, serta pemantauan Deviasi Halaman III DIPA yang cukup tinggi pada tahun 2023 (perencanaan realisasi anggaran kurang baik dibandingkan perencanaan realisasi tahun sebelumnya) dan Penyelesaian Tagihan sempat tertunda (karena terdapat miskomunikasi / kelalaian pada tahun 2023).

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi jika dibandingkan dengan target jangka menengah telah tercapai 106%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Melaksanakan kriteria-kriteria yang menjadi penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan Rekonsiliasi serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Lain.

b. Solusi

Tidak diberikan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menunjuk penanggung jawab untuk penginputan sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan kriteria-kriteria penilaian IKPA sesuai dengan ketentuan, Monitoring terhadap capaian kinerja dapat dilakukan melalui aplikasi OM SPAN pada Modul PA, serta Rekonsiliasi serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin lain.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan upaya monitoring secara rutin atas pencapaian indikator kinerja.

IK 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- Baik, apabila NKPA >80 - 90;
- Cukup, apabila NKPA >60 - 80;
- Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

Tabel 39. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	87,39	71	96,42	136 (atau 120)	10	71	96,42	71

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target tercapai pada akhir tahun 2024. Tercapai dengan nilai 96,42 dari target 71 (136%) dengan kategori sangat baik. Pada tahun berjalan terdapat perubahan nomenklatur pada perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sehingga terdapat perubahan target menjadi 71. Namun, dengan perubahan tersebut hasil NKPA BPSPL Denpasar dapat melebihi target dengan presentase 136% atau 120% di aplikasi kinerjaku.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian pada tahun 2024 tercapai 96,42 sehingga mengalami kenaikan 10% dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 87,39. Adapun capaian tahun 2020 adalah 98,49; capaian tahun 2021 adalah 87,93; capaian tahun 2022 adalah 88,62; dan capaian tahun 2023 adalah 87,39.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi tahun 2024 jika dibandingkan pada matriks kinerja pendanaan telah melebihi target dengan presentase 136%. Adapun capaian tahun 2024 merupakan capaian nilai tertinggi kedua selama lima tahun terakhir.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala. Adapun capaian masing-masing indikator antara lain efektivitas capaian RO 100, efisiensi penggunaan SBK 100, efisiensi SBK 76,10.

b. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan koordinasi antar semua penanggungjawab kegiatan di semua seksi.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Kegiatan penyediaan perangkat pengolah data dan informasi
2. Kegiatan layanan Barang Milik Negara
3. Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan diantaranya berupa kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana rumah tangga untuk menunjang TUSI BPSPL Denpasar.

4. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai ketentuan
5. Kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor berupa pembayaran kebutuhan sehari-hari perkantoran, jamuan tamu, honorarium petugas kebersihan, satpam/sopir, pramubakti, petugas outsourcing, pengiriman pos, honorarium pengelola keuangan, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan listrik, telepon dan PDAM.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan monitoring secara rutin terhadap pencapaian indikator kinerja.

IK 14. Nilai Unit Kinerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5,0. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Teknik menghitung yang dilakukan pada IK Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Denpasar adalah hasil penilaian tim penilai internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kemen PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang Ditandatangani Menteri KP.

Tabel 40. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 14	Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	87,57	75	87,57	117	-	75	117	75

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target telah tercapai 117% pada tahun 2024 (dari target 75 tercapai 87,57). Adapun capaian indikator kinerja program unit kerja berpredikat menuju WBK diperoleh BPSPL Denpasar melalui pemenuhan standar penilaian sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Capaian penilaian BPSPL Denpasar merupakan hasil pemantauan penilaian TPI KKP Tahun 2022.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah 87,57 demikian pula pada tahun 2024 adalah 87,57 sehingga tidak terdapat kenaikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 memperoleh nilai 86,46 dan tahun 2021 memperoleh nilai 85,38 capaian tiga tahun terakhir merupakan capaian dengan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan telah melebihi target dengan presentase 117%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena kerja sama yang baik dari koordinator-koordinator kegiatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan WBK secara bertahap.

b. Solusi

Tidak diperlukan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan koordinasi antar semua penanggungjawab kegiatan di semua seksi

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi WBK
2. Pembentukan Tim Kerja
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM
4. Mengikuti kegiatan peringatan Hari Korupsi Sedunia

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melanjutkan pendokumentasian dokumen kelengkapan WBK dengan lebih baik.

IK 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai tersebut diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.
- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja.
- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 41. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	90,43	88	91,36	104	1	88	104	88

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024, target IK sudah tercapai dengan nilai 91,36 dari target indeks 88. Capaian tersebut diperoleh dengan koordinasi antar pegawai untuk saling mengingatkan dan meremajakan aplikasi myASN masing masing pegawai BPSPL Denpasar. Serta meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti workshop, seminar, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Atas kerjasama yang baik antar pimpinan, petugas, dan seluruh pegawai maka target dapat tercapai 104%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian pada tahun 2024 mengalami kenaikan 1% dari tahun 2023. Peningkatan tersebut terjadi karena pada tahun 2024 koordinasi antara pegawai dan koordinator lebih baik dalam pengelolaan pegawai dan telah melaksanakan perbaikan dari evaluasi pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan memperoleh nilai indeks 91,36 dari target 88 (104%).

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena pelaksanaan kegiatan manajemen SDM secara rutin yang baik oleh koordinator kegiatan dan kerjasama yang baik dari staf pelaksana kegiatan dalam penyusunan SKP.

b. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Penggunaan anggaran untuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, magang dan sebagainya, selain itu juga melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui daring agar para peserta yang tidak dapat

hadir luring dapat melalui daring.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Menyusun dokumen bazetting dan Peta jabatan
2. Melakukan Pembinaan SDM Aparatur dan layanan perkantoran
3. Menyiapkan data proyeksi mutasi pegawai tahun 2024
4. Melakukan senam pagi bersama
5. Mengusulkan pegawai yang akan mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 2024
6. Menyiapkan dokumen dan kelengkapan dokumen untuk proses penerbitan SK Pensiun Pegawai BPSPL Denpasar
7. Menyiapkan proses pelaksanaan Dialog kinerja BPSPL Denpasar
8. Memproses Usulan Mengikuti Seleksi Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PELP dan APJK Melalui Mekanisme Perpindahan Jabatan Tahun 2024
9. Melakukan pembinaan SDM Aparatur untuk pegawai di kantor BPSPL DPS wilker NTT di Kupang
10. Melakukan rekonsiliasi data dan iuran peserta PPNPN pada satker dengan data pada master file BPJS Kesehatan
11. Mengusulkan calon peserta penilaian kompetensi untuk proses izin belajar tahun 2024 - 2025
12. Mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar tahun 2024 dan tahun 2025
13. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi (HCDP) tahun 2024 – 2027
14. Pengambilan sumpah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 22 April 2024
15. Mengusulkan Kenaikan Pangkat sampai dengan Periode September 2024
16. Melakukan peremajaan data pada aplikasi SIASN
17. Menyiapkan usulan Mengikuti Seleksi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan
18. Melakukan proses Penilaian kinerja Triwulan I 2024 pegawai pada aplikasi eKinerja BKN.

19. Menyiapkan Usulan Mengikuti Seleksi Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan Melalui Mekanisme Penyesuaian Jabatan Tahun 2024
20. Menghadiri undangan Implementasi Manajemen Telanta melalui Transformasi Sistem Karir Berbasis Sistem Merit pada Jabatan Manajerial, Non Manajerial dan Fungsional
21. Melakukan survei tempat pengadaan pakaian seragam dinas pegawai TA. 2024
22. Melakukan peremajaan data pada aplikasi SIASN terkait Diklat/kursus yang diikuti pegawai.
23. Menyiapkan kelengkapan dokumen Usulan Kenaikan Gaji Berkala a.n Marendra Erlangga
24. Pendampingan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi CAT BKN Tenaga Non ASN
25. Menyiapkan Usulan Pemberhentian Jabatan Fungsional Karena Tugas Belajar a.n Muji Wasis
26. Menyiapkan Laporan Monitoring Pengembangan Kompetensi pegawai semester 1 Tahun 2024
27. Menyiapkan rencana strategi pemenuhan kebutuhan pegawai tahun 2024 - 2028
28. Menyiapkan Rekapitulasi presensi kehadiran pegawai semester I Tahun 2024
29. Penyampaian kelengkapan berkas calon Penerima Biaya pendidikan Gelar Tugas Belajar Tahun 2024 a.n Yudisthio Wahyudi
30. Penyampaian analisis beban kerja BPSPL Denpasar
31. Penyampaian berkas kelengkapan calon peserta Izin Belajar a.n Faizal Tuhulele
32. Penyampaian usulan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui perpindahan jabatan a.n Dikor Jupantara
33. Pengusulan Peserta Inpassing Jabatan Fungsional Penata Perizinan a.n Constantein, Suci, Milka, Dikor
34. Penyampaian usulan peserta penilaian kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PELP a.n Yuniarti
35. Penyampaian analisis beban kerja BPSPL Denpasar untuk persiapan peralihan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar perairan ke KKP

36. Pelaksanaan kegiatan Team Building lingkup BPSPL Denpasar tanggal 7 September 2024
 37. Pengusulan Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PELP Tahun 2024 a.n Yuniarti
 38. Pengusulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Tahun 2025
 39. Menyiapkan Usulan pemberhentian jabatan sementara Jabatan Fungsional karena Tugas Belajar a.n Yudisthio Whyudi
 40. Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui penyesuaian a.n Constantei dan Suci
 41. Menyiapkan usulan peserta seleksi peningkatan kapasitas SDM Bidang Konservasi Hiu Pari dan Ocean Accounting
 42. Mengikutsertakan pejabat Penatalaksana Barang Terampil untuk mengikuti Ujian kenaikan Jenjang a.n Yessy
 43. Melakukan penyediaan celana dinas untuk pegawai
- G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya
- Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya adalah melanjutkan pengadministrasian kepegawaian dengan tertib dan mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan nilai IP ASN individu pada aspek kompetensi dengan mengikuti workshop, bimtek, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan segera mengupdate data peningkatan kompetensi yang telah diikuti pada aplikasi epegawai

IK 16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat DJPKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu :

Tabel 42. Kategori nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar

Predikat	Nilai	Interpretasi
		khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 43. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar

SK 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	84,2	81	85,55	106	102	81	106	81

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target telah tercapai dengan nilai 85,55 kategori memuaskan dari target 81 (106%). Capaian diperoleh dengan pemenuhan dan penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi kinerjajaku. Adapun penilaian yang telah dipenuhi antara lain perencanaan kinerja (25,80), pengukuran kinerja (27,60), pelaporan kinerja (12,90), dan evaluasi kinerja (19,25). Nilai akhir 85,55 dengan kategori A (memuaskan).

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Nilai PM SAKIP pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 (102%). Adapun kenaikan tersebut dikarenakan BPSPL Denpasar telah memperbaiki aspek aspek penilaian dalam PM SAKIP.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan telah

melebihi target yaitu 106%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena dalam pelaksanaannya penyiapan dan penyampaian dokumen, pencapaian kinerja, dan pelaporan dilakukan dengan tepat waktu

b. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara membuat email khusus untuk pengumpulan dokumen dan laporan. Selain itu para pegawai diwajibkan untuk mengumpulkan triwulan dan laporan akhir kegiatan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah :

1. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran

- Menyusun Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar T.A. 2024
- Menyusun Manual IKU dan Rencana Aksi BPSPL Denpasar
- Rapat teknis penyusunan dokumen perencanaan anggaran
- Finalisasi dokumen penganggaran T.A. 2024
- PAGU alokasi anggaran T.A. 2025
- Revisi RKAKL, pemutakhiran KPA, dan revisi DIPA T.A. 2024

2. Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Evaluasi Rencana Aksi setiap bulan pada T.A. 2024
- Verifikasi kinerja Triwulan I, II, III, IV
- Penyusunan laporan kinerja Triwulan I,II,III, dan tahunan
- Rapat, monitoring, dan evaluasi kinerja
- Pengisian aplikasi emonev Bappenas
- Pengisian aplikasi Kinerjaku
- Pengisian aplikasi eSAKIP pada [http:// esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi triwulan berikutnya adalah

1. Melanjutkan kegiatan Penganggaran berupa Penyusunan Anggaran dan Revisi POK untuk untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan melanjutkan penyampaian pelaporan secara rutin.
2. Melanjutkan kegiatan penyiapan dan penyampaian dokumen pencapaian kinerja & pelaporan dilakukan dengan tepat waktu.

IK 17. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen pendukung laporan SPIP yang disiapkan oleh Direktorat adalah:

- a. pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. pengendalian penyusunan anggaran;
- c. pengendalian pengadaan barang/jasa;
- d. pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. pemantauan Manajemen Resiko; dan/atau
- f. pengendalian penyerapan anggaran.

Teknik Menghitung untuk Setdit dan UPT adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Sedangkan untuk Direktorat Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen pendukung laporan SPIP yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretariat PKRL.

Tabel 44. Capaian IK 17 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	4	4	100	-	4	100	4	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024 target IK tercapai 100% (4 dari 4 target telah tercapai). Laporan SPIP disampaikan kepada Sesditjen PKRL setiap triwulan di tahun 2024. Penyampaian secara tepat waktu sehingga target dapat tercapai dengan baik.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 dan tahun 2024 target laporan SPIP sama-sama tercapai 4 dokumen dari target 4 dokumen laporan (tercapai 100%). Hal tersebut telah diterapkan juga dari tahun 2020. Sehingga dalam lima tahun terakhir target telah terpenuhi dengan 4 dokumen (100%).

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi jika dibandingkan dengan matrik kinerja pendanaan telah tercapai 100% dari target.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini berhasil melakukan persiapan penyusunan laporan SPIP dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan membuat draft laporan SPIP.

b. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menunjuk penanggung jawab pelaporan SPIP.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian indikator ini adalah membuat draf laporan pengendalian berkala dan rutin laporan SPIP.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana Aksi untuk Triwulan berikutnya adalah melanjutkan pengumpulan bahan laporan SPIP dan membuat draf laporan pengendalian berkala dan rutin laporan SPIP.

IK 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui *Portal Collaboration Office*.

Tabel 45. Capaian IK 18 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 18	Persentase Unit Kerja BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	133,33	94	133,33	141 (120 di kinerjaku)	-	94	141	94

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target IK telah tercapai melebihi target yaitu 133,33 dari target 94 (120%

berdasarkan aplikasi kinerjaku). Dalam pemenuhannya BPSPL Denpasar aktif dalam mengupdate informasi dan kegiatan di aplikasi *portal collaboration office* selama satu tahun berjalan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian tahun 2024 naik 33,33% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (100%).

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan tahun 2024 telah tercapai melebihi target yaitu 141%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas capaian indikator kinerja ini adalah komitmen pimpinan dan para pegawainya dalam memenuhi kelengkapan dokumen, keikutsertaan dan keaktifan dalam manajemen pengetahuan yang terstandar menggunakan aplikasi melalui laman portal.kkp.go.id.

b. Solusi

Tidak terdapat Solusi karena tidak ada permasalahan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Penunjukan penanggung jawab untuk mengisi aplikasi *portal collaboration office*.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah melakukan publikasi bulanan di sosial media (aplikasi *portal collaboration office*).

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah melanjutkan publikasi bulanan di sosial media.

IK 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Denpasar.

Tabel 46. Capaian IK 19 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
100	80	100	125 (120 di kinerjaku)	-	80	100	80	125

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, target IK telah tercapai 100%. BPSPL Denpasar telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Denpasar dan dokumen tindak lanjutnya telah disampaikan. Adapun dokumen tidak lanjut dapat diakses pada link sebagai berikut <https://drive.google.com/drive/folders/1nIVskNVaYXP3RM8-qtv3CvLgPFfBz7HV>

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian tahun 2023 maupun tahun 2024 tercapai 100 sehingga tidak terdapat peningkatan atau penurunan.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi jika dibandingkan dengan matriks kinerja pendanaan telah tercapai 125% dari target.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas capaian indikator kinerja ini adalah telah menuntaskan laporan hasil pengawasan (LHP) Itjen KKP.

b. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yaitu dengan menunjuk petugas yang bekerjasama untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung koordinasi antar semua pimpinan dan staf dalam penyelesaian hasil pengawasan.

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan tindak lanjut jika terdapat temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai rekomendasi dengan status tuntas 100%.

IK 20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Denpasar. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar dapat dihitung menggunakan rumus: $(\text{Jmlh tindak lanjut} / \text{Jmlh temuan}) \times 100\%$. Keterangan: Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 47. Capaian IK 20 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023(%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian Thd Renstra
	100	100	100	-	100	100	100	100

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Target IK telah tercapai pada akhir tahun 2024. BPSPL Denpasar tidak terdapat temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA.2023 sehingga capaian kinerja IK 20 tercapai 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target IK tahun 2023 dan tahun 2024 sama sama tercapai 100% sehingga tidak terdapat peningkatan atau penurunan.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Target persentase penyelesaian temuan LHP BPK tahun 2024 pada renstra 2020-2024 adalah 100% atau tercapai 100%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Belum dapat dilakukan analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, karena belum terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.

b. Solusi

Tidak dapat diberikan Solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Terdapat penanggung jawab penyelesaian temuan BPK

F. Kegiatan Pendukung

Tidak ada kegiatan pendukung pada IK tersebut karena tidak ada temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA. 2023 di BPSPL Denpasar

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan tindak lanjut jika terdapat temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IK 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang telah dibahas Bersama UPT dan Direktorat Lingkup DJPRL.

Teknik Menghitung:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Tabel 48. Capaian IK 21 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar (%)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023 (%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	93,33	80	97,5	122 (120 di kinerjaku)	4	80	122	80

A. Capaian IK Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, target IK telah tercapai dengan penilaian 97,5 (122 % atau 120 % sesuai aplikasi kinerjaku). Adapun perolehan nilai efektivitas tersebut dari hasil monitoring dan evaluasi efektivitas bantuan pemerintah T.A. 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Penerima bantuan yang dievaluasi antara lain Pokmaswas Penimbangan Lestari di Kab. Buleleng dengan total nilai kertas kerja evaluasi (KKE) 95 predikat AA (Memuaskan) dan Penyus Segoro Lestari di Kab. Blitar dengan total nilai kertas kerja evaluasi (KKE) 100 predikat AA (Memuaskan). Sehingga target telah tercapai yaitu dengan nilai 97,5

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian tahun 2023 adalah 93,33 sedangkan tahun 2024 adalah 97,5 sehingga terdapat kenaikan sebesar 4% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi karena dalam pelaksanaan evaluasi

efektivitas pada tahun 2024 dilakukan lebih baik berdasarkan hasil perbaikan dari tahun 2023.

C. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Target tingkat efektivitas tahun 2024 pada matriks pendanaan tahun 2020-2024 adalah 72,5 tercapai 122%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sejauh ini mengalami lebih banyak keberhasilan karena dalam pelaksanaannya BPSPL Denpasar hingga Triwulan IV ini berhasil melakukan monev KOMPAK terhadap dua kelompok yang menerima bantuan pada tahun 2023.

b. Solusi

Tidak ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi sumber daya dan anggaran yang dilakukan adalah dengan menugaskan pegawai di wilayah kerja untuk mendampingi penilaian dan melakukan monitoring evaluasi bantuan.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah 2023 yang diterima oleh dua kelompok yaitu:

- Pokmaswas Penimbangan Lestari di Kab. Buleleng dilakukan pelaporan/evaluasi pada 8 September 2024 dengan total nilai kertas kerja evaluasi (KKE) 95 predikat AA (Memuaskan).
- Penyus Segoro Lestari di Kab. Blitar dilakukan pelaporan/evaluasi pada 26 Oktober 2024 dengan total nilai kertas kerja evaluasi (KKE) 100 predikat AA (Memuaskan).

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melanjutkan monitoring dan evaluasi pada penerima bantuan Tahun 2024.

IK 22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Permen KP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun klasifikasi arsip mengacu pada Permen KP Nomor 9 Tahun 2021 tentang klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 49. Capaian IK 22 BPSPL Denpasar

SK 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar							
IK 20	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)							
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024						Matriks Kinerja Pendanaan	
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd tahun 2023(%)	Target PK 2024	% Realisasi Thd PK	Target 2024	% Capaian
	-	70	98,80	141 (120 di kinerjaku)	141	70	141	141

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada triwulan IV, target IK telah tercapai melebihi target yaitu dengan capaian 141%. Merupakan target dan capaian yang abru ada di tahun 2024. Dalam pencapaiannya BPSPL Denpasar melakukan pemahaman dan penerapan standar persuratan dan kearsipan. Memastikan semua dokumen sesuai standar yang ada. Sehingga BPSPL Denpasar mendapat peringkat ke-1 dalam pengawasan internal kearsipan lingkup DJPKRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 - 2023 tidak terdapat target IK 22 dan target pada tahun 2024 tercapai 141% sehingga capaian mengalami kenaikan 141%.

C. Perbandingan Reaisasi dengan Target Jangka Menengah

Realisasi jika dibandingkan denga matriks kinerja pendanaan telah tercapai melebihi target yaitu 141%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan persuratan, tata usaha, dan pengarsipan secara rutin. Memahami dan menerapkan standar persuratan dan kearsipan. Memastikan semua dokumen sesuai standar yang ada. Selain itu adanya kedisiplinan, dukungan dan kerjasama serta kolaborasi seluruh tim dalam pelaksanaan kegiatan persuratan dan pengarsipan. Serta mengontrol segala persuratan dan pengarsipan yang ada dalam lingkup BPSPL Denpasar.

b. Solusi

Tidak dapat diberikan solusi karena tidak ada permasalahan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Terdapat pegawai yang bertanggung jawab pada bagian persuratan dan pengarsipan

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan adalah persuratan dan pengarsipan secara rutin

G. Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melanjutkan kegiatan persuratan dan kearsipan secara rutin.

3.2 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Denpasar dengan BPSPL Pontianak hingga akhir Tahun 2024.

Tabel 50. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2024			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan IV 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp. 000)	950.000	3.035.051.977	319	2.000.000	2.421.607.418	121
2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	160	160	100	320	320	100
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3	3	100	3	3	100
4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	2	2	100	1	1	100
5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1	1	100	1	1	100

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2024			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan IV 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	3	3	100	2	2	100
7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Orang)	25	25	100	60	70	117
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan Penyadartahuan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penganganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6	6	100	7	8	114
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	6	120	4	8	200
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1	1	100	1	1	100
11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penaggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	2	2	100	1	1	100
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,76	99,47	106	93,76	94,98	101
13	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	71	96,42	136	71	98,11	138
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju	75	87,57	117	75	90,81	121

INDIKATOR KINERJA		BPSPL Denpasar s.d. Triwulan IV 2024			BPSPL Pontianak s.d. Triwulan IV 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)						
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	88	91,36	104	88	93,65	106
16	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	81	85,55	106	81	85,55	106
17	Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4	4	100	1	1	100
18	Presentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	133,33	142	94	133,33	142
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	125	80	100	125
20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	100	100	100	100	100	100
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	80	97,5	122	80	100	125
22	Nilai Pengawasan Internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	70	98,80	141	65	81,36	125

Dari hasil perbandingan terhadap tiga indikator kinerja BPSPL Denpasar lebih unggul dari BPSPL Pontianak pada indikator kinerja Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp. 000); Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai); Nilai Pengawasan Internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai). Hal tersebut dikarenakan kuantitas permohonan dokumen lalu lintas ikan di BPSPL Denpasar lebih

banyak. Nilai IKPA BPSPL Denpasar menjadi catatan tahun sebelumnya oleh karena itu BPSPL Denpasar telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan. Serta nilai pengawasan internal kearsipan yang melibatkan seluruh tim kerja, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antar tim kerja BPSPL Denpasar.

Terdapat empat indikator kinerja yang telah sesuai target tetapi presentase kurang dari BPSPL Pontianak antara lain indikator kinerja Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang); Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan Penyadartahuan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penganganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis); Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis); dan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai). BPSPL Denpasar telah mencapai target pada keempat indikator tersebut namun tidak lebih dari BPSPL Pontianak dikarenakan jenis yang dilindungi, dimanfaatkan, dan jumlah masyarakat masing masing UPT berbeda sehingga tidak dapat disamakan capaiannya. Sedangkan 15 indikator lainnya capaian BPSPL Denpasar dan BPSPL Pontianak sama yaitu telah mencapai target tahunan. Hal tersebut membuktikan bahwa BPSPL Denpasar dapat setara dengan UPT PSPL lainnya.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 ini BPSPL Denpasar didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.07.2.477419/2024 sebesar Rp16.435.987.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp14.510.987.000,- dan PNPB Rp1.925.000.000,- dari pagu tersebut pada Triwulan I terdapat dana blokir dengan kode 2 (alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sejumlah Rp200.000.000,- yang berasal dari jenis belanja 52 (belanja barang) dan Rp.90.170.000 yang berasal dari belanja 53 (belanja modal). Pada Triwulan II telah dilakukan revisi DIPA buka blokir sehingga total dana yang dapat digunakan sebesar Rp16.435.987.000,-.

BPSPL Denpasar mendapatkan tambahan pagu dari sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada Triwulan III sebesar Rp.1.660.000.000,- Jumlah pagu BPSPL Denpasar tahun 2024 sebesar Rp.18.095.987.000. Pada triwulan IV, dengan adanya kebijakan pemerintah melalui S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga, dilakukan revisi DIPA untuk blokir dana dengan kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) sebesar Rp.265.391.000,-. Total realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 (Per 31 Desember 2024) sesuai data omspan sebesar Rp17.783.830.375,- (98,27%). Adapun realisasi anggaran BPSPL Denpasar secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51. *Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2024*

<i>Kode</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Pagu (Rp)</i>	<i>Jumlah Realisasi (Rp)</i>	<i>Presentase (%)</i>
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar		18.095.987.000	17.783.830.375	98,27
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut				
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50.000.000	46.770.665	93,54
2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000	59.587.307	85,12
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400.000.000	398.678.057	97,70
2362.SCC.002	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	200.000.000	199.337.003	99,67
2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	700.000.000	643.327.962	91,90
2362.REB.	Keanekaragaman Hayati	1.340.000.000	1.326.604.341	99,00

<i>Kode</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Pagu (Rp)</i>	<i>Jumlah Realisasi (Rp)</i>	<i>Presentase (%)</i>
002	Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan			
2362.UBA.001	Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180.000.000	175.949.069	97,75
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
4346.QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	500.000.000	493.520.173	98,70
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				
2363.PBW.002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	225.000.000	190.069.730	84,48
Perencanaan Ruang Laut				
2366.PBT.009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000.000	1.039.542.990	94,50
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				
2367.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	90.170.000	90.000.000	99,81
2367.EBA.956	Layanan BMN	85.000.000	84.903.783	99,89
2367.EBA.957	Layanan Hukum	315.000.000	314.751.880	99,92
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	25.000.000	20.517.002	82,06
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	20.000.000	19.669.746	98,35

<i>Kode</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Pagu (Rp)</i>	<i>Jumlah Realisasi (Rp)</i>	<i>Presentase (%)</i>
2367.EBA. 962	<i>Layanan Umum</i>	<i>146.826.000</i>	<i>126.371.038</i>	<i>86,06</i>
2367.EBA. 994	<i>Layanan Perkantoran</i>	<i>10.085.161.000</i>	<i>10.057.683.681</i>	<i>99,73</i>
2367.EBB. 951	<i>Layanan Sarana Internal</i>	<i>313.830.000</i>	<i>313.422.590</i>	<i>99,87</i>
2367.EBC. 954	<i>Layanan Manajemen SDM</i>	<i>220.000.000</i>	<i>206.575.150</i>	<i>93,50</i>
2367.EBD. 952	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	<i>100.000.000</i>	<i>88.845.908</i>	<i>88,85</i>
2367.EBD. 953	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	<i>85.000.000</i>	<i>82.952.743</i>	<i>97,59</i>
2367.EBD. 955	<i>Layanan Manajemen Keuangan</i>	<i>185.000.000</i>	<i>163.156.654</i>	<i>88,19</i>

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja IKU BPSPL Denpasar hingga akhir tahun 2024 dinilai istimewa jika dilihat dari penilaian di aplikasi kinerjaku yaitu sebesar 104,76% dengan uraian sebagai berikut :

1. IKU 1 Nilai PNBPN BPSPL Denpasar (Rp.000) (Rp3.035.051.977,-)
2. IKU 2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Orang) (160 Orang)
3. IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) (3 Dokumen)
4. IKU 4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah) (2 Daerah)
5. IKU 5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan) (1 Kesepakatan)
6. IKU 6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok) (3 Kelompok)
7. IKU 7 Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang) (25 Orang)
8. IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) (6 Jenis)
9. IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) (6 Jenis)
10. IKU 10 Pemanfaatan air laut selain energi yang Identifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) (1 Dokumen)
11. IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan) (2 Kawasan)
12. IK 12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) (99,47)
13. IK 13 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) (96,42)
14. IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai) (87,57)
15. IK 15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) (91,36)

- 16.IK 16 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) (85,55)
 - 17.IK 17 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) (4 Dokumen)
 - 18.IK 18 Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) (133,33)
 - 19.IK 19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) (100)
 - 20.IK 20 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%) (100)
 - 21.IK 21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%) (97,50)
 - 22.IK 22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai) (98,80)
- Capaian kinerja BPSPL Denpasar seluruhnya mendukung capaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Mengupayakan capaian target jenis ikan yang dilindungi dan/atau dimanfaatkan untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan; dan
2. Pada indikator penggunaan SBK BPSPL Denpasar untuk memperhatikan indeks realisasi anggaran tidak melebihi SBK dan pada indikator efisiensi SBK BPSPL Denpasar agar memperhatikan Indeks Realisasi Anggaran tidak lebih dari 20% di bawah indeks SBK

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada periode Triwulan I, II, dan III Tahun 2024 terhadap perbaikan kinerja ke depan dan telah ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
Triwulan I Tahun 2024		
Melakukan rapat evaluasi kegiatan dan memperbarui capaian bulan beserta perencanaan Halaman III DIPA agar tepat dari segi realisasi	Telah dilakukan rapat evaluasi kegiatan Tahun 2023 dan rencana pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 serta memperbarui capaian bulanan beserta perencanaan Halaman III	https://drive.google.com/drive/folders/1FGGeUT30bz_NqBpME18PWQ-F-H99-M8u?usp=drive_link

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
	DIPA melalui monitoring RPD	
Meningkatkan intensitas dan disiplin dalam melakukan postingan pada aplikasi bitrix	Telah dilakukan peningkatan intensitas dan disiplin dalam melakukan postingan pada aplikasi Portal (pengganti bitrix)	https://drive.google.com/drive/folders/1FGGeUT30bz_NqBpME18PWQ-F-H99-M8u?usp=drive_link
Triwulan II Tahun 2024		
Melakukan rapat evaluasi kegiatan dan memperbarui capaian setiap bulan	Telah dilakukan rapat evaluasi kegiatan Triwulan I Tahun 2024 dan rencana pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2024 serta memperbarui capaian bulanan melalui evaluasi rencana aksi	https://drive.google.com/drive/folders/1FGGeUT30bz_NqBpME18PWQ-F-H99-M8u?usp=drive_link
Mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang membutuhkan	Telah dilakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.	https://drive.google.com/drive/folders/1FGGeUT30bz_NqBpME18PWQ-F-H99-M8u?usp=drive_link
Triwulan III Tahun 2024		
Memastikan bahwa seluruh indikator kinerja dapat memenuhi target, termasuk IK Nilai IKPA secara rutin	Telah memastikan seluruh indikator kinerja memenuhi target	https://drive.google.com/drive/folders/1FGGeUT30bz_NqBpME18PWQ-F-H99-M8u?usp=drive_link
Menyajikan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja pada dokumen laporan kinerja yang dilakukan perbandingan per indikator dengan unit kerja lainnya	Telah disajikan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja pada dokumen laporan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1FGGeUT30bz_NqBpME18PWQ-F-H99-M8u?usp=drive_link
Pada indikator penggunaan SBK BPSPL Denpasar untuk memperhatikan indeks realisasi anggaran tidak melebihi SBK dan pada indikator efisiensi SBK BPSPL Denpasar agar memperhatikan Indeks Realisasi Anggaran tidak lebih dari 20% di bawah indeks SBKU	Indikator efisiensi SBK BPSPL Denpasar belum dapat ditindaklanjuti pada tahun 2024 dikarenakan capaian tidak melebihi target dan akan ditindaklanjuti kembali pada tahun berikutnya guna memperbaiki indikator efisiensi SBK BPSPL Denpasar	https://drive.google.com/drive/folders/1FGGeUT30bz_NqBpME18PWQ-F-H99-M8u?usp=drive_link

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar (Awal)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar

Getreda Melsina Hehanussa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	1.	Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp.000)	950.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Orang)	160
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10.	Pemanfaatan air laut selain energi yang Identifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	2
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	80
		22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	70

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.940.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	500.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	225.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.670.987.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2024		16.435.987.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar

Getreda Melsina Hehanussa

2. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar (Perubahan)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar


Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	1.	Nilai PNBP BPSPL Denpasar (Rp.000)	950.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	160
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya Kesesuaian Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	3
		7.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	25

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau - pulau Kecil yang direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran	11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	2
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	71
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	80
		22.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	70

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	4.600.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	500.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	225.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.670.987.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2024		18.095.987.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Getreda Melsina Hehanussa

3. BA Verifikasi dan Validasi Data Nelayan Gernas BCL – Kab. Situbondo



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA NELAYAN GERAKAN NASIONAL BULAN CINTA LAUT
DI KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertempat di Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan verifikasi dan validasi Nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang akan berpartisipasi dalam aksi melaut mengambil sampah di laut.

Total jumlah nelayan sebanyak 80 orang telah dilakukan verifikasi dan validasi bersama dengan para pihak sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh:

Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
D. Hidayat	Dinas Kelautan	Kabid Pemb Mel	
Febrika Kusuma	BPPP Banyuwangi	Penyuluh Perikanan	
Farid Ismuryanti	BPPP Banyuwangi	Penyuluh Perikanan	
Bayu Dwi H	BPSPL Denpasar	PLP Pertama	
Devita Luthyingsih	BPSPL Denpasar	PLP Pertama	
ALIF PURDAS	BPPP Banyuwangi	Penyuluh Perikanan	

Data nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

No	Nama	No. Kusuka	Kelompok
1	Supiyanto	3512160108800002	KUB Bintang Laut Bahari
2	Imam Baono	3512160110780003	KUB Bintang Laut Bahari
3	Ajib Sulaiman	3512160404820005	KUB Bintang Laut Bahari
4	Hori	3512160703650002	KUB Bintang Laut Bahari
5	Mahroji	3512160207520002	KUB Bintang Laut Bahari
6	Muhammad	3512160101710012	KUB Bintang Laut Bahari
7	M. Sali	3512160909730001	KUB Bintang Laut Bahari
8	Niman	3512161507720002	KUB Bintang Laut Bahari
9	Satun	3512162809740001	KUB Bintang Laut Bahari
10	Moh tasem	3512162008800001	KUB Bintang Laut Bahari
11	Sanidin	3512161101540001	KUB Bintang Laut Bahari
12	Sarijan	3512161709560001	KUB Bintang Laut Bahari
13	Hermanto	3512161709770001	KUB Bintang Laut Bahari
14	Sadriono	3512161205870001	KUB Bintang Laut Bahari
15	Kasim	3512161510520001	KUB Bintang Laut Bahari
16	Jumali	3512162604750001	KUB Bintang Laut Bahari
17	Rahul Kurniawan	3512160510990001	KUB Bintang Laut Bahari
18	Sucipto	3512161507660001	KUB Bintang Laut Bahari
19	Muhammad Kosim	3512160302860001	KUB Bintang Laut Bahari
20	Karnawi	3512161208780002	KUB Bintang Laut Bahari
21	Djumali	3512161709600002	KUB Bintang Laut Bahari
22	Muhariyanto	3512161709730001	KUB Bintang Laut Bahari
23	Hasan	3512160108640001	KUB Bintang Laut Bahari
24	Naidin	3512162012520001	KUB Bintang Laut Bahari
25	Nuruddin	3512161709820005	KUB Bintang Laut Bahari
26	Asan	3512161204600001	KUB Karya Bersama
27	Saturi	3512161601630002	KUB Karya Bersama
28	Moh. Rohim	3512161602940001	KUB Karya Bersama
29	Hatip	3512162710860001	KUB Karya Bersama
30	Bhunari	3512160208600001	KUB Karya Bersama
31	Maksan	3512160107620066	KUB Karya Bersama
32	Seno	3512161611760001	KUB Karya Bersama
33	Abdul Jalil	3512161807890005	KUB Karya Bersama
34	Sumarkan	3512161608840002	KUB Karya Bersama
35	Heri	3512160601650001	KUB Karya Bersama
36	Edi Boyo	3512160607670001	KUB Karya Bersama
37	Dedi Prasetyawan	3512162111890001	KUB Karya Bersama
38	Sapari	3512160107620007	KUB Karya Bersama
39	Hartono	3512161208800001	KUB Karya Bersama
40	Asmoni	3512161005660001	KUB Karya Bersama
41	Bunawan	3512160504860002	KUB Karya Bersama
42	Rian Andika	3512161509010001	KUB Karya Bersama
43	Suparto	3512161004730001	KUB Karya Bersama
44	Sutijo	3512160101630011	KUB Karya Bersama
45	Hedi Suwandi	3512160709790003	KUB Karya Bersama
46	Sugianto	3512160608720002	KUB Karya Bersama
47	Somino	3512160107630011	KUB Karya Bersama

48	Mistoyo	3512160405750002	KUB Karya Bersama
49	Jumaan Amin	3512160505840004	KUB Karya Bersama
50	Armawi	3512160505770001	KUB Karya Bersama
51	Winoto Satrio	3512160103970001	KUB Lautan Berjaya
52	Welli Satrio	3512161406870001	KUB Lautan Berjaya
53	Umar Adi susanto	3512161806640001	KUB Lautan Berjaya
54	Sanitro	3512161202640001	KUB Lautan Berjaya
55	Sarifuddin	3512161204990002	KUB Lautan Berjaya
56	Dani Purwanto	3512162009950001	KUB Lautan Berjaya
57	Sunahram	3512161709600001	KUB Lautan Berjaya
58	Samhadi	3512161709780004	KUB Lautan Berjaya
59	Saiman	3512160101510003	KUB Lautan Berjaya
60	Muhammad Hasim	3512161002900001	KUB Lautan Berjaya
61	Makbulla	3512161702040002	KUB Lautan Berjaya
62	Abdullah	3512161402790002	KUB Karang Laut
63	Molyadi	3512161706720001	KUB Karang Laut
64	Badrus Syamsi	3512161509850001	KUB Karang Laut
65	Fadli	3512160112820001	KUB Karang Laut
66	M Daim	3512160602810002	KUB Karang Laut
67	Ajib	3512160104770003	KUB Karang Laut
68	Satiman	3512160211720001	KUB Karang Laut
69	Sandika Bayu Asmana	3512160304040004	KUB Karang Laut
70	Ahmadi	3512162207880002	KUB Karang Laut
71	Munajar	3512162507760004	KUB Karang Laut
72	Sadin	3512160101760008	KUB Karang Laut
73	Mistali	3512160402640001	KUB Karang Laut
74	Wahyono	3512162604700001	KUB Karang Laut
75	Zainul Arifin	3512161912770002	KUB Karang Laut
76	Ahmad Afifi	3512160101030004	KUB Karang Laut
77	Mat Suro	3512020606780003	KUB Karang Laut
78	Wazirul Hakim	3512160301970002	KUB Karang Laut
79	Abdur Rahman	3512160411730001	KUB Karang Laut
80	Sujady	3512161711820002	KUB Karang Laut

Formulir 2. Formulir Identifikasi Lapangan

Data dan Informasi Hasil Identifikasi Lapangan

Lokasi	:	Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo
Tanggal survei	:	23 April 2024

Identifikasi Kerjasama Mitra/Offtaker			
No	Mitra/Offtaker	Bentuk Dukungan	Keterangan
1.	Bank Sampah Berkah	- Pembelian sampah nelayan yang bernilai ekonomis	
2.	CV. Utama Raya	- Sarana prasarana BCL	
3.	PT. Paiton Operations & Maintenance Indonesia (POMI)	- Sarana prasarana BCL	

Identifikasi Harga Ikan Terendah			
No.	Nama Ikan	Harga Ikan (kg)	Sumber Informasi
1.	Ikan Tongkol	5.000 – 25.000	Nelayan
2.	Ikan Selar	25.000	Nelayan
3.	Ikan Kerapu	40.000	Nelayan

Identifikasi Musim Melaut dan Paceklik Ikan			
No.	Musim Melaut	Musim Paceklik	Sumber Informasi
1.	Januari - Desember	Januari - Maret	Nelayan

4. BA Verifikasi dan Validasi Data Nelayan Gernas BCL – Kota Denpasar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA NELAYAN GERAKAN NASIONAL BULAN CINTA LAUT
DI KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

Pada hari ini **Jumat** tanggal **19** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan verifikasi dan validasi Nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang akan berpartisipasi dalam aksi melaut mengambil sampah di laut.

Total jumlah nelayan sebanyak 80 orang telah dilakukan verifikasi dan validasi bersama dengan para pihak sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh:

Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
I Ketut Darsana	KUB Simbar Segara	Ketua	
I Wayan Kona Antara	KUB Segara Guna Batu Lumbang	Ketua	
I Made Wijaya	Desa Pemogan	Kasi Kesra	
I Made Satya	Penyuluh	Penyuluh	
Anang Tri Jayanto	BPSPL Denpasar	Kasubbag Umum	

Data Nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

No.	Nama	No KUSUKA	Kelompok
1	I Wayan Kona Antara	5171010807700006	KUB Segara Guna Batu Lumbang
2	Anak Agung Ngurah Gede Yudana	5171040510710003	KUB Segara Guna Batu Lumbang
3	I Ketut Lodra	5171011403700006	KUB Segara Guna Batu Lumbang
4	I Ketut Percaya	5171013112640209	KUB Segara Guna Batu Lumbang

5	I Made Mudita	5103011403780001	KUB Segara Guna Batu Lumbang
6	I Made Murdita	5171011912730008	KUB Segara Guna Batu Lumbang
7	I Made Purnawan	5171031001730003	KUB Segara Guna Batu Lumbang
8	I Made Suparta	5171011807790004	KUB Segara Guna Batu Lumbang
9	I Made Suweja	5171011704740006	KUB Segara Guna Batu Lumbang
10	I Made Wijaya	5171011204740009	KUB Segara Guna Batu Lumbang
11	I Nyoman Sumantra	5171010608840001	KUB Segara Guna Batu Lumbang
12	I Wayan Kurcana	5171011503740009	KUB Segara Guna Batu Lumbang
13	I Wayan Mandi	5171011212620017	KUB Segara Guna Batu Lumbang
14	I Wayan Sudiasa	5171010808800003	KUB Segara Guna Batu Lumbang
15	I Wayan Sukerna	5171031212730003	KUB Segara Guna Batu Lumbang
16	Kadek Susila	5171011006770007	KUB Segara Guna Batu Lumbang
17	A.A.Ketut Sujana	5103011404560002	KUB Segara Guna Batu Lumbang
18	Anak Agung Ketut Wirawan	5103050811610001	KUB Segara Guna Batu Lumbang
19	I Made Kompyong	5171013112600240	KUB Segara Guna Batu Lumbang
20	I Made Sudana	5171012210810006	KUB Segara Guna Batu Lumbang
21	I Made Surda	5171031107690018	KUB Segara Guna Batu Lumbang
22	I Nengah Ranih	5171013112610075	KUB Segara Guna Batu Lumbang
23	I Nyoman Arnata	5103010511730001	KUB Segara Guna Batu Lumbang
24	I Wayan Budi	5171010807710002	KUB Segara Guna Batu Lumbang
25	I Wayan Pasek Pastika	5103010604820003	KUB Segara Guna Batu Lumbang
26	I Wayan Sember	5103012612750001	KUB Segara Guna Batu Lumbang
27	I Wayan Suadi	5171033112670049	KUB Segara Guna Batu Lumbang
28	I Wayan Suarnata	5171012011930004	KUB Segara Guna Batu Lumbang
29	I Wayan Suletra	5103010507660005	KUB Segara Guna Batu Lumbang

30	I Wayan Wirawan	5171011205750003	KUB Segara Guna Batu Lumbang
31	Kadek Wisma Pardiptayasa	5103012002860003	KUB Segara Guna Batu Lumbang
32	I Wayan Wana	5171013112690170	KUB Segara Guna Batu Lumbang
33	I Wayan Madra	5171010502690013	KUB Segara Guna Batu Lumbang
34	I Wayan Astawa	5103012307740001	KUB Segara Guna Batu Lumbang
35	I Made Swastika	5171030901810005	KUB Segara Guna Batu Lumbang
36	I Made Sarjana	5171011601830003	KUB Segara Guna Batu Lumbang
37	Trisna Samudra Gamana	5171012401700006	KUB Segara Guna Batu Lumbang
38	I Wayan Kawamura	5171032204900001	KUB Segara Guna Batu Lumbang
39	I Nyoman Sukada	5103053112730156	KUB Segara Guna Batu Lumbang
40	I Nyoman Sudana	5171032007800001	KUB Segara Guna Batu Lumbang
41	Anak Agung Made Alit	5171010505610004	KUB Simbar Segara
42	Anak Agung Ngurah Adi Putra	5171012404870004	KUB Simbar Segara
43	Anak Agung Yudana Putra	5171030404830004	KUB Simbar Segara
44	Gede Bayu Suryadi	5171012806840009	KUB Simbar Segara
45	I Gede Suardika Kusuma	5171013012880006	KUB Simbar Segara
46	I Gede Widi Adisaputera Se.	5171031710890001	KUB Simbar Segara
47	I Kadek Suarsa	5171012607730002	KUB Simbar Segara
48	I Ketut Ardana	5171033112820008	KUB Simbar Segara
49	I Ketut Artana	5171011008810004	KUB Simbar Segara
50	I Ketut Buda	5171031412710001	KUB Simbar Segara
51	I Ketut Budi Asmaranata	5171010111810006	KUB Simbar Segara
52	I Ketut Darsana	5171010604670004	KUB Simbar Segara
53	I Ketut Karta	5171011001680009	KUB Simbar Segara
54	I Ketut Sutika	5171012910690005	KUB Simbar Segara
55	I Komang Wiranata	5171012802920002	KUB Simbar Segara
56	I Made Adiawan	5171012808720009	KUB Simbar Segara
57	I Made Gede Wirya Atmaja	5171012604720002	KUB Simbar Segara
58	I Made Somaartha	5171031204770001	KUB Simbar Segara

59	I Made Suwantara	5171012106710004	KUB Simbar Segara
60	I Made Suyasa	5171032707720001	KUB Simbar Segara
61	I Made Wardana	5171010207800002	KUB Simbar Segara
62	I Made Wiryanata	5171012608660001	KUB Simbar Segara
63	I Nyoman Gede Setiawan	5171011601670001	KUB Simbar Segara
64	I Nyoman Open	5171013112570185	KUB Simbar Segara
65	I Nyoman Purna	5171013112590373	KUB Simbar Segara
66	I Nyoman Puspa	5171013112630292	KUB Simbar Segara
67	I Nyoman Rasita	5171011505750004	KUB Simbar Segara
68	I Nyoman Sunia	5171010401650002	KUB Simbar Segara
69	I Nyoman Suwena	5171012005710006	KUB Simbar Segara
70	I Nyoman Weta	5171033112650011	KUB Simbar Segara
71	I Nyoman Wika	5171011001720008	KUB Simbar Segara
72	I Wayan Budayasa	5171012602760002	KUB Simbar Segara
73	I Wayan Kona	5171010711570002	KUB Simbar Segara
74	I Wayan Moris	5171011506590005	KUB Simbar Segara
75	I Wayan Radit	5171013112400086	KUB Simbar Segara
76	I Wayan Suandi	5171012609650001	KUB Simbar Segara
77	I Wayan Sumerta Antara	5171011504880006	KUB Simbar Segara
78	I Wayan Wetra	5171012303690007	KUB Simbar Segara
79	I Wayan Wirta	5171030108710001	KUB Simbar Segara
80	Kadek Juni Artawan	5171012606860006	KUB Simbar Segara

Data dan Informasi Hasil Identifikasi Lapangan

Lokasi : Denpasar

Tanggal Survei : 19 April 2024

Identifikasi Kerjasama Mitra/ <i>Offtaker</i>			
No	Mitra / <i>Offtaker</i>	Bentuk Dukungan	Keterangan
1	EcoBali	- Pembeli Sampah yang Bernilai Ekonomis dari Nelayan - Narasumber Bimtek Penanganan Sampah	
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Narasumber Sosialisasi	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	- Fasilitasi Pengangkutan Sampah Residu Bulan Cinta Laut menuju Tempat Pembuangan Akhir - Narasumber Sosialisasi - Menyediakan 6 (enam) Tenaga Kerja Kebersihan	
4	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar	Fasilitasi Ruang Pertemuan Rangkaian Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Denpasar	
5	PT PLN Indonesia Power	Memberikan Pelatihan Kepada Nelayan dan Memberikan Bantuan Berupa Keramba Ikan	
6	Penyuluh Perikanan	- Melakukan Pendampingan di Lapangan - Melakukan Penimbangan dan Pencatatan Sampah	

Identifikasi Harga Ikan Terendah

No.	Nama Ikan	Harga Ikan	Sumber Informasi
1	Nila	Rp. 10.000,- / Kg	Nelayan

Identifikasi Musim Melaut dan Paceklik Ikan

No.	Musim Melaut	Musim Paceklik Ikan	Sumber Informasi
1	April – Januari	Februari – Maret	Nelayan

5. Kesepakatan Bersama BPSPL Denpasar dengan Yayasan BSTF



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN PENYU BANYUWANGI

NOMOR : 2101/BPSPL.4/KS.320/V/2024

NOMOR : 05/BSTF/05/2024

TENTANG

**KONSERVASI PENYU DAN HABITATNYA
DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (03-05-2024), bertempat di Banyuwangi, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **GETREDA MELSINA HEHANUSSA**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km 16.7, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **WIYANTO HADITANOJO**
Jabatan : Pembina Yayasan Penyu Banyuwangi
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Penyu Banyuwangi, yang berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim Nomor 42, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan yang memiliki misi untuk menyelamatkan dan melestarikan penyu dan habitatnya sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU – 3931.AH.01.04. Tahun 2012;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung konservasi penyu dan habitatnya di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. edukasi masyarakat tentang konservasi penyu dan habitatnya; dan
- b. perlindungan dan pelestarian penyu serta habitatnya.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyiapkan personel/narasumber dan bahan sosialisasi kebijakan penyu dan habitatnya;
 - b. menyiapkan dukungan materi dan bahan publikasi terkait program perlindungan penyu dan habitatnya; dan
 - c. memberikan pendampingan personel pada kegiatan perlindungan dan pelestarian penyu dan habitatnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan konservasi penyu dan habitatnya;
 - b. melaksanakan publikasi program perlindungan penyu dan habitatnya;
 - c. melaksanakan penetasan telur penyu di ruang penetasan yang berskala besar (INTAN BOX); dan
 - d. melaksanakan pendataan dan *monitoring* konservasi penyu dan habitatnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang atau pemilik hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi di luar Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil-wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan bersama secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;

- b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan

secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan. By Pass Prof Ida Bagus Mantra
Km 16.7, Desa Pering, Kecamatan
Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali

Nomor Telepon : (0361) 4794821

E-mail : bpspl.denpasar@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Pembina Yayasan Penyu Banyuwangi

Alamat : Jalan KH. Wakhid Hasyim No.42 Banyuwangi

No Telepon : (0333) 424463

E-mail : banyuwangi.seaturtle@yahoo.co.id /
service@bstf.org

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


WIYANTO HADITANOJO

PIHAK KESATU


GETREDA MELSINA HEHANUSSA

**RENCANA AKSI
 KONSERVASI PENYU DAN HABITATNYA DI KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Edukasi masyarakat tentang konservasi penyu dan habitatnya	Menyiapkan personel/ narasumber dan bahan sosialisasi kebijakan konservasi penyu dan habitatnya	Melaksanakan sosialisasi kebijakan konservasi penyu dan habitatnya	Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	2024-2027	1 (satu) kali pelaksanaan sosialisasi kebijakan konservasi penyu dan habitatnya dalam 1 tahun	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan konservasi penyu dan habitatnya
		Menyiapkan dukungan materi dan bahan publikasi terkait program perlindungan penyu dan habitatnya	Melaksanakan publikasi program perlindungan penyu dan habitatnya	Wilayah kerja BPSPL Denpasar dan Nasional	2024-2027	Paling sedikit 1 kali kegiatan publikasi konservasi penyu, namun tidak terbatas pada media cetak dan/atau elektronik dalam 1 tahun	Terpublikasinya konservasi penyu dan habitatnya kepada masyarakat

8

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
2.	Perlindungan dan pelestarian penyu dan habitatnya	Memberikan pendampingan personel pada kegiatan perlindungan dan pelestarian penyu dan habitatnya	Melaksanakan penetasan telur penyu di ruang penetasan yang berskala besar (INTAN BOX)	Kantor Yayasan Penyu Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	2024-2027	Paling sedikit 6 bulan pelaksanaan kegiatan penetasan telur penyu dalam 1 tahun	Meningkatnya dukungan perlindungan dan pelestarian penyu dan habitatnya
		Memberikan pendampingan personel pada kegiatan perlindungan dan pelestarian penyu dan habitatnya	Melaksanakan pendataan dan <i>monitoring</i> konservasi penyu dan habitatnya	Sepanjang pesisir pantai Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	2024-2027	1 rekap data seri jumlah sarang, jumlah telur dan telur yang menetas, jumlah dan jenis penyu dan tukik yang dilepasliarkan serta 1 laporan kegiatan konservasi	

9

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						penyu dalam 1 tahun	

PIHAK KEDUA



WIYANTO HADITANOJO

PIHAK KESATU



GETREDA MELSINA HEHANUSSA

6. BAST Bantuan KOMPAK – Pokmaswas Bualawah



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR 3161/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Getreda Melsina Hehanussa,S.Pi,M.Si
NIP : 19750303 2002122003
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Ari Abdussalam
Jabatan : Ketua Lembaga Sumbawa Grow Up
Alamat : Jl. Lintas Raberas PPN Bukit Indah, Gg Kamboja No.7 RT 001/
RW 002, Kel. Seketeng, Kab. Sumbawa, Prov. NTB
Titik Koordinat : Lintang (8°29'57.9" LS) dan Bujur (117°25'51.3" BT),
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar berupa barang kepada **PIHAK KEDUA**,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Sumbawa Grow Up



Ari Abdussalam

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 3161/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024
Tanggal : 28 Juni 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Paket Selam Dasar: - Snorkel - Masker - Fin	5	Set	Rp.7.500.000,-
2	Dive Computer	1	Unit	Rp.8.300.000,-
3	Compressor Scuba Diving PE 100	1	Unit	Rp.81.520.000,-
4	Laptop	1	Unit	Rp.4.600.000,-
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp. 101.920.000,-

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga, Sumbawa Grow Up



Ari Abdussalam

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Nomor : 3161/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024
 Tanggal : 28 Juni 2024



Snorkle



Snorkle



Masker



Masker



Fin



Fin



Dive Computer



Dive Computer



Compresor scuba diving



Compresor scuba diving



Laptop



Laptop

7. BAST Bantuan KOMPAK – Sumbawa Grow Up



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR 3131/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP : 19750303 2002122003
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Medeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Ramli
Jabatan : Ketua POKMASWAS Bua Lawah
Alamat : Dusun Pinamin, Desa Poto Tano, Kel. Pototano Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat, Prov. NTB
Titik Koordinat : Lintang (-8.529703 LS) dan Bujur (116.833172 BT)
Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan Bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar berupa barang kepada **PIHAK KEDUA**,

mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak sahkan dari Berita Acara ini.

- PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain, jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA
Ketua POKMASWAS Bua Lawah,



Ramli

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 3131/BPSPL 4/PRL 440/VI/2024
Tanggal : 27 Juni 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	BCD Set : - BCD - Octopus - Regulator - Gauge	4	Set	Rp.76.000.000,-
2	Paket Selam Dasar: - Snorkel - Masker - Fin	4	Set	Rp.6.000.000,-
3	Weightbelt	4	Unit	Rp.600.000,-
4	Pemberat	16	Unit	Rp.2.080.000,-
5	Camera Underwater	1	Unit	Rp.8.500.000,-
6	Laptop	1	Unit	Rp.4.600.000,-
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp.97.780.000,-

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

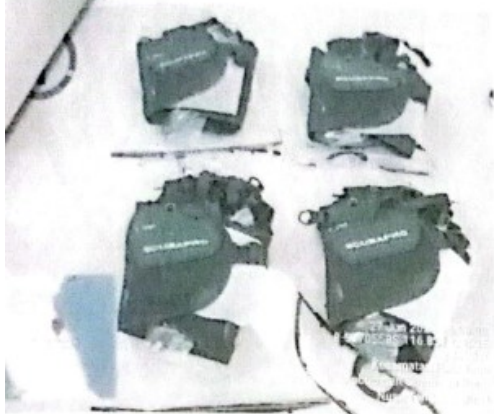
PIHAK KEDUA
Ketua POKMASWAS Bua Lawah



Ramli

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Nomor : 3131/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024
 Tanggal : 27 Juni 2024



BCD



BCD



Octopus

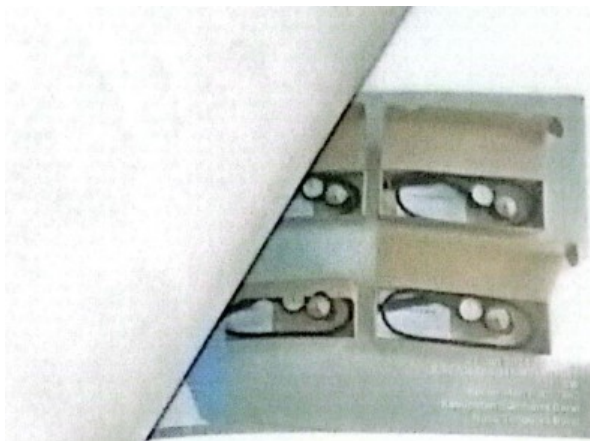


Octopus



Regulator





Gauche



Gauche



Snorkle



Snorkle



Masker



Masker



Fin



Fin



Weightbelt



Weightbelt



Pemberat



Pemberat



Camera Underwater



Camera Underwater



Laptop



Laptop

8. BAST Bantuan KOMPAK – Pokmaswas Desa Lewotobi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR**

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR B.4456/BPSPL.4/PRL.440/VIII/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP : 19750303 2002122003
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
Alamat : Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Km. 16.7, Pering, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Kanisius Laranwutun Uran
Jabatan : POKMASWAS Desa Lewotobi
Alamat : Desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores timur, Nusa Tenggara Timur
Titik Koordinat : Lintang (-8.337162) dan Bujur (122.910571),
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar berupa barang kepada **PIHAK KEDUA**,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA
Ketua POKMASWAS Desa Lewotobi



Kanisius Laranwutun Uran

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : B.4456/BPSPL.4/PRL.440/VIII/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Kapal Fiber Ukuran 6.15 m x 1.43 m x 0.61 m	1	Unit	Rp.20.650.000
2	Mesin Kapal 15 PK	1	Unit	Rp.29.660.000
3	Paket Selam Dasar: - Snorkel - Masker - Fin	5	Set	Rp.7.750.000,-
4	Teropong Binocular 10 x 42	2	Unit	Rp.7.365.000
5	Topi	10	Buah	Rp. 1.623.700
6	Rompi	10	Buah	Rp. 1.641.590
7	Kamera DSLR	1	Unit	Rp. 15.600.000
8	Laptop	1	Unit	Rp. 10.500.000
9	Senter	10	Unit	Rp.1.835.000
10.	Dry Bag 20 L	10	Buah	Rp. 2.301.300
11.	SD Card	1	Buah	Rp. 395.000
TOTAL HARGA PEROLEHAN				Rp. 99.321.590

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Nomor : B.4456/BPSPL.4/PRL.440/VIII/2024
 Tanggal : 27 Agustus 2024



Kapal Fiber



Mesin Kapal



Paket Selam Dasar



Teropong Binocular



Topi



Rompi

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang,



Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

PIHAK KEDUA
Ketua POKMASWAS Desa Lewotobi



Kanisius Laranwutun Uran



Kamera DSLR



Senter



Laptop



SD Card



Dry Bag

9. Daftar Hadir Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pelatihan Selam Scuba

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024

Kegiatan : Pelatihan Selam Scuba

Tempat : Pondok Wisata Gili Lumbu, Desa Padak guar, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN	
1	Vita Awansari	staf pegawai hotel Blue up to Gili Lumbu	P	085 289 012 971	1.	
2	Kamiollah	Pokemas wasba	L	085 338 486 043	2.	
3	Wawan Hariadi Jaya Kusuma	HUMAS / pokemas wasba	L	089 4963 9567	3.	
4	Muhammad Syukur	Pokemaswas Randeran	L	082 339 925 375	4.	
5	Ari Abdussalam	ICATRA	L		5.	
6	Rendy Vidya Wibisono	PELP Renda / DTP NTD	L	085 746 121 979	6.	
7	Hunaidi	Pokemaswas Randeran	L	085 333 051 581	7.	
8	Dani Auliya	Sumbawa University	L	081 237 779 779	8.	
9	Rio Fadila Ilhami				9.	
10	Amiruddin	SEKRETARIS	L	081 357 919 808	10.	

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN	
11	Syarifuddin Aries	Ketua Forum Gili Lumbu	L	087 703 393 025	11.	
12	Mahari	Ketua Klub Pelita	L	085 250 437 862	12.	
13	Rahmat Hidayatullah	Anggota pokemaswas Randeran Masyarakat pasir & laut	L	082 340 573 053	13.	
14	Fitrah	STAF BLUD UPTD SSR	L	0812 7702 59	14.	
15	Musa	STAF BLUD UPTD SSR	L	0813 37083380	15.	
16	Ferdi Perdiansyah	Setoran / Sumbawa Grow up	L		16.	
17	Abdul Rohid	Pokemaswas Pasir Putih	L		17.	
18	M. Yariansyah	Anggota Korpela NTD	L	085 139 091 118	18.	
19	Muhammad Nauval Rasyad	Anggota Poldarwis	L	085 285 288 891	19.	
20	Rudini	Wakil Ketua	L		20.	
21	SUDARMONO	KETUA POKEMASWAS	L	0822 40083494	21.	
22	Egi Ranzani	Pokemaswas Prinsis Dheni	L		22.	
23	Fransiskus Asan Kedang	Setoran / Karangreka	L	08 211089533	23.	
24	I Kadek Riko Adiantara	Anggota / OPST	L	085 823 247 882	24.	
25	Nyoman Suardika	Anggota / Perencanaan	L	081 945 436 087	25.	

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024

Kegiatan : Pelatihan Selam Scuba

Tempat : Pondok Wisata Gili Lampu, Desa Padak guar, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN	
1	ALFIAN	INSTRUKTUR	L	08179627424	1.	2.
2	Rahadian Hashadi	Instructor	L	081907070007	3.	4.
3	L. AHMAD KARSABADI	INSTRUCTOR	L	081915994607	5.	6.
4	AMAT	ASISTEN	L	082339280979	7.	8.
5	MOHAMMAD SUPARMAN	ASISTEN	L	08814802121	9.	10.
6	TAUFAN GALAXY	- " -	L	081.936.712337	11.	12.
7	ALIANI PRATAMA	Asisten Uram	L	085333851247	13.	14.
8	M. Dira Haris	Asisten	L	087750121443	15.	16.
9	Roy Vikeer Perera	Asisten	L	087819604322	17.	18.
10	Mawardi Erlangga	Asis Muda	L	081292194888	19.	20.

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN	
11	Nurhamdan	APDK BPSPL DPS	L	081321497346	11.	12.
12	Desi Setyaningsih	PELP BPSPL Denpasar	P	083816720871	13.	14.
13	Suci Kusumartuti N.A.	Analisis Kelautan & Perikanan	P	085799990730	15.	16.
14	Komang Elwaninguni	APDK BPSPL DPS	P	085999908897	17.	18.
15	M. Baruwati	PELP Muz BPSPL DPS	L	081528712621	19.	20.
16	Desi Seti Budis	PELP	L	082818777754	21.	22.
17					23.	24.
18					25.	26.
19					27.	28.
20					29.	30.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024

Kegiatan : Pelatihan Selam Scuba

Tempat : Pondok Wisata Gili Lampu, Desa Padak guar, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN	
1	Vita Awansari	BLVD UPTD BPSDEP-SSB	P	085 258 012 971	1.	
2	Kamiollah	pokmas bva	L	08533 8986 863		2.
3	Wawan Hariadi Jaya Kusuma	Humas pokmas was D	L	0819 4463 9567	3.	
4	Muhammad Syukur	kech a pokmaswas TLP	L	082 33 9925 375		4.
5	Ari Abdussalam	Sumbawa Grow up	L		5.	
6	Rendy Vidya Wibisono	DELP pertama / DKP NTB	L	085746 121 994		6.
7	Hunaidi	Anggota TLP	L	085 333 054 501	7.	
8	Dani Auliya	Subbi U	L	08123777 9779		8.
9	Alfian Pratama	Unram	L	085353 031 347	9.	
10	Amiruddin	pokmas malawa	L	081353 919 808		10.

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN	
11	Syarifuddin Aries	Ketua Forum G. Baru	L	0812 303 373 025	11.	
12	Mahari	Ketua klub POLITA	L	085230437 262		12.
13	Rahmat Hidayatullah	Pokmaswas Perikanan Anggar Pekir dan Lawi	L	682740590731	13.	
14	Fitrah	Dislitnas NTB	L	0812 7702 513		14.
15	Musa	" " "	L	081 337 083 580	15.	
16	Ferdi Perdiansyah	Sumbawa Grow UP	L			16.
17	Abdul Rohid	Pokmaswas Ranyu Puh	L		17.	
18	M. Yariansyah	Anggota Forum NTR	L	0851 3091 118		18.
19	Muhammad Nauval Rasyad	Anggota Pokmaswas	L	085-235-278-897	19.	
20	Rudini	Wakil Ketua	L			20.
21	SUDARMONO	Pokmaswas PP	L	0823410083494	21.	
22	Egi Ranzani	Pokmaswas Perancis Bekir	L			22.
23	Fransiskus Asan Kedang	Sekretaris Karangtuban	L	082110189537	23.	
24	I Kadek Riko Adiantara	anggota / opst	L	085829249 832		24.
25	Nyoman Suardika	anggota / Koordinator	L	081 945 436 007	25.	

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
 Kegiatan : Pelatihan Selam Scuba
 Tempat : Pondok Wisata Gili Lampu, Desa Padak guar, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN
1	ALFIA ALFIAN	INSTRUKTUR	L	0817967424	1.
2	Marsitra Erlangga	BPSPL DPS - ARJK	L	081294194888	2.
3	Komang Ely wahyuni	BPSPL DPS - ARJK	P	08519908897	3.
4	Nurhamdani	BPSPL DPS - ARJK	L	081521997396	4.
5	Suci Kusumastuti N.A.	BPSPL DPS	P	085799990930	5.
6	Lulu AHMAD KAPSA ABADI	DIVING INSTRUCTOR	L	081515994607	6.
7	AMAT	ASISTEN	L	082339230575	7.
8	ROY Viken Permana	ASISTEN	L	087819604322	8.
9	Muhamad Difa Hariadi	ASISTEN	L	087750121493	9.
10	Rahadian Hasnadi	Instructor	L	081967070007	10.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
 Kegiatan : Pelatihan Selam Scuba
 Tempat : Pondok Wisata Gili Lampu, Desa Padak guar, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN
1	Vita Awansari	Badan Usaha BPSPL-SSB	P	085 230 012 971	1.
2	Kamiollah	pelawas bua	L	0855330956847	2.
3	Wawan Hariadi Jaya Kusuma	Humas, Pemasaran, Relokasi	L	0819 4463 9567	3.
4	Muhammad Syukur	KORPRI Pemasaran Pandangan	L		4.
5	Ari Abdussalam	Sumberdaya Grow up	L		5.
6	Rendy Vidya Wibisono	PELUK Perikanan / IKP ATO	L	085746121934	6.
7	Hunaidi	Hunaidi	L	085 333 054581	7.
8	Dani Auliya	Gubrio	L	081237779779	8.
9	Alfian Pratama	Direktur MSDC UNILAM	L	085 333 931 247	9.
10	Amiruddin	SEKRETARIS POTWIS	L		10.

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN	
11	Syarifuddin Aries	Kelma Forum G. Bali	L	087 705 323 025	11.	
12	Mahari	Kelma Rusa Pkta	L	085 238 457 262		12.
13	Rahmat Hidayatullah	Pokmaswas perikanan masyarakat perikanan laut	L	08234058031	13.	
14	Fitrah	Disdiknas NTP				14.
15	Musa	BLUD SSB	L	081737057030	15.	
16	Ferdi Perdiansyah	Sumbawa Grow Up	L	0817362985		16.
17	Abdul Rohid	Pokmaswas	L		17.	
18	M. Yariansyah	Agribisnis NTP	L			18.
19	Muhammad Nauval Rasyad	Anggota Pokmaswas	L	08523227889	19.	
20	Rudini	Anggota Pokmaswas		082340082494		20.
21	SUDARMONO	Kelma			21.	
22	Egi Ranzani					22.
23	Fransiskus Asan Kedang	Sekretaris kelompok pok.		082-110189537	23.	
24	I Kadek Riko Adiantara	Anggota / CPST	L	085829244832		24.
25	Nyoman Suardika	Anggota / Timbangan kelari	L	081 915 496 087	25.	

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
 Kegiatan : Pelatihan Selam Scuba
 Tempat : Pondok Wisata Gili Lumbu, Desa Padak guar, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	Jenis Kelamin L / P	EMAIL / No. HP	TANDA TANGAN	
1	Laili Ahmad Karsa Alendi	INSTRUCTOR	L	081815994607	1.	
2	Taufan Galaxy	Kelas	L	08979205881		2.
3	AMAT	ASISTEN	L	082339230979	3.	
4	Muhammad Dipa Hariadi	ASISTEN	L	087750121443		4.
5	Poy Vika Perera	ASISTEN	L		5.	
6	Mohammad Suparman	ASISTEN	L			6.
7	Kanang Elguahyeni	BPSPL DPS - ARK Muba	P	085179908897	7.	
8	Nurhamani	BPSPL DPS - ARK Muba	L	081321497346		8.
9	Dewi Selyaningih	BPSPL Denpasar	P	083816720871	9.	
10	M. Bernawati	BPSPL DPS	L	08133872621		10.

1. Penghargaan Satuan Kerja dengan Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Tingkat UAKPA Tercepat Kategori PAGU Sedang Semester I Tahun Anggaran 2024



2. Penghargaan Peringkat III Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Transaksi Tertinggi Semester I Tahun Anggaran 2024



3. Penghargaan Unit Pelaksana Teknis Terbaik Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 lingkungan DJPKRL



4. Penghargaan Satker dengan Presentase Tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Tahun 2024 lingkup Satker Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PKRL



5. Link Matriks Kinerja Pendanaan BPSPL Denpasar:

https://drive.google.com/drive/folders/1fhHdDPPby3N3bB69004U1B-89xdgzAT?usp=drive_link



**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Bypass Prof Ida Bagus Mantra Km 16,7 Desa Pering,
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali**